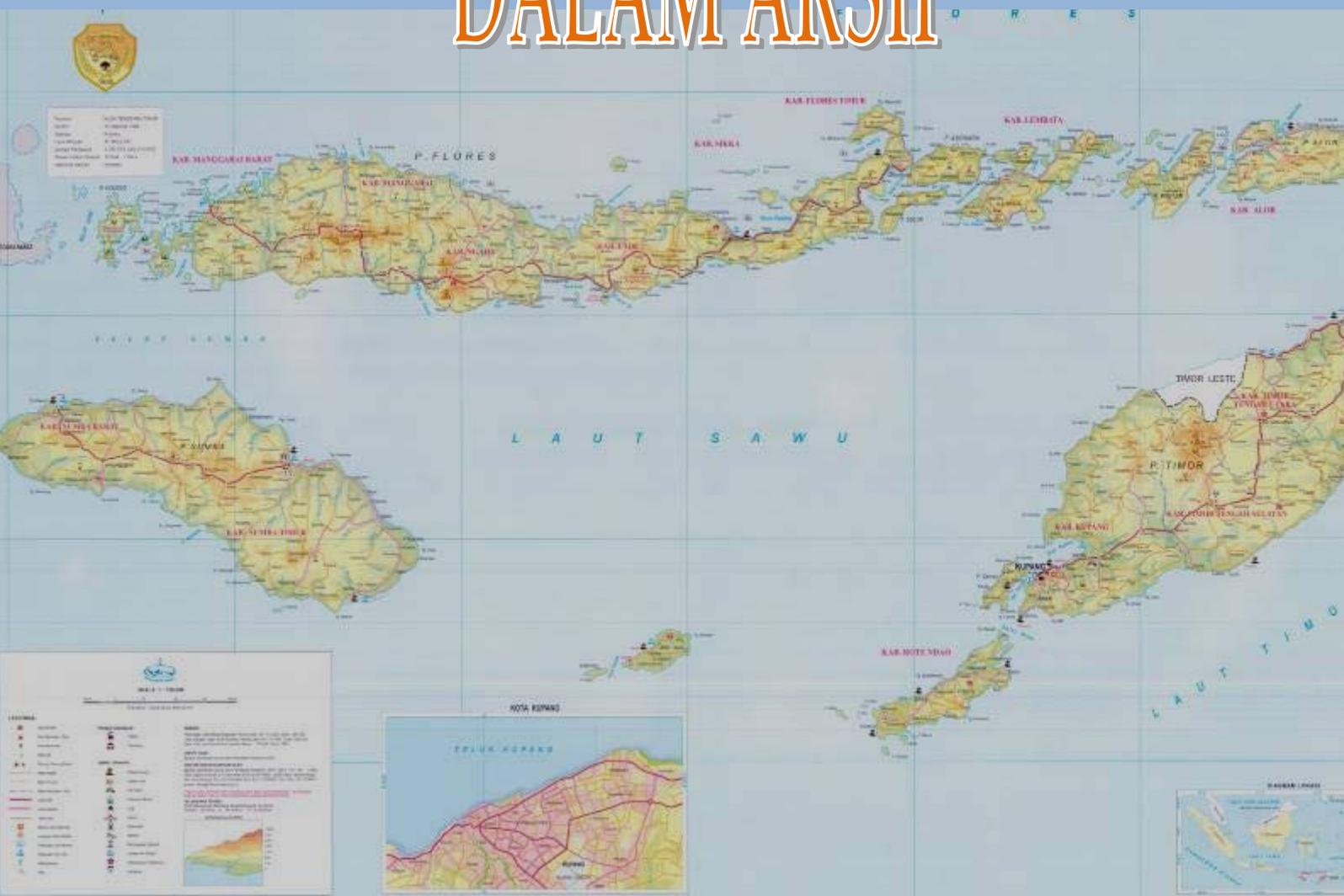


CITRA NUSA TENGGARA TIMUR DALAM ARSIP



ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA, DESEMBER 2008

CITRA NUSA TENGGARA TIMUR DALAM ARSIP



ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

2008



Lambang Provinsi Nusa Tenggara Timur
2008



ARTI LAMBANG PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Lambang pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari dua (2) warna dasar yaitu warna merah dan kuning. Angka yang tertera dibawah padi dan kapas yaitu 1958 menandakan tahun berdirinya daerah ini menjadi sebuah provinsi

Objek-objek gambar yang ada dalam lambang ini memiliki makna atau arti masing-masing yaitu:

BINTANG, Melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

KOMODO, Melambangkan Kekayaan Alam Khas NTT;

PADI dan KAPAS, Melambangkan Kemakmuran;

TOMBAK, Melambangkan Keagungan dan Kejayaan;

POHON BERINGIN, Melambangkan Persatuan Dan Kesatuan.



DRS. FRANS LEBU RAYA
Gubernur Nusa Tenggara Timur
Periode 2008 – 2013



IR. ESTHON L. FOENAY, M.SI
Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur
Periode 2008 – 2013



DRS. MELKIANUS ADOE
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Periode 2004 – 2009



DR. IR. JAMIN HABID, MM.
Sekretaris Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur

MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



Brigadir Jenderal Polisi
Drs. A. Bambang Suedi, SH., MM.
Kapolda Nusa Tenggara Timur
2008 – Sekarang



Kolonel Infanteri
Winston Pardamean
Korem 161 Wirasakti, NTT
Januari 2008 – Sekarang



Djohani Silalahi, SH.
Kepala Kejaksaan Tinggi
Nusa Tenggara Timur
2008 – Sekarang



Manis Soejono, SH.
Ketua Pengadilan Tinggi Kupang
Nusa Tenggara Timur
2008 – Sekarang

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR PERIODE 1958-2013



W. J. LALAMENTIK
1958 – 1968



**KOLONEL INFANTRI
EL TARI**
1968 - 1978



WANG SUWANDI, SH
April 1978 - 16 Juni 1978



DR. BEN MBOI
1978 – 1988



DR. H. FERNANDEZ
1988 – 1993



**MAYJEN (PUR.)
HERMAN MUSAKABE**
1993 – 1998



PIET ALEXANDER TALLO, SH
1999 – 2008



DRS. FRANS LEBU RAYA
2008 – 2013

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR PERIODE 1958-2013



**KOLONEL INFANTRI
EL TARI**
1965 – 1966



G. BOEKY, SH.
1986 -1991



S. H. M. LERICK
1991 - 1996



**PIET ALEXANDER
TALLO, SH**
1996 – 1998



**DRS. JOHANES
PAKE PANI**
1999 – 2003



DRS. FRANS LEBU RAYA
2003 – 2008



IR. ESTHON L. FOENAY, M.SI
2008 – 2013

BUPATI/WALIKOTA
DI LINGKUNGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



Daniel Adoe
Walikota
Kupang



I.A. Medah
Bupati Kupang



D.A. Banunaek
Bupati Timor
Tengah Selatan



Gabriel Manek
Bupati Timor
Tengah Utara



Joachim Lopez
Bupati Belu



A. Takalapeta
Bupati Alor



Simon Hayon
Bupati Flores
Timur



Sosimus Mitang
Bupati Sikka



Paulinus Domi
Bupati Ende



P.J. Nuwa Wea
Bupati Ngada



Christian Rotok
Bupati
Manggarai



Fidelis Pranda
Bupati
Manggarai Barat



J. Pote Leba
Bupati
Sumba Barat



G. Mbilidjora
Bupati
Sumba Timur



Christian Dillak
Bupati
Rote Ndao



Andreas D.M.



Elias Djo



Umbu Saga A.



Emanuel B. Eha

Bupati Lembata

Bupati
Nagakeo

Bupati
Sumba Tengah

Bupati
Sumba Barat Daya

**LAMBANG-LAMBANG PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
DI LINGKUNGAN NUSA TENGGARA TIMUR**



Kota Kupang



Kabupaten
Kupang



Kabupaten Timor
Tengah Selatan



Kabupaten Timor
Tengah Utara



Kabupaten Belu



Kabupaten Alor



Kabupaten
Flores Timur



Kabupaten
Sikka



Kabupaten
Ende



Kabupaten
Ngada



Kabupaten
Manggarai



Kabupaten
Manggarai
Barat



Kabupaten
Sumba Barat



Kabupaten
Sumba Timur



Kabupaten Rote
Ndao



Kabupaten
Lembata

Sambutan Kepala Arsip Nasional RI



SAMBUTAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Indonesia yang terdiri atas beribu-ribu pulau, berbagai suku, agama dan budaya dalam perjalanan sejarahnya penuh dengan dinamika. Keindahan Indonesia terletak pada keberagaman tersebut dan warna pelangi yang disandangnya, seperti yang telah dipatrikan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman dan warna pelangi tersebut juga terekam pada arsip yang merupakan warisan nasional. Sehingga tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa : “Dari semua aset negara yang ada, arsip adalah aset negara yang paling berharga. Ia merupakan warisan nasional yang perlu dipelihara dan dilestarikan dari generasi ke generasi. Tingkat keberadaban suatu bangsa dapat dilihat dari pemeliharaan dan pelestarian arsipnya”.

Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu wilayah strategis di Indonesia, bukan saja daerah ini memiliki potensi Sumber Daya Alam yang bernilai ekonomis melainkan karena kekayaan budayanya menjadi objek wisata unggulan Indonesia. Dalam perjalanan sejarahnya hingga menjadi salah satu provinsi yang bernaung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diwarnai oleh berbagai dinamika baik sosial, ekonomi maupun politik. Dinamika tersebut juga terekam dalam arsip. Melalui khasanah arsip yang tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), maka disusunlah suatu program, yang disebut dengan Citra Daerah.

Program Citra Daerah pada dasarnya merupakan kegiatan pengungkapan kembali memori kolektif daerah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai budaya bangsa dan nilai kebangsaan, memupuk rasa cinta tanah air dan mencegah disintegrasi bangsa dan sekaligus untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini didukung data dan fakta yang terkandung dalam arsip yang merefleksikan bagaimana suatu daerah ikut memberi warna dan corak dalam sejarah perjalanan bangsa dari masa ke masa. Melalui khasanah arsip tersebut dapat diperoleh informasi akurat dan obyektif mengenai peran masing-masing daerah dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai NKRI.

Materi Citra Daerah berasal dari arsip baik dalam bentuk teks, peta, dan foto sebagai satu kesatuan informasi yang menggambarkan sebuah dinamika kolektif menuju pembentukan bangsa dan negara Indonesia, yang terbentuk atas dasar kesadaran sejarah. Pengalaman sejarah suatu bangsa adalah riwayat hidup bangsa itu sendiri. Apapun pengalaman yang dialami, duka, nestapa, darah, nyawa, dan pengorbanan untuk mencapai kemerdekaan, mengisi dan mempertahankan kemerdekaan serta membangun bangsa dan negara yang dicita-citakan bersama sebagai memori kolektif bangsa. Sebagai memori kolektif, dan jati diri bangsa serta warisan nasional, arsip tersebut menjadi bukti akan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dan nasional yang merupakan gambaran tentang dinamika berbangsa dan bernegara dan sekaligus merupakan bahan bukti pertanggungjawaban nasional bagi generasi mendatang.

Mencermati tumbuhnya semangat otonomi daerah dan dengan melihat latar belakang sejarah, Citra Daerah ini diharapkan dapat meluruskan dan meningkatkan pemahaman akan makna pentingnya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berayun ditengah derasnya arus globalisasi. Dengan demikian semangat otonomi daerah harus dipahami dalam makna yang bersifat integratif bagi kelangsungan kehidupan tatanan sosial, ekonomi, politik dan budaya daerah yang pada gilirannya menjadi proses dinamika nasional.

Adanya keterbatasan penyajian materi sekiranya dapat dijadikan pelajaran berharga bagi penyempurnaan penyusunan Citra Daerah selanjutnya. Akhirnya dengan kehadiran Citra Daerah ini, diharapkan dapat merangsang tumbuhnya program lanjutan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Terima Kasih.

Jakarta, 13 November 2008
Kepala,

Djoko Utomo

DAFTAR ISI

LAMBANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR _____	ii
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR _____	iv
WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR _____	v
KETUA DPRD NUSA TENGGARA TIMUR _____	vi
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR _____	vii
MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH _____	viii
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 1958 – 2013 _____	ix
WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 1958 – 2013 _____	x
BUPATI/WALIKOTA DI NUSA TENGGARA TIMUR _____	xi
LAMBANG KABUPATEN/KOTA DI NUSA TENGGARA TIMUR _____	xii
SAMBUTAN KEPALA ANRI _____	xiii
DAFTAR ISI _____	xvi
PENDAHULUAN _____	1
A. Latar Belakang _____	2
B. Kondisi Geografis dan Sosial Budaya _____	4
C. Perkembangan Sejarah Nusa Tenggara Timur _____	4
1. Periode Sebelum Kedatangan Bangsa Eropa _____	5
2. Periode Kolonialisme Bangsa Eropa _____	7
3. Periode Pendudukan Jepang _____	14
4. Periode Kemerdekaan Republik Indonesia _____	15
Daftar Pustaka _____	21
CITRA NUSA TENGGARA TIMUR DALAM ARSIP _____	25
A. Geografis _____	26
B. Politik dan Pemerintahan _____	39
C. Pertahanan dan Keamanan _____	71
D. Keagamaan _____	76
E. Pertanian _____	86
F. Perekonomian _____	95
G. Pendidikan _____	105
H. Kebudayaan _____	116
I. Perindustrian _____	139
J. Fauna _____	148
K. Kesehatan _____	157
L. Bangunan _____	161
M. Transportasi _____	172
N. Panorama _____	177
DAFTAR ARSIP _____	183
PENUTUP _____	206

Pendahuluan

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Mewacanakan "daerah" sebagai kondisi dasar diharapkan akan membangun pemahaman kita tentang bangsa (nation), dan rasa kebangsaan (nasionalisme). Di masa lalu eksistensi daerah terbentuk karena ikatan kultural yang melekat pada wilayah dan masyarakatnya. Dalam perkembangannya eksistensi dan dinamika daerah diwujudkan pada kemandirian dan prakarsa daerah yang bersangkutan untuk memajukan masyarakat dan wilayahnya. Dalam konteks tersebut keberhasilan yang dicapai suatu daerah akan menjadi sumbangan bagi keberhasilan dalam membangun sebuah bangsa.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah adalah upaya dasar yang melandasi keotonomian di daerah. Otonomi Daerah pada hakekatnya adalah sebagai suatu upaya untuk meningkatkan peran daerah dalam memberikan dan mendekatkan layanan prima kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya masing-masing secara optimal.

Salah satu aspek yang cukup mendasar dengan penerapan otonomi daerah berkenaan dengan fungsi kearsipan adalah beralihnya kewenangan untuk mengelola arsip statis di daerah dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) kepada Pemerintah Daerah. Untuk itu pemerintah daerah perlu diberikan informasi mengenai peristiwa masa lalu tentang daerah masing-masing agar Pemerintah Daerah dapat mengembangkan upaya penyelamatan dan pelestarian arsip statis secara mandiri dan bertanggung jawab pada masa mendatang. Pemaknaan mengenai pentingnya masa lampau yang terekam dalam arsip harus dimaknai oleh kearifan lokal dan nasional dalam upaya mempertahankan nilai-nilai martabat bangsa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembentukan *nations and character building* sesuai cita-cita dan nilai-nilai luhur bangsa.

Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, Arsip Nasional Republik Indonesia ikut serta berperan aktif untuk memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat pelaksanaan otonomi daerah melalui *Program Citra Daerah*. Program Citra Daerah pada dasarnya merupakan kegiatan pengungkapan kembali memori kolektif daerah. Program ini dibuat untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai budaya bangsa dan nilai kebangsaan, memupuk rasa cinta tanah air dan mencegah disintegrasi bangsa. Data dan fakta yang terkandung dalam arsip sebagai memori kolektif, dan jati diri bangsa serta warisan nasional yang merefleksikan bagaimana suatu daerah ikut memberi warna dan corak dalam sejarah perjalanan bangsa dari masa ke masa. Dengan mencermati data dan fakta tersebut akan diperoleh informasi akurat dan obyektif mengenai peran masing-masing daerah dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan semangat otonomi daerah dan dengan melihat latar belakang sejarah, Citra Daerah ini diharapkan dapat meluruskan dan meningkatkan pemahaman kita akan makna tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian semangat otonomi daerah harus dipahami dalam makna yang bersifat integratif dan bukan disintegratif terhadap tatanan sosial budaya maupun politik kenegaraan.

Program Citra Daerah yang dikembangkan Arsip Nasional RI sejak tahun 2003 dilaksanakan dalam bentuk penyerahan hasil alihmedia (berupa *hard copy dan soft copy*) dari khasanah arsip statis yang tersimpan di ANRI kepada seluruh provinsi di Indonesia. Salah satu provinsi yang menerima Citra Daerah pada tahun 2008 ini adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Arsip mengenai Nusa Tenggara Timur yang diserahkan mencakup kurun waktu mulai awal abad ke-17 sampai dengan abad ke-20, yaitu sejak masa *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC) sampai dengan masa Republik Indonesia. Arsip yang diserahkan berisikan informasi tentang berbagai fenomena dan peristiwa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur

pada periode tersebut. Citra Nusa Tenggara Timur dalam arsip ini diharapkan dapat memupuk rasa cinta tanah air, berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

B. KONDISI GEOGRAFIS DAN SOSIAL BUDAYA

Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sekarang terletak di selatan Khatulistiwa berada pada posisi 80° - 120° Lintang Selatan (LS) dan 118° - 125° Bujur Timur (BT). Batas-batas wilayah Nusa Tenggara Timur antara lain sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Negara Timor Leste.

Luas wilayah Nusa Tenggara Timur meliputi daratan 47.349,9 km² (2,4% luas wilayah Indonesia), dan wilayah perairan \pm 200.000 km² di luar perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari 566 pulau. Pulau-pulau yang sudah diberi nama baru 246 pulau, sisanya belum mempunyai nama. Diantara pulau-pulau yang sudah diberi nama, terdapat empat pulau besar yaitu Flores, Sumba, Timor dan Alor (Flobamora). Pulau-pulau kecil antara lain Adonara, Babi, Lomblen, Pamana Besar, Pangga Batang, Parmahan, Komodo, Adonara, Rinca, Sbabu, Solor, Rote dan lain-lain.

Hampir semua pulau di wilayah Nusa Tenggara Timur terdiri dari pegunungan dan perbukitan kapur. Beberapa di antaranya masih terdapat gunung berapi aktif. Di daerah Flores, Sumba dan Timor terdapat kawasan padang rumput (savanna) dan stepa yang luas. Kondisi alam Nusa Tenggara Timur tersebut merupakan efek dari kondisi iklim kering yang dipengaruhi oleh angin musim. Periode musim kemarau lebih panjang, yaitu 7 bulan (Mei-November), sedangkan musim hujan selama 5 bulan (Desember-April).

Suhu udara rata-rata 27 ° C, suhu maksimum rata-rata 29° C, dan suhu minimum rata-rata 26° C. Kondisi geografis dan iklim Nusa Tenggara Timur tersebut sedikit banyak berpengaruh pada kehidupan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat di daerah Nusa Tenggara Timur.

Pada tahun 2007 penduduk Nusa Tenggara Timur berjumlah 4.188.774 jiwa terdiri dari berbagai suku bangsa, antara lain suku bangsa Manggarai, Ngada, Nge Reo, Ende, Sika, Larantuka, Solor, Alor, Rote, Sabu dan Sumba. Pengaruh kontak dengan suku bangsa lain, penduduk Nusa Tenggara Timur menganut berbagai macam agama dan kepercayaan, sampai tahun 1990 agama-agama yang dianut penduduk Nusa Tenggara Timur antara lain Islam (8,8%), Kristen (90,9%), Budha (0,034%), Hindu (0,082%). Sedangkan, bahasa daerah yang banyak digunakan adalah bahasa Tetun dan Dawan.

Mata pencaharian penduduk Nusa Tenggara Timur pada umumnya di bidang pertanian (padi, jagung, dan umbi-umbian), perkebunan (kelapa, kemiri, apel dan asam), kehutanan (kayu jati dan kayu cendana), perikanan (terutama di wilayah pesisir), peternakan (sapi, kuda, kerbau dan babi), pertambangan (emas, mangan, tembaga, gips dan kaolin). Selain itu, berkembang juga industri (semen) dan kerajinan tenun serta kerajinan rakyat lainnya.

C. GAMBARAN SEJARAH

1. Periode Sebelum Kedatangan Bangsa Eropa

Sebelum kedatangan bangsa Eropa, di Nusa Tenggara Timur sudah ada suatu kerajaan bernama **Maromak Oan** yang berpusat di Wehale dan memiliki kekuasaan yang cukup kuat dengan pemerintahan yang cukup teratur. Pemerintahan Maromak Oan lebih memusatkan pada urusan keagamaan yang dianggap sebagai perantara antara manusia dengan para dewata. Untuk urusan duniawi (termasuk pemerintahan) dibantu oleh ketiga Liura, yaitu **Liurai Fatuaruin** (yang dianggap Liurai Sulung), **Liurai Likusaen** dan **Liurai Sonbai**. Liurai membawahi para **Loro** (Am Uf), dan berikutnya membawahi para Nai (raja-raja kecil). Pengaruh kekuasaan Maromak Oan

meluas sampai ke daerah-daerah lain, seperti Flores, Alor dan Kisan.

Kerajaan Maromak Oan pernah berada di bawah pengaruh kerajaan Sriwijaya, Majapahit dan Kesultanan Ternate. Dasar kesatuan pemerintahan asli Kerajaan Maromak Oan adalah kekeluargaan dari beberapa suku. Tiap suku dikepalai oleh seorang kepala suku (Nai). Diantara suku-suku tersebut ada juga yang membentuk persekutuan yang meliputi beberapa suku. Persekutuan suku dipimpin oleh seorang Am Uf (Uispah) atau Loro yang dianggap memiliki keberanian, kecakapan memimpin dan bijaksana. Sehingga, pada hakekatnya Loro atau Nai tidaklah menjadi hak waris turun temurun. Kalau pun ada yang mewarisi karena kebetulan saja keturunaan tersebut memiliki persyaratan, yaitu kecakapan memimpin, bijaksana dan memiliki keberanian menjadi panglima untuk melindungi rakyatnya (suku atau persekutuan suku).

Perjalanan sejarah wilayah Nusa Tenggara Timur tidak terlepas dari dua faktor, yaitu ekonomi (terutama komoditas kayu Cendana) dan kontak sosial-budaya dengan suku bangsa dan bangsa dari kawasan lain. Sebelum kedatangan bangsa Eropa, Nusa Tenggara Timur sudah dikenal dunia luar, terutama karena penghasil komoditas perdagangan Cendana Putih.

Sejak abad ke-10, para pedagang dari Cina dan India sudah mengadakan hubungan dagang dengan penduduk Timor. Menurut berita Cina yang ditulis tahun 1225, Pulau Timor sangat kaya dengan kayu Cendana dan membayar kayu Cendana sebagai upeti pada Kerajaan Hindu Jawa di Kediri (Majapahit). Dalam buku *Negarakertagama* yang ditulis tahun ± 1365, Timor dan Solor (Flores) merupakan salah satu wilayah kekuasaan Raja Hayam Wuruk (Majapahit). Menurut berita Cina yang ditulis tahun 1436 (Zaman Dinasti Ming), ada sekitar 12 pelabuhan di Pulau Timor, dimana para pedagang Cina dapat memuat kayu Cendana untuk ditukar dengan barang-barang dagangan dari Cina, seperti tembikar, keramik, manik, sutra, barang-barang dari besi (pisau, parang, kapak) dan lain-lain. Pada tahun 1522 pulau-pulau Solor, Alor dan Timor pernah dikunjungi oleh kapal Victoria, yang merupakan sisa terakhir armada **Magelhaens** yang pertama kali mengelilingi dunia.

2. Periode Kolonialisme Bangsa Eropa

Kedatangan bangsa Eropa ke Nusa Tenggara Timur berkaitan erat dengan kondisi politik dan ekonomi di belahan dunia lain, terutama akibat jatuhnya Kota Konstantinopel sebagai pusat lalulintas perdagangan ke dan dari Eropa di pantai Bosphorus diduduki oleh tentara Turki pada tahun 1453. Pada saat itu mulailah bangsa Eropa, yang tetap memerlukan rempah-rempah melakukan penjelajahan mencari wilayah Hindia Timur. Pada mulanya bangsa Eropa datang ke Nusantara, termasuk Nusa Tenggara Timur adalah untuk hubungan perdagangan. Kemudian berkembang ke arah monopoli komoditas, sehingga dapat melakukan perjanjian mengikat yang lebih banyak merugikan kerajaan-kerajaan di daerah Nusa Tenggara Timur. Dalam bidang pemerintahan, secara perlahan telah mengubah sistem pemerintahan lokal dengan sistem pemerintahan kolonial.

Pada tahun 1511, Portugis berhasil menaklukkan Malaka, kemudian mendarat di Pulau-pulau Timor dan memusatkan perdagangannya di Pulau Solor. Untuk memperkuat pertahanannya, Portugis membangun benteng di Solor pada tahun 1566. Kontak sosial antara bangsa Portugis dengan penduduk asli menimbulkan percampuran antara keduanya. Melalui perkawinan antara penduduk asli dengan tentara dan para pedagang Portugis memunculkan golongan Indo-Portugis yang beragama Katolik yang disebut "Topasses" atau "Portugis Hitam".

Selain Portugis, Bangsa Eropa lain yang datang ke Nusa Tenggara Timur adalah bangsa Belanda yang memandang penting untuk menguasai wilayah Timor, terutama untuk memonopoli perdagangan kayu Cendana dan sekaligus mengamankan jalur perdagangan rempah-rempah di daerah Maluku dan Sulawesi.

Pada tahun 1613 Belanda (VOC) di bawah pimpinan **Apollonius Scot** tiba di pelabuhan Kupang. Tiga bulan sebelumnya, Belanda telah menyerang benteng Portugis di Solor yang mengakibatkan pengungsian sekitar 1000 orang kaum Topasses ke Larantuka yang kemudian dijadikan benteng pertahanan golongan Topasses. Benteng Solor kemudian jatuh ke tangan Belanda dan benteng itu kemudian berganti nama

menjadi "**Fort Henricus**". Sejak tahun 1657 Solor menjadi pusat perdagangan Belanda di kepulauan Nusa Tenggara Timur.

Terusirnya Portugis dari Kupang, semakin memperkuat kekuasaan Belanda di Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 1756, **Paravicini** (Komisaris Tinggi VOC) berhasil mengadakan kontak dengan 15 raja-raja dari Timor, Solor dan Sumba. Kemudian VOC berhasil mengadakan perjanjian yang memuat hak monopoli perdagangan dan pengakuan raja-raja tersebut terhadap kedaulatan Raja Belanda atas wilayah tersebut.

Kehancuran VOC pada akhir abad ke-18, menyebabkan penguasaan wilayah jajahan diambil alih oleh *Bataafsche Republiek*. Kemudian dibentuk *Raad der Aziatische Bezittingen* untuk mengelola urusan koloni di Hindia Belanda. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Belanda pasal 62 ayat (2), pemerintahan umum di Hindia Belanda dilakukan oleh Gubernur Jenderal atas nama Raja Belanda sesuai ketentuan-ketentuan dalam *Indische Staatregeling* (IS) dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk Raja Belanda. Gubernur Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh serta bertanggung kepada Raja Belanda. Segala keterangan tentang pelaksanaan pemerintahan di Hindia Belanda dilaporkan melalui *Minister van Kolonien*. Gubernur Jenderal juga memiliki kewenangan membuat perjanjian-perjanjian dengan raja-raja dan rakyat di Hindia Belanda, membuat *regeringsverordeningen* (Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan undang-undang dan ordonansi) dan membuat ordonansi.

Pada abad ke-19 Belanda mulai menjalankan politik kolonialnya di Timor dengan berdasarkan prinsip-prinsip:

1. Pemerintahan berdasarkan adat (yang disesuaikan dengan kepentingan Belanda);
2. Perjanjian-perjanjian politik dengan raja-raja setempat tidak seperti kontrak politik dengan kerajaan-kerajaan lain di luar Timor yang bergelar "*Sultan*".

Dengan demikian Raja-raja di Nusa Tenggara Timur hanya dianggap sebagai pemuka utama masyarakat dalam suatu kerajaan kecil-kecil (*Landschappen*). Prinsip memberikan hak *Zelfsbestuur* (memerintah diri sendiri) tetap berlangsung selama tidak mengganggu kekuasaan Belanda. Perjanjian politik antara Belanda (yang diwakili VOC) dengan raja-raja setempat memiliki tingkatan yang berbeda-beda, seperti *Lange verklaring* (Kontrak

Panjang), *Korte Verklaring* (Kontrak Pendek), *Timor Verklaring* dan sebagainya.

Jika kedatangan Belanda di Nusa Tenggara Timur disambut damai, segera diadakan perjanjian, dimana Belanda mengakui kepala suku atau kepala persekutuan suku sebagai raja yang berkuasa absolut. Akan tetapi jika kedatangan Belanda mendapat perlawanan, maka Belanda akan mengangkat orang-orang yang membantunya sebagai raja atas wilayah yang ditaklukkannya dengan memberi gelar "Raja" atau "Liurai", "Raja Besar" atau "*Keizer*".

Pada awal abad ke-20, Gubernur Jenderal van Heutz memerintahkan kepada pamongpraja Belanda dan raja-raja di Nusa Tenggara Timur, agar pemerintahan di daerah Nusa Tenggara Timur harus dikembalikan kepada adat dan raja adalah penguasa tunggal dalam wilayahnya. Pada pelaksanaannya, pemerintahan adat tersebut hanya untuk memperkokoh pemerintahan kolonial Belanda. Dengan demikian, kepala-kepala suku yang bergelar "*fetor*" dan "*temukung*" hanya sebagai bawahan raja (sebagai perpanjangan kekuasaan Belanda). Begitu pula tanah milik suku tidak diakui lagi, sehingga menjadi "*Lands Domein*", milik *Zelfsbestuur*.

Menguatnya kekuasaan penjajah Belanda menimbulkan penderitaan rakyat, sehingga menimbulkan perlawanan keras dari rakyat Nusa Tenggara Timur yang dipimpin oleh raja-raja setempat, seperti kerajaan-kerajaan Amarasi (Tahun 1749, 1752 dan 1843), Sonbai (Tahun 1785, 1822–1905), Rote (1746–1920) dan Belu (Tahun 1642 melawan Portugis dan Tahun 1884, 1908, 1910, 1913, 1916-1942 melawan Belanda). Begitu pula perlawanan rakyat timbul di daerah Alor (1913-1916), Larantuka 1749 dan 1769 melawan Portugis), Ende (1838), Flores Tengah Utara (1917) dan daerah-daerah lainnya.

Kekesalan para raja terhadap penjajah Eropa antara lain dengan mengadakan persekutuan dengan musuh Eropa, seperti yang dilakukan Kerajaan Wehale di Belu Selatan yang bersekutu dengan Sultan Tolo dari Sulawesi dalam melawan Portugis. Bahkan Raja Wehale dan pengikutnya beralih menjadi penganut agama Islam. Begitu pula perlawanan rakyat Ende terhadap Belanda. Di Ende sudah lama terjalin hubungan dagang antara penduduk asli dengan para pendatang dari Makassar dan suku-

suku lain yang beragama Islam. Mereka bahu-membahu melawan kekuasaan Belanda di Ende.

Untuk mengatasi perlawanan rakyat Nusa Tenggara Timur, Belanda mengadakan isolasi dengan menandatangani *Timor-Traktaat* dengan Portugis pada tahun 1854. Wilayah Timor dibagi dua, antara wilayah yang dijajah Portugis dan sebagian lagi dijajah Belanda yang mulai berlaku pada tahun 1859. Pembagian wilayah jajahan tersebut dapat memusatkan usaha Belanda dalam menaklukkan perlawanan rakyat Timor di wilayah yang dikuasai Belanda. Usaha tersebut cukup berhasil dengan melemahnya kekuatan Kerajaan Sonbai yang sebelumnya melakukan perlawanan sengit terhadap pemerintah Belanda.

Pada tahun 1905 Raja Sobe Sonbai III ditangkap dan dibuang ke Sumba. Kemudian Raja Sonba dibawa lagi ke Kupang hingga wafat pada Tahun 1922. Begitu pula kerajaan-kerajaan lain yang memberontak dapat ditaklukkan, sehingga pemerintah Hindia Belanda dapat menata pemerintahan kolonialnya di Nusa Tenggara Timur.

Dalam abad XX, kerajaan-kerajaan yang ada di Nusa Tenggara Timur pada umumnya telah berubah status menjadi daerah swapraja. Pemerintah Hindia Belanda membagi daerah Nusa Tenggara Timur (Timor Indonesia) menjadi 43 daerah swapraja. Kemudian swapraja-swapraja tersebut dibagi lagi menjadi daerah-daerah yang lebih kecil, yang disebut kafetoran-kafetoran. Di pulau Timor ada 10 daerah swapraja, antara lain Kupang, Amfoang, Biboki, Amarasi, Amanatuban, Fatuleu, Mio mafo, Insana Molo dan Amanatun. Di pulau Flores terdiri dari 9 swapraja, antara lain Manggarai, Ende, Sikka, Larantuka, Adonara, Nage Keo, Angada, Lio dan Riung. Di pulau Sabu dan Rote masing-masing satu swapraja. Di pulau Sumba ada 15 swapraja antara lain Lewa-Kanbera, Waijewa, Melolo, Membora, Kodi-Laula, Takundung, Umbu Ratunggay, Kanatang, Rendi Mangili, Lambaja, Masukaren, Laura, Wei jelu, Wanokaka dan Ana Kalang. Sementara itu di pulau Alor-Pantar ada 7 swapraja, antara lain Baranusa, Pantar, Purema, Alor, Kolana, Batu lolang dan Matahari Naik.

Pemerintah Hindia terus melakukan penataan Wilayah Nusa Tenggara Timur dengan membentuk wilayah hukum keresidenan Timor dan daerah takluknya yang berpusat di

Kupang. Keresidenan Timor terdiri dari tiga *afdeling* (Timor, Flores serta Sumba dan Sumbawa), 15 *onderafdeling* dan 48 Swapraja. Pertama, *Afdeling* Timor dan pulau-pulau terdiri dari 6 *onderafdeling* dengan ibukotanya di Kupang. Kedua, adalah *Afdeling* Flores terdiri dari 5 *onderafdeling* dengan ibukotanya di Ende. Ketiga, adalah *Afdeling* Sumbawa dan Sumba dengan ibukota di Raba (Bima) yang terdiri 4 *onderafdeling*. Keresidenan Timor dan daerah takluknya dipimpin oleh seorang residen, sedangkan *afdeling* di pimpin oleh seorang asisten residen. Asisten residen ini membawahi Kontrolir atau *Controleur* dan *Gezaghebber* sebagai pemimpin *onderafdeling*. Asisten residen, kontrolir dan *gezaghebber* adalah pamong praja Kolonial Belanda. Para kepala *onderafdeling* yakni kontrolir dibantu oleh pamong praja bumi putra berpangkat *Bestuurs assistant*.

Sampai tahun 1942, Nusa Tenggara Timur berada dibagi menjadi 3 Karesidenan dan beberapa *Afdeling*, yaitu:

1. Karesidenan Timor *en eilanden* (Timor dan kepulauan):
 - a. *Afdeling* Kupang
 - b. *Afdeling* Rote
 - c. *Afdeling* Zuid-Midden Timor (Timor Tengah Selatan)
 - d. *Afdeling* Noord Mudden Timor (Timor Tengah Utara)
 - e. *Afdeling* Belu
 - f. *Afdeling* Alor
2. Karesidenan Flores
 - a. *Afdeling* Ende
 - b. *Afdeling* Oost Flores en Solor Eilanden (Flores Timur dan Kepulauan Solor)
 - c. *Afdeling* Maomero
 - d. *Afdeling* Ngada
 - e. *Afdeling* Manggarai
3. Karesidenan Sumba dan Sumbawa
 - a. *Afdeling* Bima
 - b. *Afdeling* Sumbawa
 - c. *Afdeling* Oost Sumba (Sumba Timur)
 - d. *Afdeling* West Sumba (Sumba Barat)

Penataan pemerintahan kolonial di Indonesia yang semakin kuat tidak berarti menyurutkan perlawanan rakyat terhadap penjajah Belanda, hanya strateginya yang berubah dari perlawanan fisik (militer) ke perjuangan nonfisik (politik).

Setelah memasuki abad ke-20, perjuangan kemerdekaan Indonesia lebih banyak melalui pergerakan politik, termasuk di Nusa Tenggara Timur. Seiring dengan pergerakan politik di daerah lain di Indonesia, perjuangan pergerakan Indonesia juga diikuti oleh para pejuang kemerdekaan di Nusa Tenggara Timur. Apalagi salah seorang tokoh pergerakan, Ir. Soekarno (Bung Karno) dibuang ke Ende, Flores, karena gerakan nonkeperatifnya terhadap pemerintah Hindia Belanda.

Ketika Bung Karno ditangkap untuk kedua kalinya pada 1 Agustus 1933 (setelah keluar dari Penjara Sukamiskin di Bandung 31 Desember 1931), Bung Karno tidak diadili, tetapi dibuang ke Ende-Flores, Nusa Tenggara Timur. Di tempat pembuangannya ini Bung Karno didampingi isterinya, Ibu Inggit Garnasih, mertuanya, Ibu Amsih, anak angkatnya, Ratna Juami dan guru dari anak angkatnya, Asmara Hadi. Dalam kesederhaan mereka menempati sebuah rumah yang berukuran 12 x 9 m² di sebuah rumah yang sekarang terletak di Jalan Perwira – Ende.

Pergerakan kemerdekaan di Nusa Tenggara Timur diperlopori oleh para pelajar yang berasal dari Timor. Beberapa organisasi antara lain *Timorsche Verbond* (1922), *Kerapatan Timor Evolutie*, Serikat Timor (1925), Timorshe Jongeren dan Perserikatan Kebangsaan Timor (1937). *Timorsche Verbond* (TV) didirikan atas inisiatif seorang guru asal Timor, D.S. Pella di Makassar pada tahun 1922 dan J.W. Amalo terpilih sebagai ketua pengurus besar yang berkedudukan di Makassar.

Timorsche Verbond kemudian membuka cabang di Nusa Tenggara Timur, antara lain di Kupang, Karuni (ketuanya C. Piry) dan di Sabu (ketuanya S.W. Tanya). Untuk mensosialisasikan program dan gerakannya, pergerakan ini menerbitkan media cetak bernama "Suluh Timor". Pada tahun 1925 *Timorsche Verbond* berhasil mengadakan kongres yang pertama di Makassar. Pergerakan ini pada awalnya bergerak di bidang sosial dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan jasmani dan rohani anggotanya. Seiring perkembangan sosial dan politik di Hindia Belanda, kemudian menjadi pergerakan politik, sehingga dilarang oleh pemerintah Hindia Belanda.

Untuk menyaingi pengaruh *Timorsche Verbond*, pemerintah Hindia Belanda menyokong pembentukan organisasi "*Perkumpulan Timor*" pada tahun 1925 yang dipimpin oleh

C. Frans. Namun, hal ini tidak mempengaruhi perkembangan *Timorsche Verbond*. Pendeta M.H. Pello berusaha melanjutkan kegiatan organisasi ini dengan mengorbankan kedudukannya sebagai Pendeta Protestan dan berhasil mengadakan kongresnya yang ke-2 di kota Kupang, tanggal 18-22 Juni 1932. Hasil kongres ke-2 tersebut tegas menuntut Indonesia Merdeka dari penjajahan Belanda.

Pada tahun 1920-an berdiri organisasi Kerapatan Timor Evolutie yang dipimpin oleh J.W. Toepoe dan Christian Pandie. Akan tetapi, C. Pandie memisahkan diri dan bersama-sama dengan M.B. Mae serta M. Amtiran mendirikan partai baru, "*Serikat Timor*" dengan asas sosialis. M.B. Mae dan M. Amtiran adalah dua orang pejuang asal Aceh yang diasingkan oleh Belanda ke Timor.

Pada tahun 1933 berdiri organisasi pemuda Timor dengan nama "*De Timorsche Jongeren*" di Bandung yang dipelopori oleh para pelajar dan siswa asal Timor yang sedang belajar di Bandung. *De Timorsche Jongeren* dipimpin oleh H. Johanes (mahasiswa *Technische Hoogeschool*) dan dibantu oleh para siswa *Hollands Inlandsche Kweekschool* seperti S.K. Tibuludji, Ch. F. Ndaumanu, I.H. Doko dan J.H.A. Toelle.

Ketika beberapa para tokoh "*De Timorsche Jongeren*" kembali ke Kupang, mereka melanjutkan perjuangannya dengan mendirikan "Perserikan Kebangsaan Timor" (PKT) pada tahun 1937 yang dipimpin oleh I.H. Doko dan Ch. F. Ndaumanu. Organisasi ini berusaha menyatukan kegiatan pergerakan yang telah ada sebelumnya seperti *Timorsche Verbond* dan Perserikatan Timor untuk bersama-sama memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan organisasi lainnya seperti di daerah lain. Salah satu aksi Perserikan Kebangsaan Timor adalah menuntut Indonesia berparlemen dengan mencalonkan A. Karoh (Raja Amarasi yang diturunkan oleh pemerintah Belanda karena menentang penjajahan) sebagai wakil daerah Timor Hindia Belanda.

3. Periode Pendudukan Jepang (1942- 1945)

Penjajahan Belanda berakhir ketika Jepang menyerang Hindia Belanda (Indonesia) dan komando angkatan perang Belanda di Indonesia menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Ketika Belanda menyerah pada Jepang, maka pada saat itu mulailah pendudukan Jepang di Indonesia.

Indonesia dibagi ke dalam tiga wilayah. Bagian Timur wilayah Indonesia, termasuk Nusa Tenggara Timur berada di bawah kekuasaan angkatan laut Jepang (*Kaigun*) yang berkedudukan di Makassar. Kemudian *Kaigun* menyusun pemerintahan pendudukan dikepalai oleh *Minseifu* yang berkedudukan di Makassar. Di bawah *Minseifu* adalah *Minseibu* dimana Nusa Tenggara Timur berada dalam wilayah *Sjoo Sunda Shu* (Sunda Kecil) yang berada di bawah pimpinan *Minseibu Cokan* yang berpusat di Singaraja (Bali).

Selain *Minseibu Cokan*, pemerintah Jepang juga membentuk Dewan Perwakilan Rakyat yang disebut *Syoo Sunda Sukai Yin* yang berpusat di Singaraja. Hampir sama dengan di daerah lain di Indonesia, Jepang bekerja sama dengan para tokoh pergerakan yang nonkooperatif terhadap pemerintah Hindia Belanda, termasuk di Nusa Tenggara Timur. Hal ini bisa dilihat dari beberapa tokoh yang direkrut ke dalam anggota dewan perwakilan rakyat yang berasal dari Nusa Tenggara Timur, seperti raja Amarasi H.A. Koroh dan I.H. Doko. Mereka terkenal sebagai tokoh yang menentang Belanda.

Pemerintahan di daerah-daerah pada masa pendudukan Jepang tidak banyak mengalami perubahan hanya nama atau istilah-istilah saja yang berubah. Berdasarkan *Osamu Seirei* no. 27 tahun 1942 ditetapkan bahwa *shu* (*karesidenan*), sebagai pemerintahan tertinggi. Di bawah *shu* terdapat *ken* (kabupaten atau *afdeling*) dan *si* (kotapraja), sementara di bawah *ken* adalah *gun* (kawedanaan) dan di bawah *gun* ada *son* (kecamatan), yang paling bawah adalah *ku* (desa). Pada tahun 1944 Jepang memperkenalkan *tonarigumi* (rukun tetangga) yang beranggotakan 10 hingga 20 kepala keluarga dengan seorang pemimpin.

Pemerintah Jepang membagi wilayah Nusa Tenggara Timur menjadi tiga *Ken* yakni *Timor Ken*, *Flores Ken* dan *Sumba Ken*. Setiap *Ken* dikepalai oleh *Ken Kanrikan*. Setiap *Ken* dibagi lagi menjadi beberapa *Bunken* atau *gun* yang mirip dengan wilayah *onderafdeling* yang dikepalai oleh *Bunken Karikan*. Setiap *Bunken* membawahi swapraja-swapraja yang dikepalai oleh raja-raja, sedang susunan pemerintahan swapraja sampai ke rakyat tidak mengalami perubahan yang berarti.

Penjajahan Jepang dirasakan lebih berat daripada penjajahan Belanda, rakyat dieksploitasi, baik ekonomi maupun sumber daya manusianya dengan kejam. Kekejaman Jepang menimbulkan kebencian rakyat, sehingga muncul pemberontakan di daerah-daerah pendudukan Jepang di Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Timur. Salah satu pemberontakan rakyat di Nusa Tenggara Timur adalah perlawanan rakyat yang dipimpin oleh Meo Nahale di daerah Belu (Wewiku) pada tahun 1943. Pemerintah Jepang dapat menaklukan pasukan Belu dan Meo Nahale dan para tokohnya dihukum mati di Atapupu.

4. Periode Kemerdekaan RI (1945 – Sekarang)

Pemboman Hiroshima dan Nagasaki pada bulan Agustus 1945, telah memaksa Jepang berhenti berperang dan menyerah tanpa syarat kepada pasukan Sekutu, termasuk bala tentara Jepang di daerah Pendudukan di Indonesia. Pada saat kekosongan kekuasaan inilah para tokoh pergerakan Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Wilayah Republik Indonesia yang baru diproklamasikan meliputi seluruh wilayah bekas pendudukan Pemerintah Hindia Belanda.

Pada tanggal 19 Agustus 1945, Pemerintah Republik Indonesia yang berpusat di Jakarta menetapkan pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 Provinsi yaitu: Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Borneo (Kalimantan), Celebes (Sulawesi), Maluku dan Kepulauan Sunda Kecil, termasuk Nusa Tenggara Timur. Provinsi Kepulauan Sunda Kecil beribukota di Singaraja (Bali) dengan gubernurnya Mr. I. Ketut Pudja yang mulai bertugas sejak tanggal 23 Agustus 1945. Gubernur Sunda

Kecil, Mr. I. Gede Ketut Pudja dihadapkan pada kondisi politik dan keamanan yang tidak menentu. Jepang yang pada waktu itu sudah takluk pada Sekutu masih merasa berkuasa dan masih memiliki kekuatan pasukan yang cukup kuat, sehingga penyusunan administrasi pemerintahan belum berjalan dengan baik.

Sebelum para tokoh pergerakan di Nusa Tenggara Timur membentuk pemerintahan, tentara Sekutu dari Australia di bawah pimpinan Jenderal Sir Thomas Blamey mendarat di Kupang pada tanggal 11 September 1945. Seperti yang terjadi di beberapa daerah lain di Indonesia, kedatangan pasukan Sekutu tersebut diikuti *Netherlands Indies Civil Administration* (NICA) yang ingin menanamkan kembali kekuasaan penjajah Belanda di Indonesia. Tindakan NICA tersebut terbukti ketika Sekutu sedang melucuti pasukan Jepang, NICA pun sibuk menyusun pemerintahan kolonialnya.

Kondisi keamanan di Nusa Tenggara Timur yang semakin tegang tersebut tidak menyusutkan semangat para tokoh pergerakan nasional untuk menghimpun kekuatan rakyat dalam rangka mempertahankan kemerdekaan RI. Beberapa tokoh pergerakan Nusa Tenggara Timur antara lain Raja Amarasi, H.A. Karoh, I.H. Doko dan lain-lain segera melakukan langkah-langkah antisipatif, antara lain dengan menghidupkan kembali Partai Perserikatan Kebangsaan Timor (PPKT). Pembentukan organisasi tersebut merupakan salah satu reaksi perlawanan masyarakat Nusa Tenggara Timur terhadap pendudukan Belanda di Indonesia. Sikap PPKT yang mendukung kemerdekaan Indonesia, akhirnya dilarang Belanda.

Dalam rangka memecah belah kekuatan pendukung NKRI, termasuk di Nusa Tenggara Timur, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Dr. H.J. van Mook kemudian mengadakan Konferensi Malino di Sulawesi Selatan pada tanggal 15-25 Juli 1946. Konferensi ini berhasil memecah belah kekuatan Indonesia dengan keputusan untuk membentuk Negara Indonesia Serikat, yang antara lain terdiri dari Negara Pasundan, Negara Sumatera Timur, dan Negara Indonesia Timur (NIT).

Situasi yang sulit juga dihadapi pemerintah RI di pusat, di satu sisi harus berunding dengan Sekutu, di pihak lain harus menghadapi NICA yang terus melebarkan pengaruhnya untuk

mendirikan kembali pemerintah kolonialnya di wilayah RI. Sementara itu, Perundingan Linggarjati antara Perdana Menteri RI Sutan Syahrir dengan Wakil Belanda Prof. Schermerhon mencapai kesepakatan pada tanggal 15 November 1946. Perjanjian Linggarjati tersebut antara lain, pengakuan kedaulatan RI secara *de facto* di atas wilayah Sumatra, Jawa dan Madura serta RI hanya menjadi salah satu bagian dari Negara Indonesia Serikat (NIS). Pada dasarnya Perjanjian Linggarjati ini berakibat memecah belah bangsa Indonesia dengan mempersempit wilayah RI dan membentuk NIS.

Dalam merealisasikan pembentukan Negara Indonesia Serikat, Belanda mengadakan Konferensi Denpasar pada tanggal 24-28 Desember 1946. Konferensi Denpasar diikuti oleh tokoh-tokoh Indonesia Timur termasuk wakil-wakil dari kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Indonesia Timur sebelum Perang Dunia ke-2. Konferensi Denpasar menghasilkan pembentukan Negara Indonesia Timur yang berpusat di Makassar. Negara Indonesia Timur terdiri dari 13 daerah, antara lain Sulawesi Utara, Minahasa, Kepulauan Sangihe Talaud, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku Selatan, Bali, Lombok, Timor, Flores, Sumbawa dan Sumba.

Pemerintah Negara Indonesia Timur membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di 13 daerah bagiannya, sehingga tugas-tugas para Residen Belanda lambat-laun berkurang. Di Nusa Tenggara Timur, Residen Belanda menyerahkan kekuasaannya kepada Kepala Daerah Timor dan Kepulauannya, H.A. Karoh, pada tanggal 29 September 1949. Dengan demikian, pembentukan Negara Indonesia Timur (sebagai realisasi kesepakatan Linggarjati) telah mengakhiri eksistensi Provinsi Sunda Kecil. Negara Indonesia Timur kemudian bergabung dalam suatu perhimpunan negara-negara bagian Negara Indonesia Serikat atau Majelis Permusyawaratan Federal (*Bijeenkomst Voor Federale Overleg/BFO*) yang diketuai oleh Sultan Hamid II. Pembentukan Negara Indonesia Timur tidak menyurutkan perlawanan rakyat terhadap pemerintah pendudukan Belanda di Indonesia, baik fisik maupun nonfisik, termasuk di wilayah Negara Indonesia Timur sendiri.

Sementara itu perundingan antara Indonesia (RI-BFO) dengan Belanda yang diselenggarakan di Den Haag, Belanda

pada tanggal 23 Agustus–2 November 1949, menghasilkan perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) yang ditandatangani pada tanggal 27 Desember 1949 di Amsterdam. Salah satu hasil dari KMB adalah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Pemerintah Belanda yang dilakukan oleh Ratu Juliana kepada Wakil Republik Indonesia Serikat Mohammad Hatta di Amsterdam, Belanda. Sementara itu, Di Jakarta, pengakuan kedaulatan dilakukan oleh Wakil Tinggi Mahkota Kerajaan Belanda Dr. Lovink kepada Wakil Republik Indonesia Serikat, Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Pengakuan Kedaulatan ini mendapat sambutan gembira dari rakyat Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Timur. Setelah Perdana Menteri Negara Indonesia Timur, Mr. Anak Agung Gde Agung diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Serikat, rakyat dan tokoh pergerakan di Nusa Tenggara Timur semakin bersemangat untuk bergabung kembali dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada tanggal 23 Maret 1950, DPRD Timor mengeluarkan resolusi untuk menggabungkan Timor dan Kepulauannya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian resolusi itu diperkuat dengan rapat tokoh-tokoh Timor yang menginginkan penggabungan Timor dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga bersamaan dengan tuntutan rakyat di daerah lain, Indonesia kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950.

Setelah Negara Indonesia ke NKRI, status wilayah Nusa Tenggara Timur berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1950 (Lembaran Negara 1950 No. 59) daerah Flores, Sumba dan Timor beserta daerah-daerah Sumbawa, Lombok dan Bali merupakan satu daerah Administratif yang disebut Provinsi Sunda Kecil. Pada tahun 1954 diubah lagi dengan keluarnya Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1954 menjadi Provinsi Nusa Tenggara. Nama "Nusa Tenggara" dikemukakan oleh Menteri Pendidikan dan Pengajaran Muhammad Yamin dalam suatu Rapat Pendidikan di Kupang pada tahun 1953.

Pada tanggal 6 Februari 1958, Parlemen RI telah menetapkan Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1954 menjadi Undang-Undang. Setelah berlakunya Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah maka dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Provinsi Nusa Tenggara telah dimekarkan menjadi tiga Daerah Swatantra Tingkat I, yaitu Bali, Nusa Tenggara Barat (Lombok dan Sumbawa) dan Nusa Tenggara Timur (Flores, Sumba dan Timor).

Pada tanggal 12 Desember 1958 berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 (Lembaran Negara No. 115 tahun 1958) secara resmi dibentuk Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dengan Gubernurnya yang pertama J. Lala Mentik. Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari 12 Daerah Tingkat II, yaitu:

1. Kabupaten Kupang dengan ibukota Kupang
2. Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan ibukota Soe
3. Kabupaten Timor Tengah Utara dengan ibukota Kefamenanu
4. Kabupaten Belu dengan ibukota Atambua
5. Kabupaten Alor dengan ibukota Kalabahi
6. Kabupaten Flores Timur dengan ibukota Larantuka
7. Kabupaten Sikka dengan ibukota Maumere
8. Kabupaten Ende dengan ibukota kota Ende
9. Kabupaten Ngada dengan ibukota kota Bajawa
10. Kabupaten Manggarai dengan ibukota Ruteng
11. Kabupaten Sumba Barat dengan ibukota Waikabubak
12. Kabupaten Sumba Timur dengan ibukota Waingapu

Memasuki periode reformasi dan tuntutan otonomi daerah yang lebih luas memunculkan tuntutan pemekaran wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sejak tahun 2000 mulailah wacana pemekaran daerah di beberapa Kabupaten di Nusa Tenggara Timur.

Pembentukan Kabupaten Rote Ndao dengan ibukotanya Ba'a, berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao dan secara resmi telah dikukuhkan pada tanggal 2 Juli 2002.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 Tanggal 25 Februari 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka pada tanggal 17 Juli 2003 Menteri Dalam Negeri meresmikan pembentukan Kabupaten Manggarai Barat, dengan ibukota kabupaten Labuan

Bajo. Dan pada tanggal 18 Oktober 2004 lalu oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur telah dilantik Penjabat Bupati untuk Kabupaten Manggarai Barat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 Tanggal 2 Januari 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 22 Mei 2007 Menko Polkam Ad Interin Menteri Dalam Negeri meresmikan pembentukan Kabupaten Sumba Tengah dengan Ibukota Waibakul sekaligus melantik penjabat bupati untuk Kabupaten Sumba Tengah.

Upaya pembentukan Kabupaten Nagekeo telah tercapai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 Tanggal 2 Januari 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka pada tanggal 22 Mei 2007 Menko Polkam Ad Interin Menteri Dalam Negeri meresmikan Pembentukan Kabupaten Nagekeo Dengan Ibukota Mbay sekaligus melantik penjabat Bupati Untuk Kabupaten Nagekeo.

Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya ditandai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 Tanggal 2 Januari 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka pada tanggal 22 Mei 2007 Menko Polkam Ad Interin Menteri Dalam Negeri meresmikan pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya dengan ibukota Waitabula sekaligus melantik penjabat bupati untuk Kabupaten Sumba Barat Daya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 Tanggal 10 Agustus 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka pada tanggal 23 November 2007 oleh Menko Polkam Ad Interin Menteri Dalam Negeri meresmikan pembentukan Kabupaten Manggarai Timur dengan ibukota Borong sekaligus melantik penjabat bupati untuk Kabupaten Manggarai Timur.

Sampai Agustus 2008, telah terjadi pemekaran wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi 20 Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

1. Kota Kupang dengan dengan ibukota Kupang
2. Kabupaten Kupang dengan ibukota Sulamu
3. Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan ibukota Soe

4. Kabupaten Timor Tengah Utara dengan ibukota Kefamenanu
5. Kabupaten Belu dengan ibukota Atambua
6. Kabupaten Alor dengan ibukota Kalabahi
7. Kabupaten Flores Timur dengan ibukota Larantuka
8. Kabupaten Sikka dengan ibukota Maumere
9. Kabupaten Ende dengan ibukota Ende
10. Kabupaten Ngada dengan ibukota Bajawa
11. Kabupaten Manggarai dengan ibukota Ruteng
12. Kabupaten Manggarai Barat dengan ibukota Labuan Bajo
13. Kabupaten Manggarai Timur dengan ibukota Borong
14. Kabupaten Lembata dengan ibukota Lewoleba
15. Kabupaten Rote Ndao dengan ibukota Ba'a
16. Kabupaten Sumba Barat dengan ibukota Waikakbubak
17. Kabupaten Sumba Timur dengan ibukota Waingapu
18. Kabupaten Sumba Tengah dengan ibukota Waibakul
19. Kabupaten Sumba Barat Daya dengan ibukota Tambolaka
20. Kabupaten Nagakeo dengan ibukota Mbay

Provinsi Nusa Tenggara Timur dari awal berdirinya hingga kini dipimpin oleh beberapa Gubernur dan Wakil Gubernur. Adapun nama-nama Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur sejak kemerdekaan RI, yaitu:

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR PERIODE 1958 – 2013

NO.	NAMA	PERIODE
1.	A.S. Pelo (Pejabat Gubernur)	1958
2.	W.J. Lalamentik	1958 – 1968
3.	Kolonel Infantri El Tari	1968 – 1978
4.	Wang Suwandi, S.H. (Pejabat Gubernur)	April – Juni 1978
5.	Dr. Ben Mboi	1978 – 1988
6.	Dr. H. Fernandez	1988 – 1993
7.	Mayor Jenderal TNI (Purn.) Herman Musakabe	1993 – 1998
8.	Piet Alexander Tallo, SH.	1998 – 2008
9.	Drs. Frans Lebu Raya	2008 – 2013

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR PERIODE 1986-2013

NO.	NAMA	PERIODE
1.	Kolonel Infantri El Tari	1965 – 1966
2.	G. Boeky, SH.	1986 – 1991
3.	S. H. M. Lerick	1991 – 1996
4.	Piet Alexander Tallo, SH.	1996 – 1998
5.	Drs. Johannes Pake Pani	1999 – 2003
6.	Drs. Frans Lebu Raya	2003 – 2008
7.	Ir. Esthon L. Foenay, M.Si.	2008 – 2013

DAFTAR BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN/KOTA DI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2008

	KABUPATEN/ KOTA	NAMA BUPATI/ WALIKOTA		WAKIL BUPATI/ WALIKOTA	
		NAMA	STATUS	NAMA	STATUS
1	Kupang	Drs. Ibrahim A. Medah	Pensiunan PNS	Drs. Ruben Funay	Pensiunan PNS
2	Kota Kupang	Drs. Daniel Adeo	Pensiunan PNS	Drs. Daniel Hurek	Dosen
3	Timor Tengah Selatan	Drs. Daniel A Banunaek	Pensiunan PNS	Drs. Pieter R. Lobo	Purn. TNI AD
4	Timor Tengah Utara	Drs. Gabriel Manek Msi	PNS	Ir. Raymunduz Fernandes	Swasta
5	Belu	Drs. Joachim Lopez	PNS	Drg. Gregorius Mau Bili F. Ddph	Pensiunan PNS
6	Alor	Ir. Ans. Takalapeta	PNS	Drs. Abraham Maulaka	PNS
7	Flores Timur	Drs. Simon Hayon	Swasta	Simon Lagadoni Herin S.Sos	Swasta
8	Sikka	Drs. Alex Longginus	Swasta	Drs. Yoseph Ansar Rera	PNS
9	Ende	Drs. Paulinus Domi	Pensiunan PNS	Bernadus Gado Bani Ba	Swasta

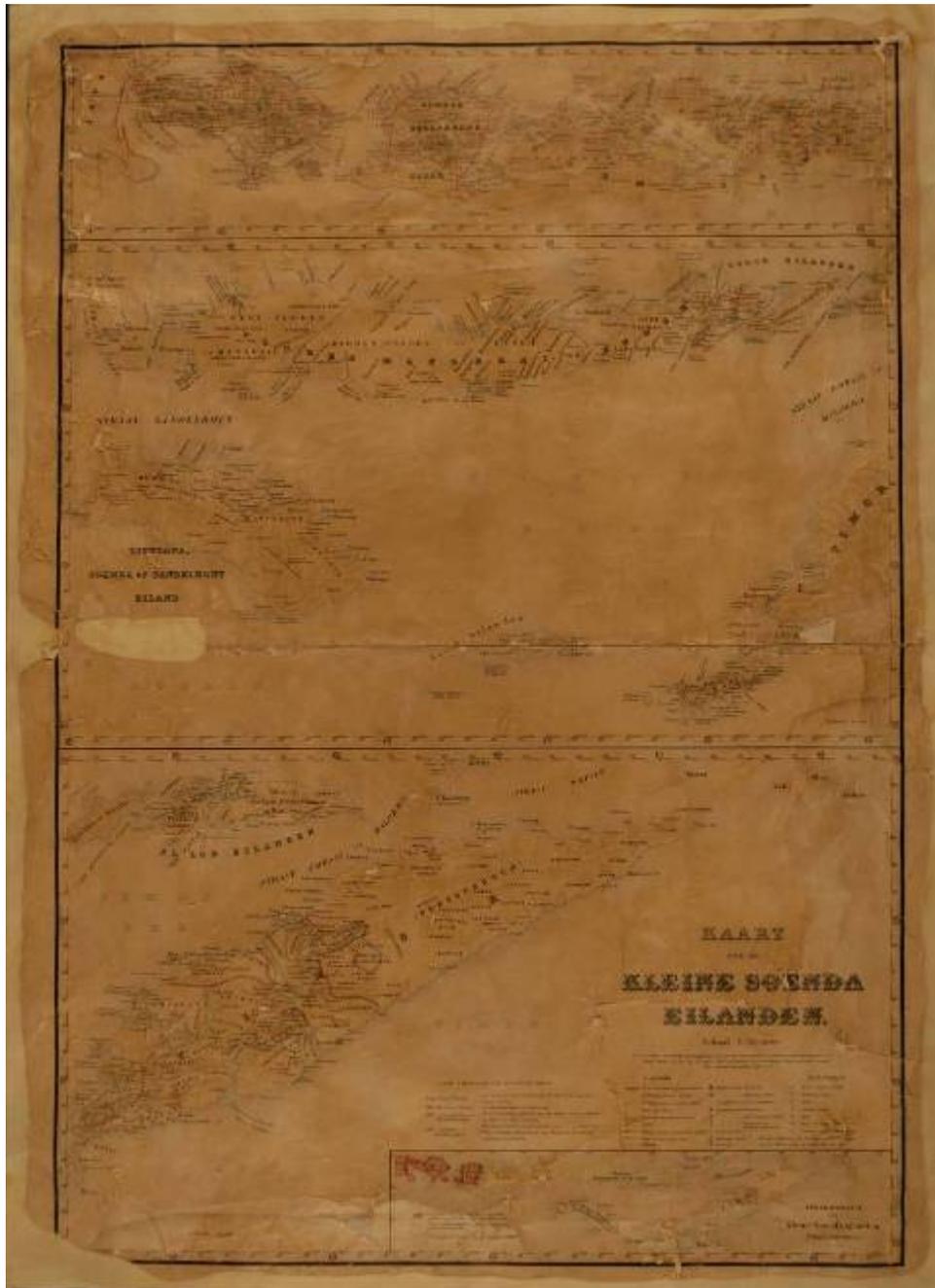
KABUPATEN/ KOTA	NAMA BUPATI/ WALIKOTA		WAKIL BUPATI/ WALIKOTA	
	NAMA	STATUS	NAMA	STATUS
10 Ngada	Drs. Piet Jos Nuwa Wea	Pensiunan PNS	Ir Nikolaus Dopo Ngoe St.Mm	PNS
11 Manggarai	Drs. Christian Rotok	PNS	Dr. Deno Kamelus SH.M.Hum	-
12 Manggarai Barat	Drs Fidelis Pranda	PNS	Drs. Agus Ch. Dula	PNS
13 Sumba Barat	Drs. Julianus Pote Leba Msi	PNS	Dr. Kornelius Kodi Mete	PNS
14 Sumba Timur	Ir. Umbu Mehang Kundu	Pensiunan PNS	Drs Gideon Mbillidjora Msi	PNS
15 Rote Ndao	Christian N Dillak Sh	PNS	Bernard E. Pelle SIP	Swasta
16 Lembata	Drs. Anderas Duli Manuk	Pensiunan PNS	Drs. Andreas Nula Liliweri	PNS
17 Nagekeo	Drs. Elias Djo	PNS	Plt Kab. Baru	
18 Sumba Tengah	Drs. Umbu Saga Anakaka	PNS	Plt Kab. Baru	
19 Sumba Barat Daya	Drs. Emanuel Babu Eha	PNS	Plt Kab. Baru	
20 Manggarai Timur	Drs. Frans B. Paju Leok	PNS	Plt Kab. Baru	

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhana, I Ketut., 2005. *Penataan Nusa Tenggara Pada Masa Kolonial 1915–1950*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, 1992. *Profil Propinsi Republik Indonesia – Nusa Tenggara Timur*. Jakarta: Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara.
- Doko, L.H. 1981. *Perjuangan Kemerdekaan Indonesia di Nusa Tenggara Timur*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Marsono. 2005. *Sejarah Pemerintahan Dalam Negeri*. Jakarta: CV. Eka Jaya.
- Resink, G.J. 1987. *Raja dan Kerajaan yang Merdeka di Indonesia 1850-1910*. Tim terjemahan KITLV-LIPI. Jakarta: Djambatan.
- Soejito, Irawan. 1976. *Sejarah Pemeritahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.-

CITRA NUSA TENGGARA TIMUR DALAM ARSIP

Geografi



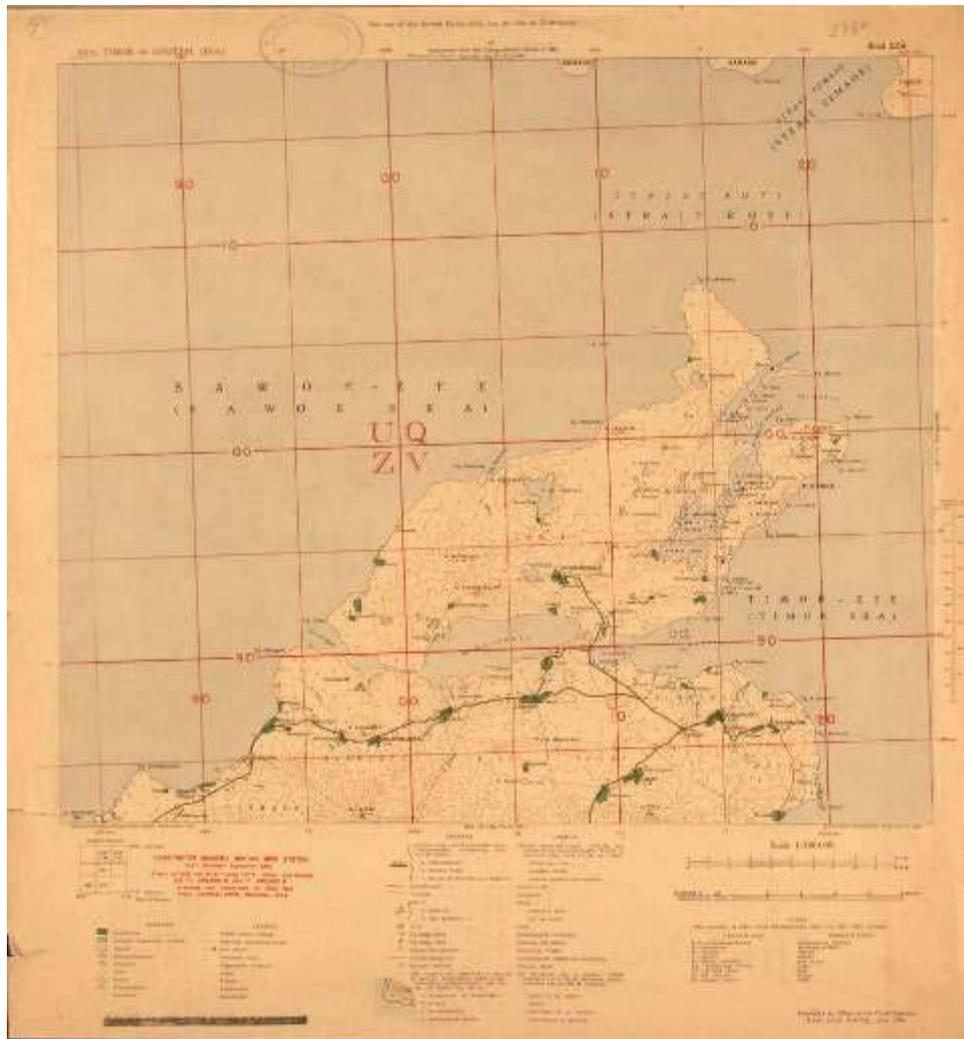
Peta *Kleine Soenda Eilanden*
(sekarang termasuk Nusa Tenggara Timur)
1860

Sumber: ANRI, Dinas Topografi No.13



Peta Pulau Alor,
1942

Sumber: ANRI, Dinas Topografi No. 2778



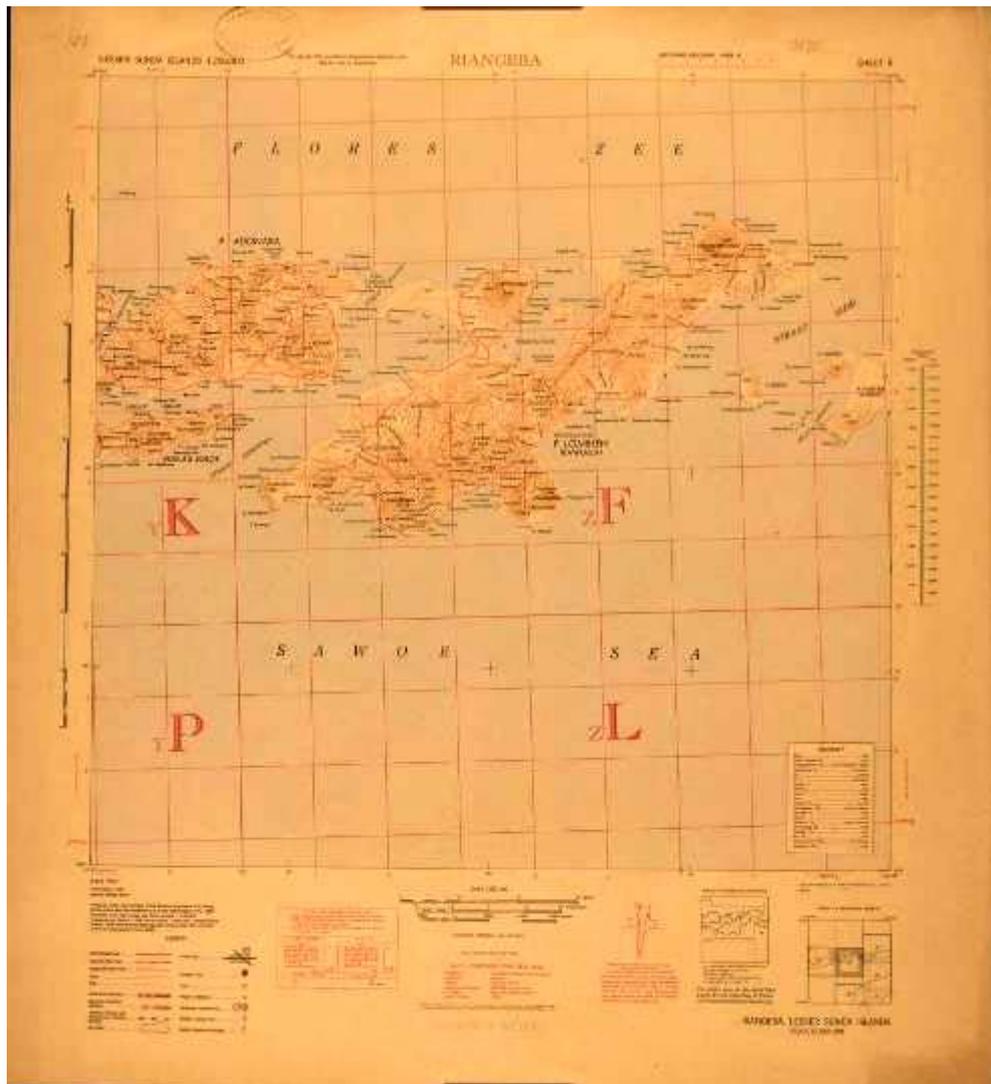
Peta Pulau Rote,
1942

Sumber: ANRI, Dinas Topografi No. 2790



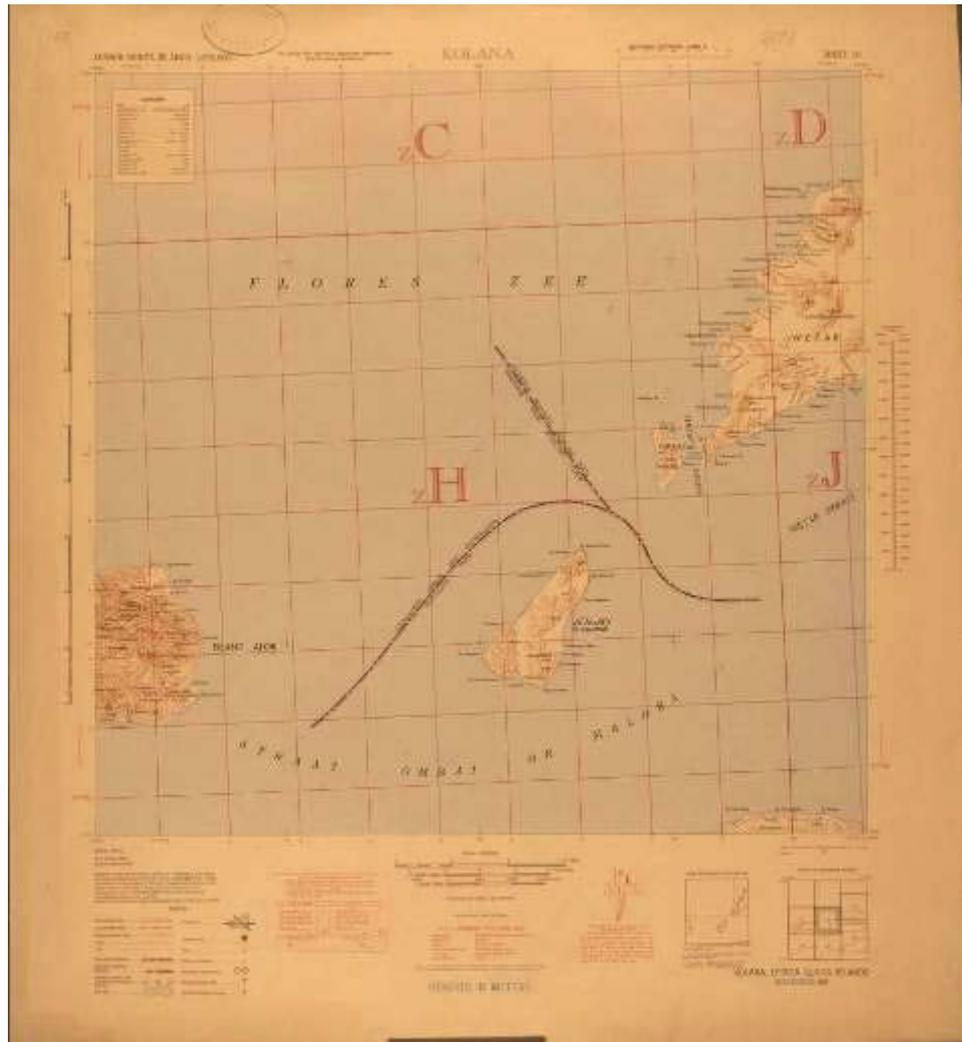
Peta Pulau Flores,
1943

Sumber: ANRI, Dinas Topografi No. 2692



Peta pulau Solor, Pulau Adonara,
Pulau Lomblen dan sekitarnya,
1943

Sumber: ANRI, Dinas Topografi No.2695



Peta Pulau Alor berbatasan dengan Provinsi Maluku
1943

Sumber: ANRI, Dinas Topografi No.2697



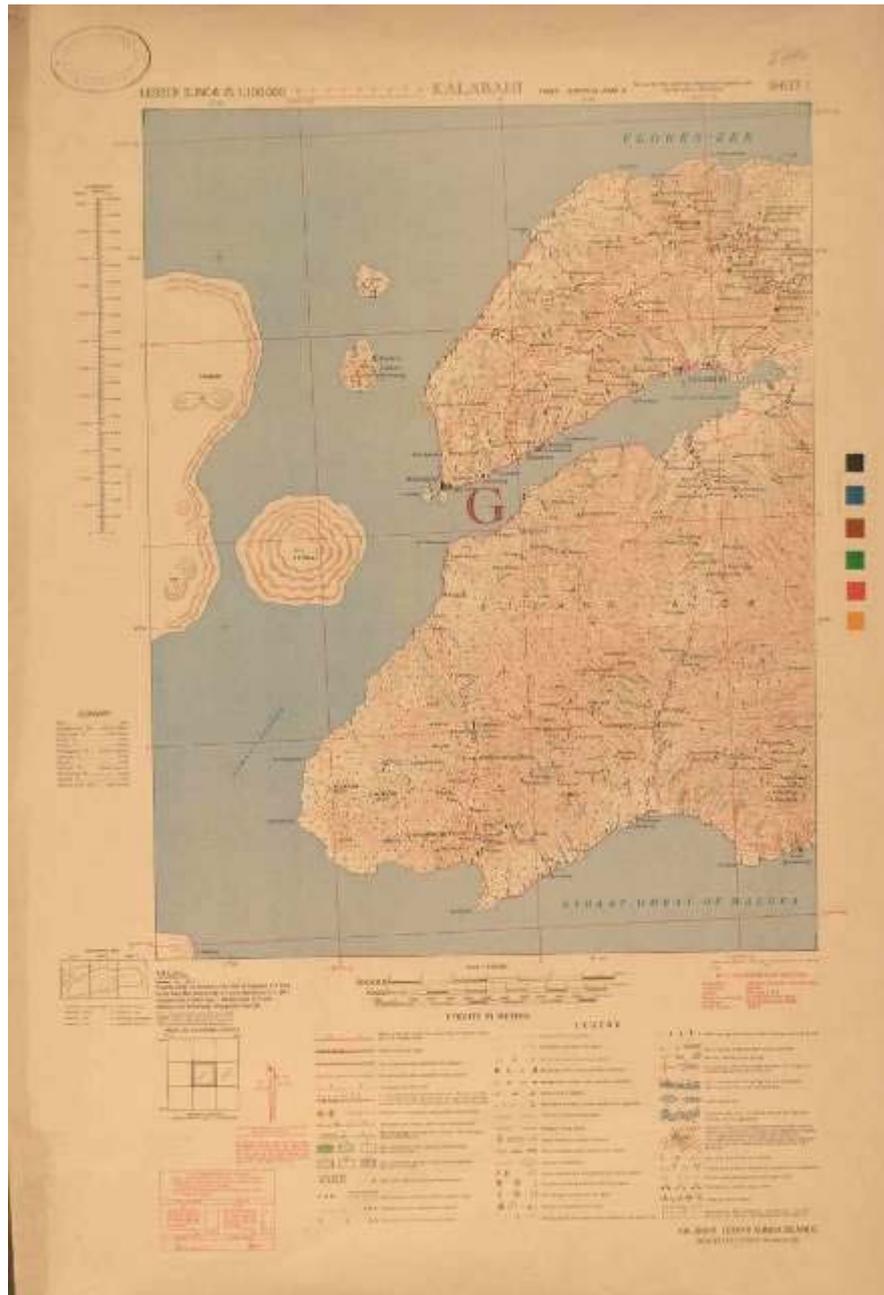
Peta Pulau Sumba
1943

Sumber: ANRI, Dinas Topografi No. 2700

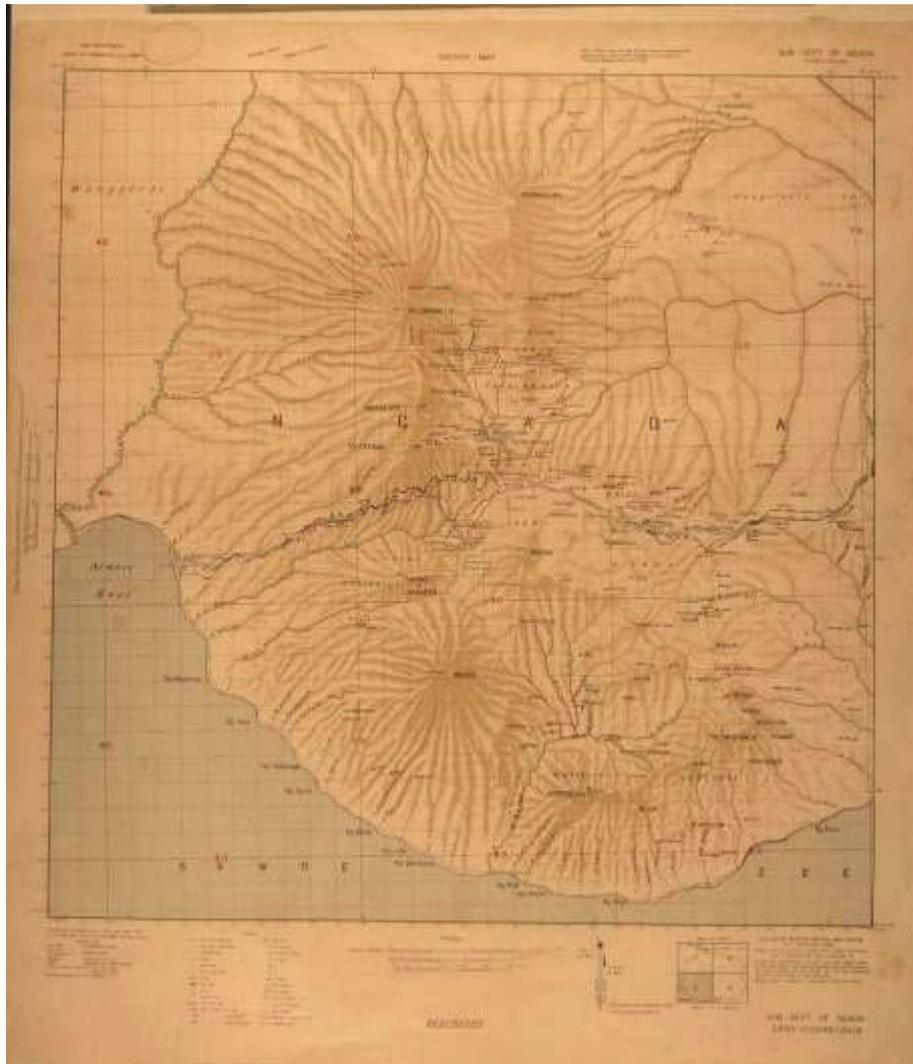


Peta Pulau Rote
1943

Sumber: ANRI, Dinas Topografi No. 2707

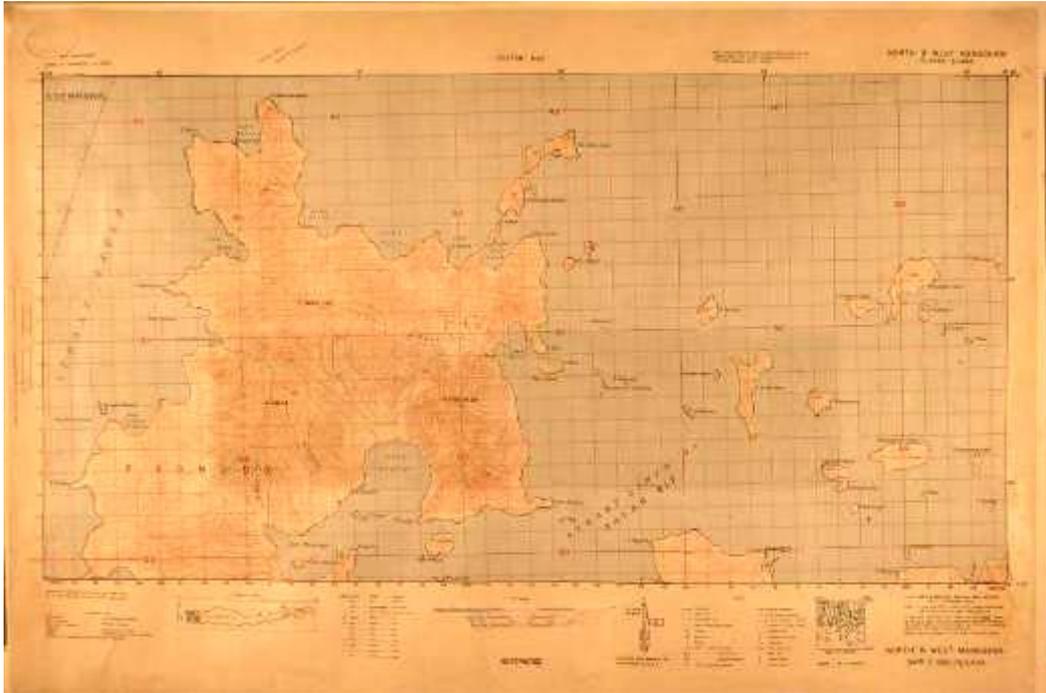


Peta Pulau Alor dan sekitarnya,
1943
Sumber: ANRI, Dinas Topografi No. 2780



Peta Kabupaten Ngada,
1943

Sumber: ANRI, Dinas Topografi No.2773



Peta Pulau Komodo dan sekitarnya,
1943

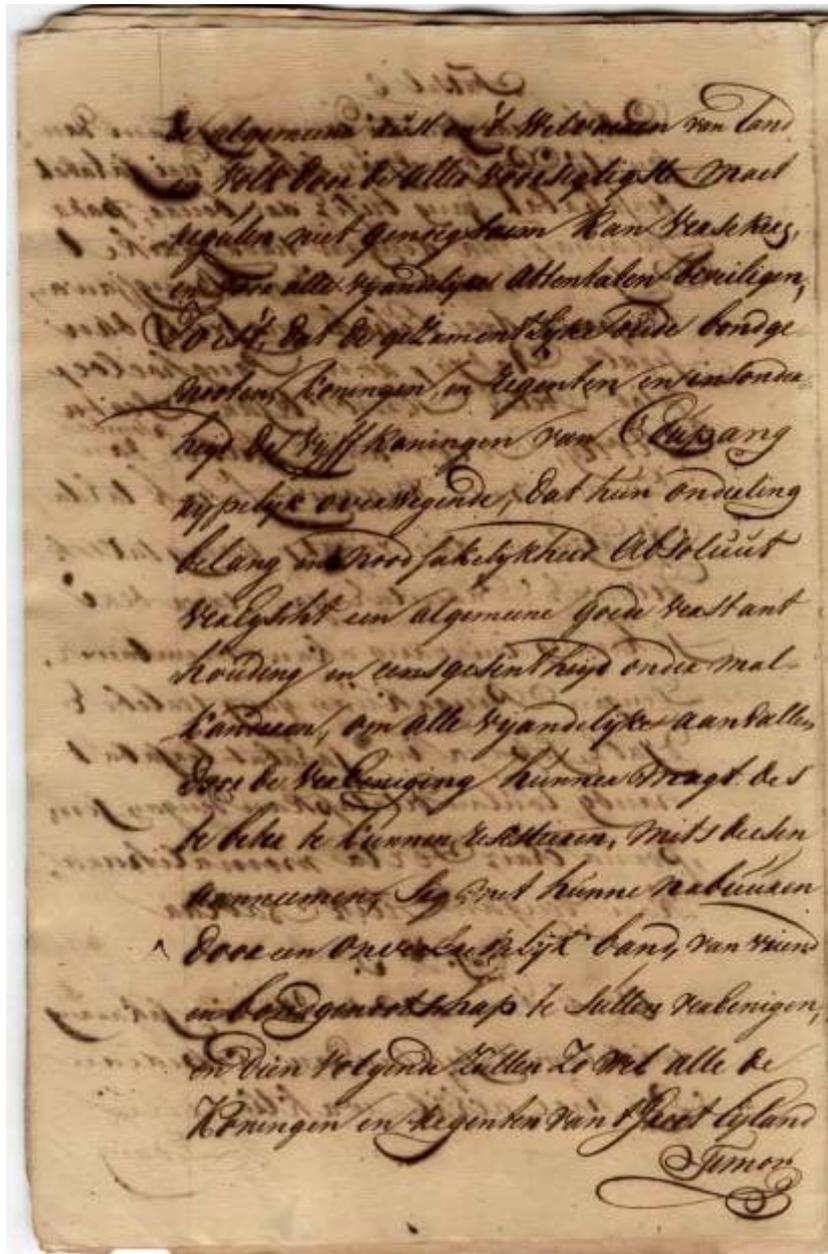
Sumber: ANRI, Dinas Topografi No.2775



Peta Provinsi Nusa Tenggara Timur,
2006

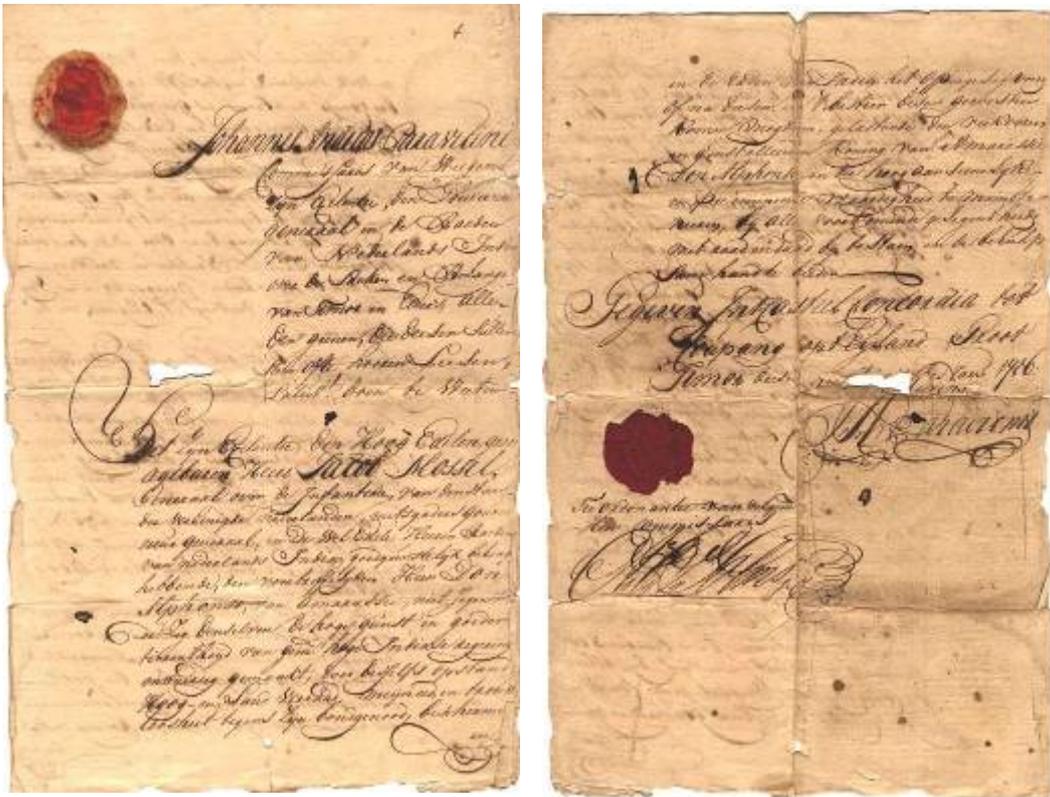
Sumber: Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional

Politik dan Pemerintahan



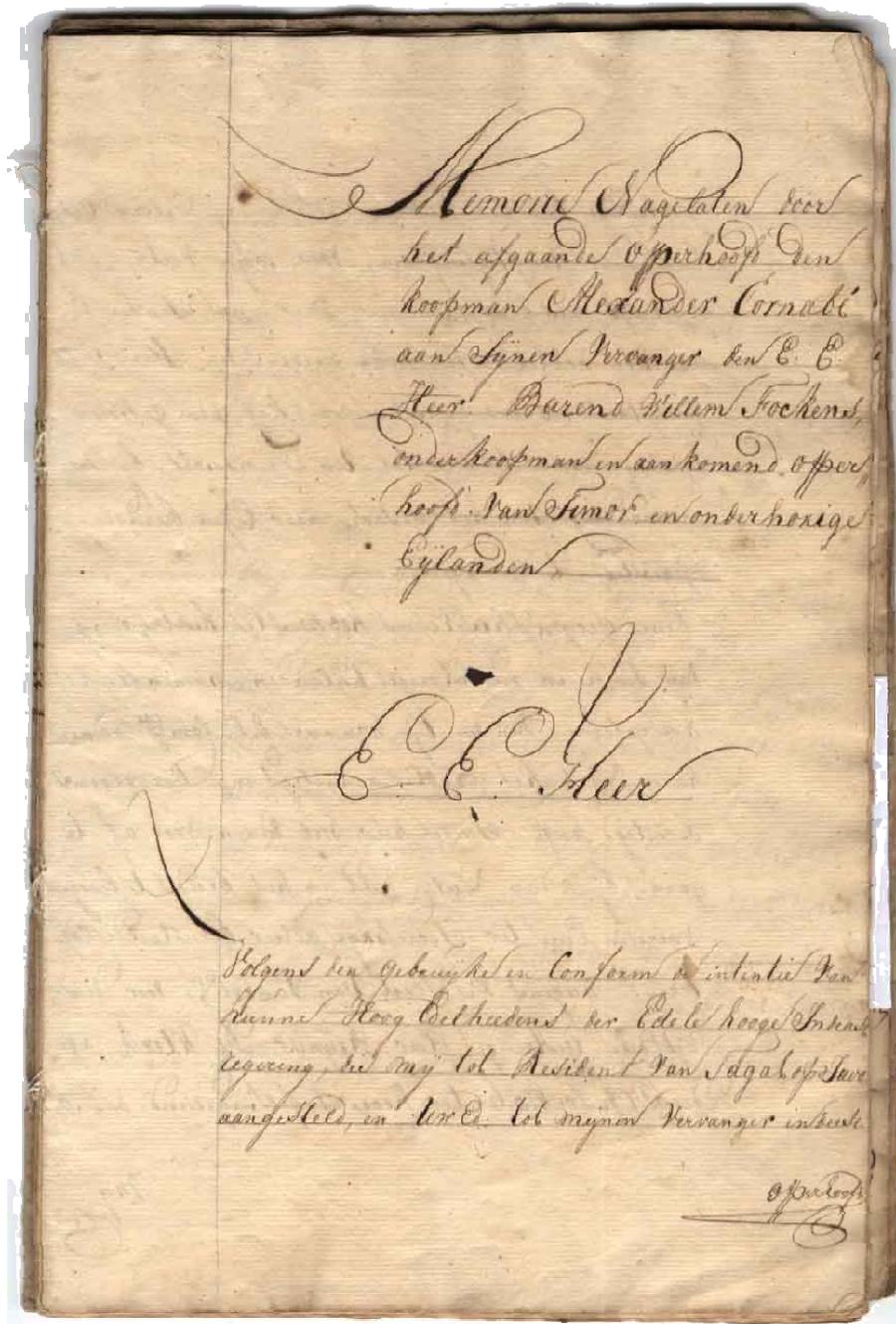
Bagian awal dari Kontrak politik antara Raja-raja Timor, Rotty (Rote), Solor, Savo (Sawu), dan Sumba dengan VOC, 9 Juni 1756.

Sumber: ANRI, Timor 29



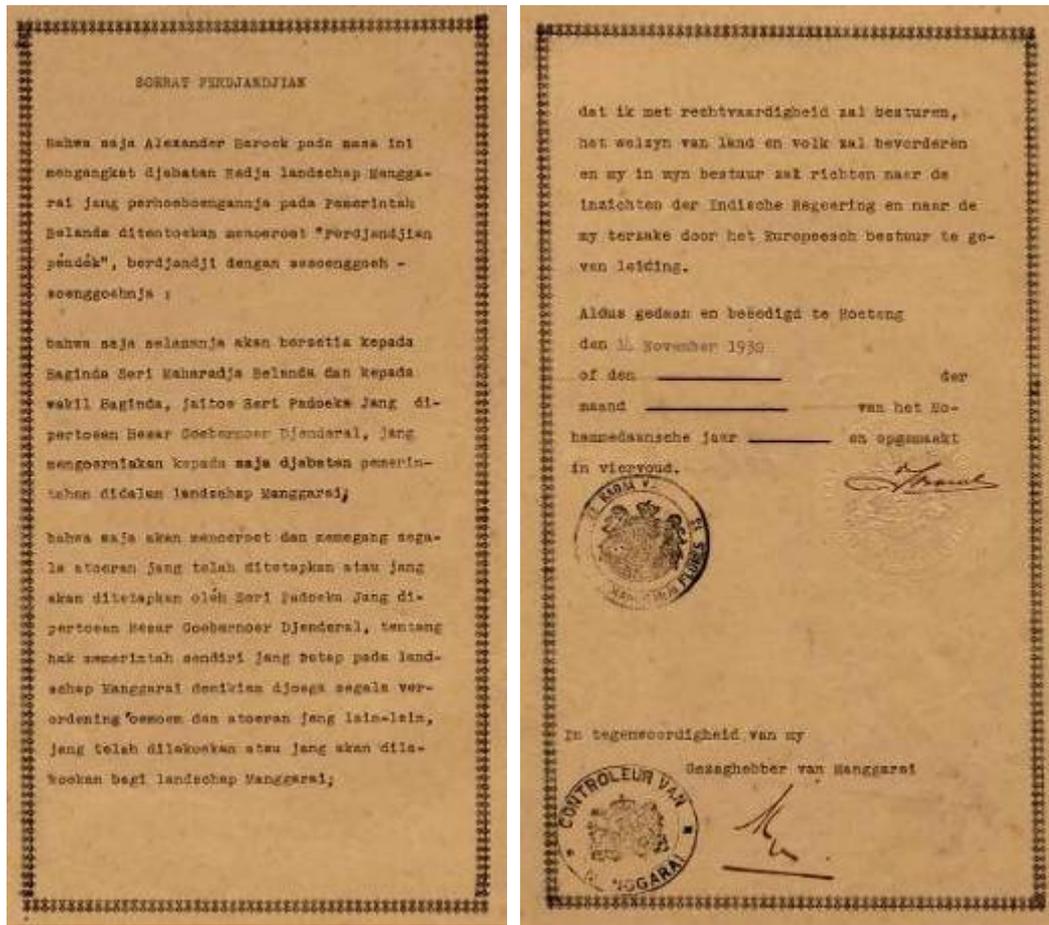
Kontrak politik antara Raja Amarassie dengan VOC,
1756.

Sumber: ANRI, Timor 32



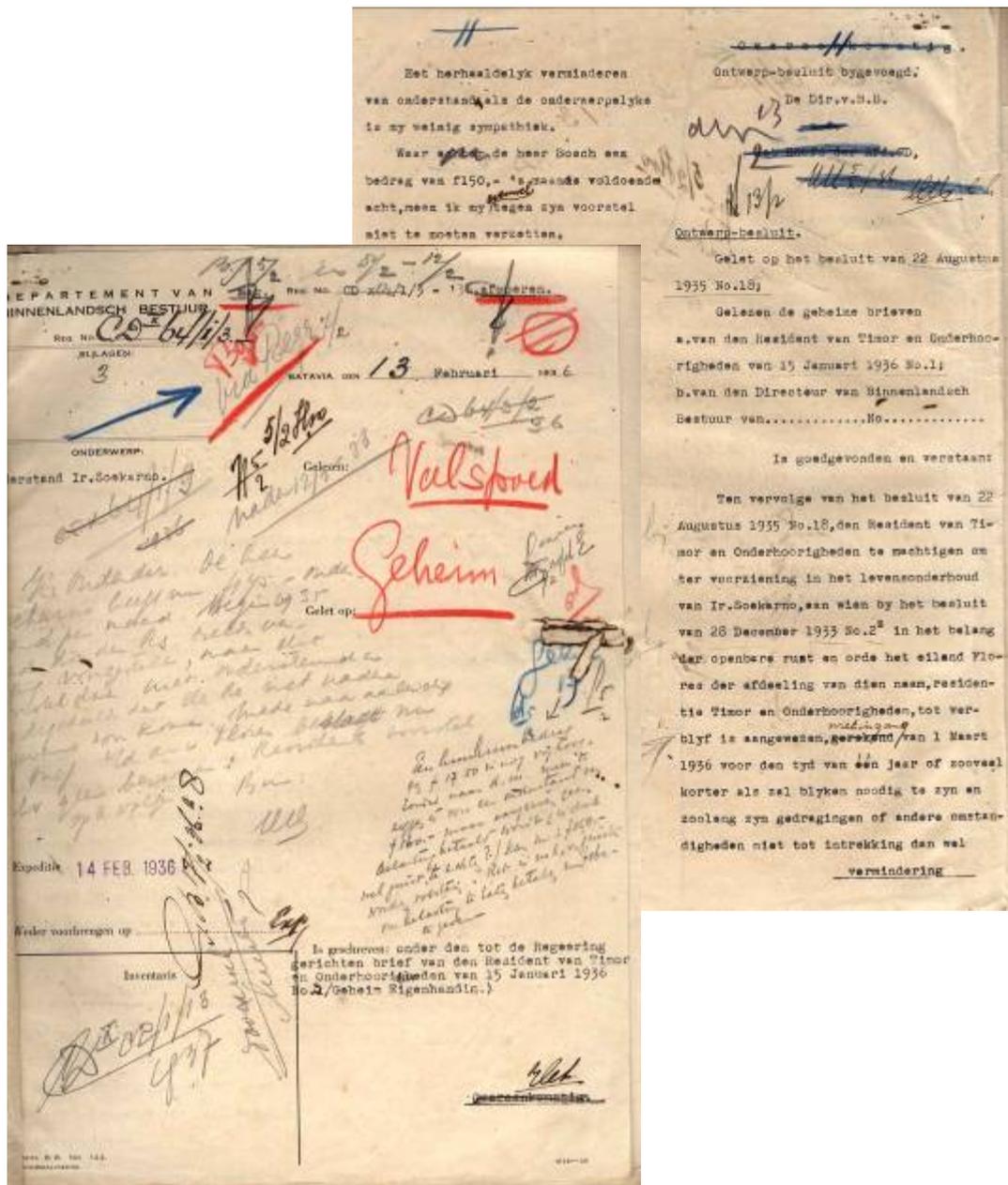
Bagian awal dari Memori serah jabatan Karesidenan Timor dari Alexander Cornabe kepada Sjinen Vervanger, 1771.

Sumber: ANRI, Timor 2



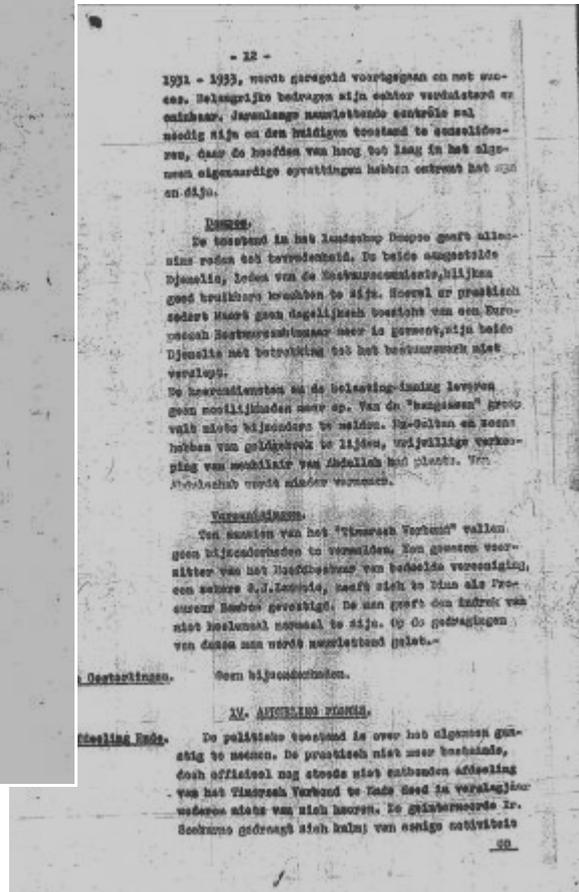
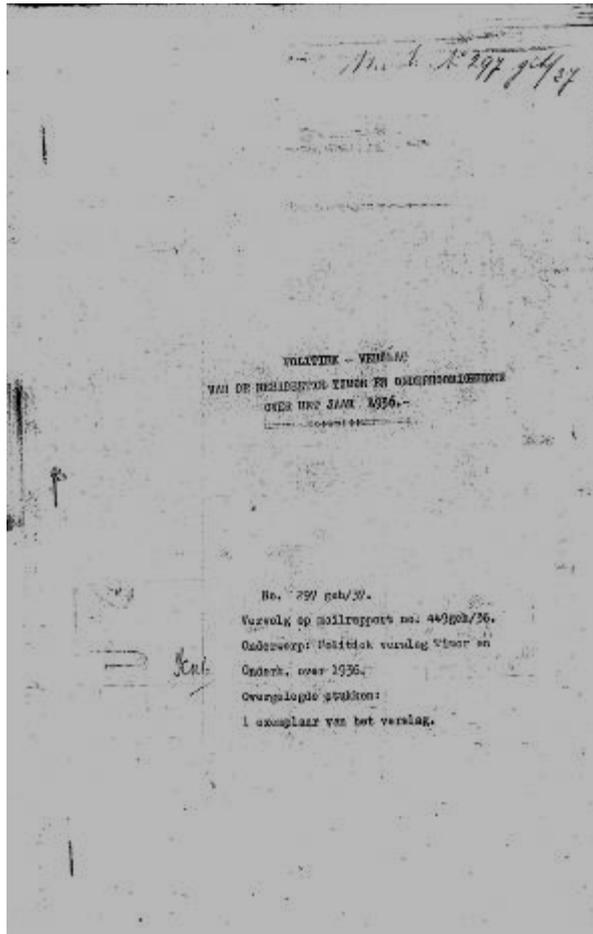
Perjanjian Alexander Baroek ketika diangkat sebagai Raja Manggarai yang akan berlaku adil dalam pemerintahan serta memajukan kesejahteraan wilayah Manggarai, Nusa Tenggara Timur
14 November 1930.

Sumber: ANRI, Kontrak 228



Rancangan Keputusan Direktur *Binnenlandsch Bestuur* tentang pengasingan Ir. Soekarno ke Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur 13 Februari 1936.

Sumber: ANRI, Binnenlandsch Bestuur



Fragmen Laporan Politik Karesidenan Timor tahun 1936 antara lain mengenai Ir. Soekarno yang berkelakuan baik selama pengasingannya di Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur 1937.

Sumber: ANRI, Politik Verslag Reel 10 jilid 4e

berikah hasil bebodan anak amodora raja Kolo Banoenak
 pengganti raja Radja dari keradjaan Amanatun.

Verrijd Gedeon borwat dari am. keradjan,
 Radja dari keradjaan Amanatun

2010 (8) Ende 1948

Van de legation van het Koninkrijk
 van de Nederlanden, Radja Amanatun,
 A.O.S.C. 2. m.T.

2010
 18-9-48
 B10

Ende, 1 September 1948.

kehadjaran
 dari Padoeka Joesan Jang Koeliman
 Seri Padoeka Joesan Jang Koeliman
 van de Kroon

85
 Batavia - Jember

Pakel:
 Minta selamatkan
 djabatan selakoe Radja
 keradjaan Amanatun.

Sawa jang berijrah-lijrah beradjan, de-
 tegulak raja Kolo Banoenak, Radja Amanatun, beraja memperabadkan
 perwoban keradjaan dadi dari Padoeka Joesan Jang Koeliman, sekahat
 jang tertora dibawa ini.

Maka raja jang bertanda tangan di bawa ini Kolo
 Banoenak serta memberi ikrar dalam soerat ikrar 0 104/2-25-16 jang mana
 raja (Kolo Banoenak) akan tetep setia kepada pemerintah Hindia Belanda.
 Maka pada tanggal 24 Februari tahun 1925 raja,
 Kolo Banoenak, tertah beriji dari Seri Padoeka Joesan Jang Koeliman
 djabatan Radja dari keradjaan Amanatun.

Sawa jang bertanda tangan di bawa ini telah la-
 ma dalam menjalankan djabatan selakoe Radja dan berhadapan dengan soe-
 dah tua, kira-kira 55 (lima puluh lima tahun) omur raja selakoe
 tiada tjoemp tomak lagi akan menjalankan pekerjaan raja, sebab
 lagi dalam beberapa 0 hari ini kesehatan raja terganggu seingga tiada
 raja, Kolo Banoenak, dapat mengemipi toentotan peradjaan raja sehingga
 selamatnya lalai dalam hal menjalankan kewajiban raja selakoe Radja
 dalam keradjaan tersebut.

Maka raja jang bertanda tangan di bawa ini tiada
 sanggupi anak laki-laki jang akan mengganti raja, melainkan anak
 dara raja (Kolo Banoenak) jang bernama Lodewik Laurens dan Louys Padoe-
 nak berumur kira-kira 24 (dua puluh empat) tahun jang akan raja
 menggahi ia Lodewik Laurens dan Louys selakoe anak raja. Oleh karena ia
 berlat dari ketji hingga besar dalam tangan raja.

Maka aloe raja jang bertanda tangan di bawa ini
 Kolo Banoenak beradjan beradjarat dari Padoeka Joesan Jang Koeliman
 agar selakoe anak amodora raja (Kolo Banoenak) pengganti raja selakoe
 Radja dalam keradjaan Amanatun.

Maka sekahat pado Padoek berarta kepala (Pa-
 noelteng) dan segala orang tua-tua dalam keradjaan Amanatun berarta-
 toedjoe sawa Kolo Banoenak pengganti raja dari raja Kolo Banoenak
 Radja dari keradjaan Amanatun.

Maka jang bertanda tangan di bawa ini beradjan
 dengan penuh pegeh arapan anak Seri Padoeka Joesan Jang Koeliman ber-
 beri toedjangan bebodan jang beradjan.

Maka berarta jang beradjan serta bertanda tangan
 di bawa ini memperwadarkan perwadaran dilina dadi Seri Padoeka Joesan
 Koeliman jang perwadaran sawala raja, Kolo Banoenak, dapat selat-
 kan djabatan raja selakoe Radja dari keradjaan Amanatun pada tanggal
 1 (satu) Januari tahun 1949 dan mendapat toedjangan dari Seri Padoe-
 ka Joesan Jang Koeliman.

Maka selakoe keradjaan kehadjaran dadi Seri
 Padoeka Joesan Jang Koeliman

berhadjaran

Surat pengunduran diri Kolo Banoenak
 sebagai Raja Amanatun, Nusa Tenggara Timur,
 1 September 1948,
 Sumber: ANRI, Algemeene Secretarie 601



Presiden Soekarno tiba di Kupang dalam rangka kunjungan kerja di Nusa Tenggara Timur, 30 Oktober 1950.

Sumber: ANRI, Kempen 502146



Presiden Soekarno disambut Kepala Daerah Kupang setibanya di Lapangan Terbang Kupang, Nusa Tenggara Timur, 30 Oktober 1950.

Sumber: ANRI, Kempen 502181



Presiden Soekarno bersama Kepala Daerah Flores,
Josef Thomas Ximenes da Silva beramah tamah
di Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur,
30 Oktober 1950.

Sumber: ANRI, Kempen 503098



Presiden Soekarno berdiri dekat pohon yang ditanamnya ketika diasingkan di Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur, 30 Oktober 1950.

Sumber: ANRI, Kempen 503096



Rapat umum di Ende, masyarakat membawa spanduk yang berisi tentang permintaan dokter Belanda ditarik dari Flores dan mendatangkan dokter Indonesia, 30 Oktober 1950.

Sumber: ANRI, Kempen 503100



Mr. Susanto Tirtoprodjo, Gubernur Sunda Kecil, memberikan pidato dalam rapat umum di Maumere, Nusa Tenggara Timur 30 Oktober 1950.

Sumber: ANRI, Kempen 503122



Raja-Raja di wilayah Nusa Tenggara Timur menyambut Wakil Presiden Mohammad Hatta dalam kunjungan kerjanya di Lewakambera, Sumba, Nusa Tenggara Timur.
25 April 1952.

Sumber: ANRI, Kempen 520425 NN 41



Wakil Presiden Mohammad Hatta memberikan sambutan
di depan masyarakat Timor, Nusa Tenggara Timur,
25 April 1952.

Sumber: ANRI, Kempen 520425 NN 115



Wakil Presiden Mohammad Hatta dengan Raja Sumba,
dalam rangka kunjungan kerja Wakil Presiden ke Sumba,
Nusa Tenggara Timur
25 April 1952.

Sumber: ANRI, Kempen 520425 NN 225



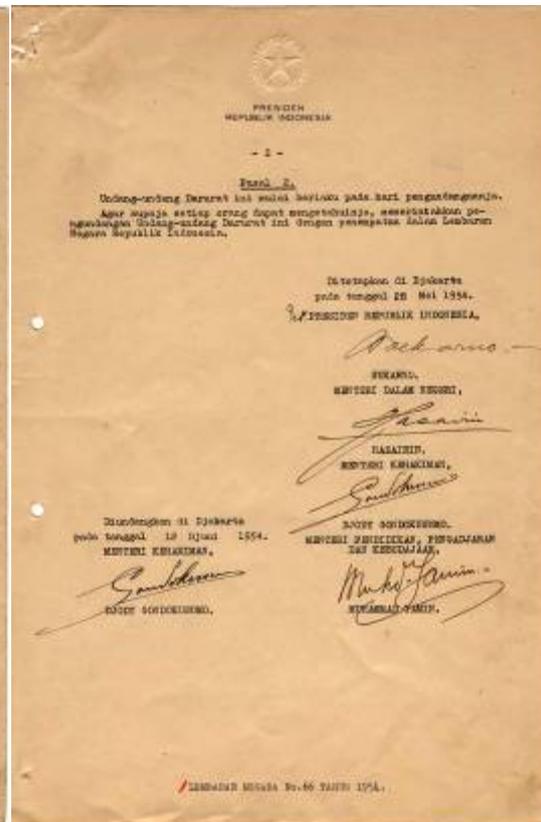
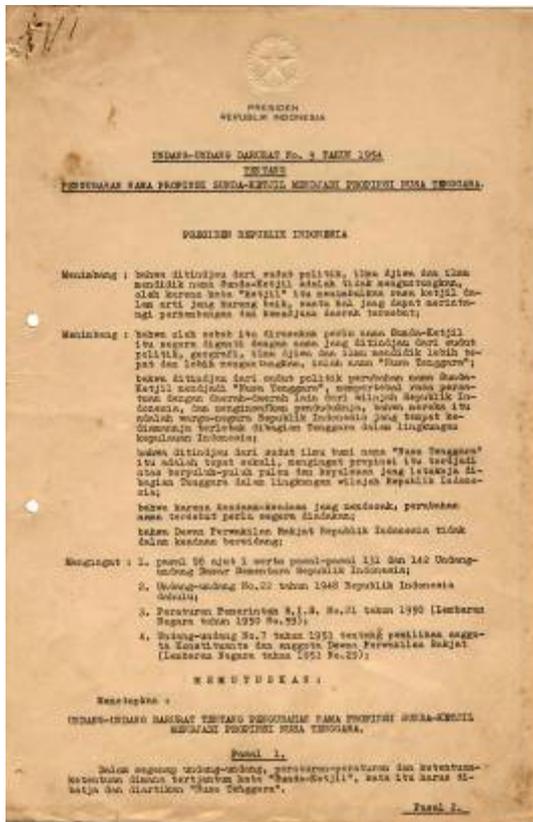
Wakil Presiden Mohammad Hatta bersama anggota
Pemerintahan Daerah di Waingapu, Sumba,
Nusa Tenggara Timur
25 April 1952.

Sumber: ANRI, Kempen 520425 NN 192



Wakil Kepala Daerah J.W Amole sedang memeriksa barisan perwira dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-7 di Kupang, Nusa Tenggara Timur 17 Agustus 1952.

Sumber: ANRI, Kempen T.175-21-13



Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1954 tentang Pengubahan Nama Provinsi Sunda Kecil menjadi Provinsi Nusa Tenggara, 1954.
Sumber: ANRI, Sekretaris Kabinet Undang-Undang Darurat No.103



Rapat Raksasa di Atambua, masyarakat membawa spanduk bertuliskan "Perdamaian Nasional Hanya oleh Pancasila",
13 Mei 1954.

Sumber: ANRI, Kempen K 540513 UU 1-10



Presiden Soekarno bersama Gubernur Sunda Kecil,
Sarimin Reksodiharjo menuju ke pelabuhan Ende,
16 Mei 1954.

Sumber: ANRI, Kempen 540516 NN 11



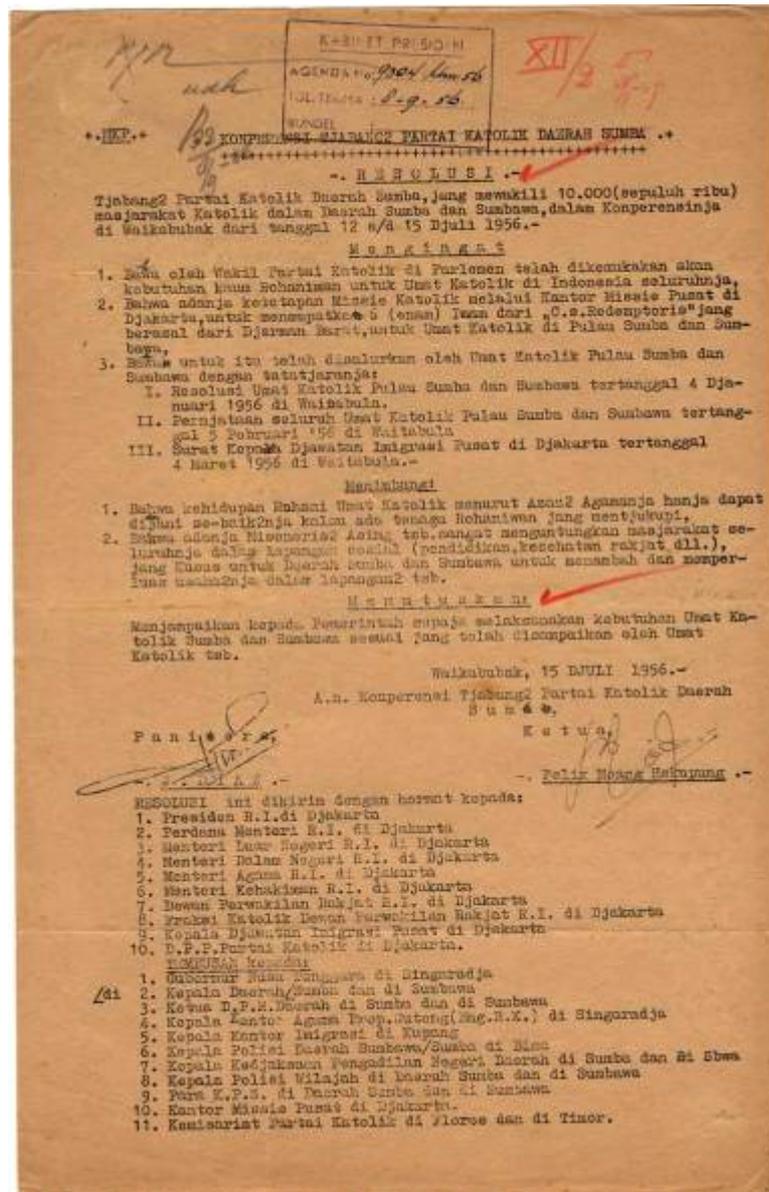
Suasana dalam Sidang Kongres Anggota Panitia Pemilihan Umum Daerah Nusa Tenggara, Rustam Sutan Palindih sedang memberi arahan,
11 Oktober 1954.

Sumber: ANRI, Kempen 541011 UU 1



Kantor Panitia pemungutan suara
Kecamatan Bubaen di Timor, Nusa Tenggara Timur
[±1955]

Sumber: ANRI, Kempoen 541013 UU 1-1



Konferensi cabang-cabang Partai Katolik Daerah:
Resolusi Partai Katolik di daerah Sumba tentang kebutuhan tenaga kerja rohani dan rohaniawan Katolik di Sumba dan Sumbawa, Nusa Tenggara Timur
15 Juli 1956.

Sumber: ANRI, Kabinet Presiden 193



Presiden Soekarno menerima persembahan dua ekor burung kakaktua berwarna merah dan putih dari rakyat Waingapu, Nusa Tenggara Timur
4 November 1957.

Sumber: ANRI, Kempen 571104 NN 11

GERAKAN FLORES MUDA.

No.: I/923/59
Hal: Pemberitahuan.
Lam: -.-

Djakarta, 23 Februari 1959

PEMBERITAHUAN.

Berdasarkan pertemuan yang telah diadakan pada tanggal 22 Februari 1959, bertempat di rumah Drs. Frans Seda, Kebajoran Baru, dihadiri oleh lebih-kurang 15 orang, dibawah pimpinan pengambil inisiatif sdr. CAKIS PARERA, Sdr. HENDRIKUS MBAGGO dan sdr. STEPHAN TROMBINE, telah diambil keputusan sbg:

1. Membentuk sebuah panitia peringatan 25 tahun pemuangan Bung Karno ke Flores, bernama Gerakan Flores Muda, sebagai kelanjutan dari Pemuda Pelajar Ende, Mei 1953.
2. Memberikan dasar kepada perajaan memperingati 25 tahun pemuangan Bung Karno ke Flores, j.i. sebagai suatu lambang dari Indonesia yang berjuang, Indonesia yang berontak, Indonesia yang merang.
3. Menitik beratkan perajaan pada tujuannya ialah:
 - a. Chidmad menghangatkan akan peristiwa pemuangan Bung Karno sebagai suatu momentum kemenangan.
 - b. Memperoleh keuangan guna melengkapi Museum di Ende.
4. Telah berhasil membentuk sebuah panitia harian sb.

Ketua :	Sdr. Cakis Parera
Wk. Ket. I :	" Sjarif Zen
" " II :	" Paul Lali Wea
Secret. I :	" Piet Matutina
" " II :	" J. Dan Parera
Bandaha. I :	" Thomas Tho
" " II :	" Hendrikus Mbaggo
" " III :	" Stephan Trombine

5. Akan berusaha menghubungi semua peruka? Flores untuk, memperoleh sekongan moral guna pelaksanaan perajaan tersebut.-
6. S.l. local.-

K. tua :

Cakis Parera
(Cakis Parera)

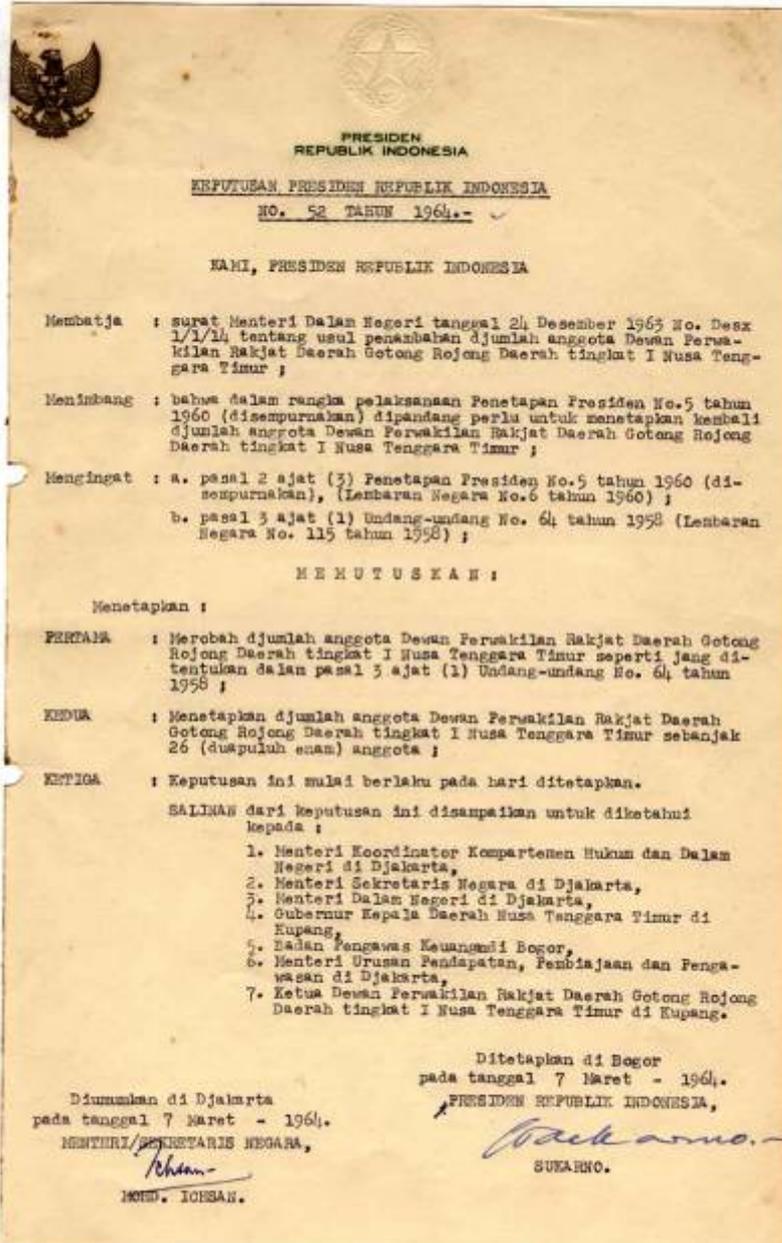


Secretaris :

Piet Matutina
(Piet Matutina)

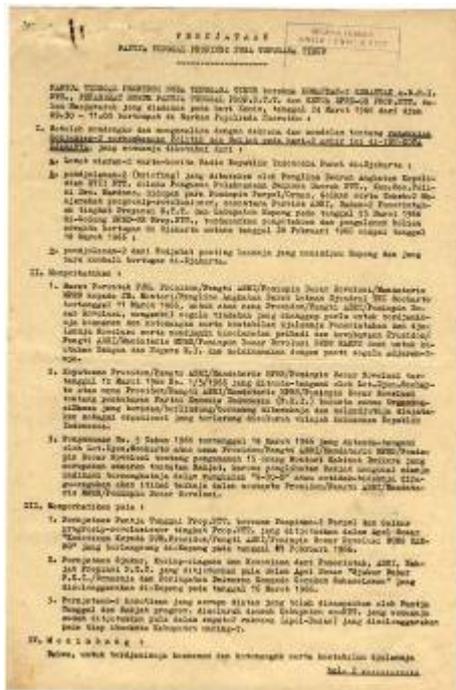
Pemberitahuan tentang rapat pertemuan Gerakan Flores Muda untuk membentuk Panitia Peringatan 25 tahun Pemuangan Bung Karno ke Flores, Nusa Tenggara Timur 23 Februari 1959.

Sumber: ANRI, M.Yamin No.706



Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1964 tentang Perubahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Provinsi Nusa Tenggara Timur, 7 Maret 1964.

Sumber: ANRI, Sekretariat Kabinet 568



Pernyataan Musyawarah Pantja Tunggal Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang dukungan terhadap pengamanan lima belas orang Menteri Kabinet Dwikora, 24 Maret 1966.

Sumber: ANRI, Departemen Angkatan Laut 47



SEKRETARIAT NEGARA RI.
INSPEKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN
BINA - GRAHA
JL. VETERAN NO. 14 JAKARTA

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA
INSPEKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN
DI WILAYAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DARI TANGGAL 24 SAMPAI DENGAN 28 MARET 1986

I. PENDAHULUAN.

Pada tanggal 24 sampai dengan 28 Maret 1986, kami bersama Saudara Kardono telah melakukan kunjungan kerja di wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur, guna mendapatkan informasi secara langsung mengenai perkembangan pelaksanaan penggunaan dana Inpres Bantuan Pembangunan beserta permasalahannya dari tahun 1983/1984 sampai dengan 1985/1986.

Selama kunjungan kerja tersebut telah dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- A. Mengadakan pertemuan dengan Gubernur yang dihadiri oleh unsur Muspida, Ketua Bappeda, Biro Bina Pembangunan, Irwilprop dan para Pimpinan Proyek yang ada kaitannya dengan Program - Inpres.
- B. Mengadakan peninjauan di tiga Daerah Tingkat II yaitu berturut-turut Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara dan Belu, guna menerima laporan dari masing-masing Bupati mengenai perkembangan pelaksanaan penggunaan dana Inpres bantuan pembangunan Kabupaten tahun 1983/1984 sampai dengan 1985/1986 beserta permasalahannya serta melakukan peninjauan di beberapa lokasi proyek jalan/jembatan, SD., Puskesmas, Penghijauan dan Cek Dam serta beberapa KUD di ketiga Kabupaten tersebut diatas.

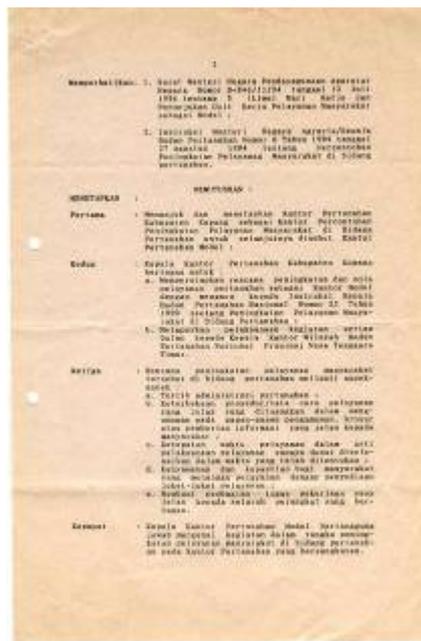
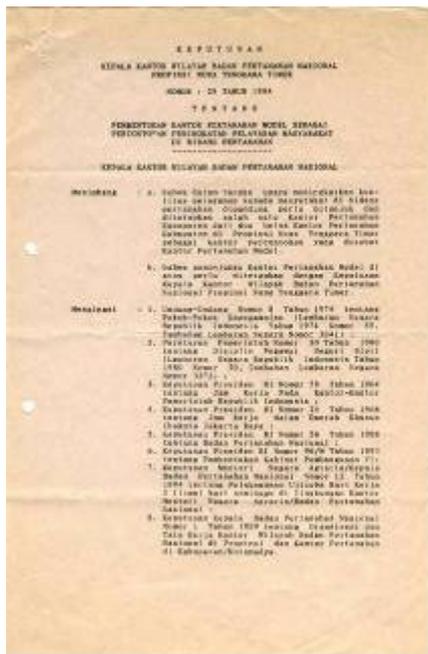
II. PERKEMBANGAN PROGRAM INPRES.

Dari hasil pertemuan dengan Gubernur, Ketua Bappeda maupun dengan para Bupati diterima laporan mengenai perkembangan pelaksanaan penggunaan dana Inpres bantuan pembangunan sebagai berikut :

A.1. PERTEMUAN

Bagian awal dari Laporan Inspektur Jenderal Pembangunan, mengenai kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur, 28 Maret 1986.

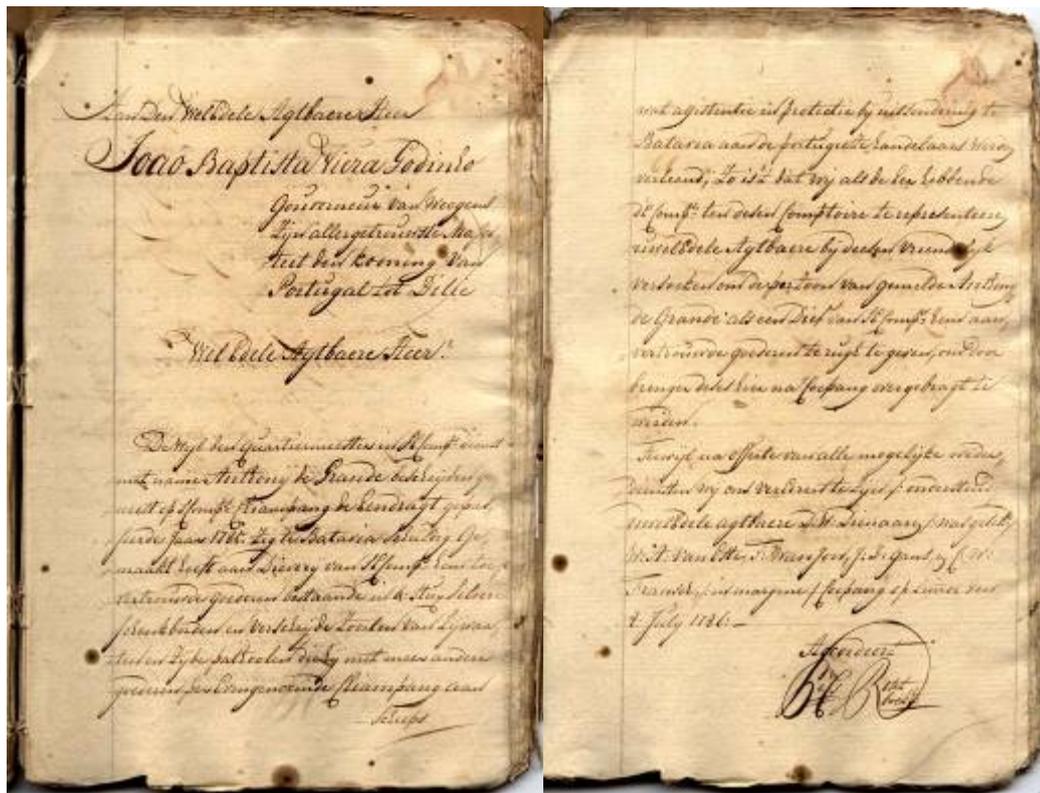
Sumber: ANRI, Setwapres Umar Wirahadikusuma 749



Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 29 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Model sebagai Percontohan Peningkatan Pelayanan Masyarakat di bidang Pertanahan, 17 Oktober 1994

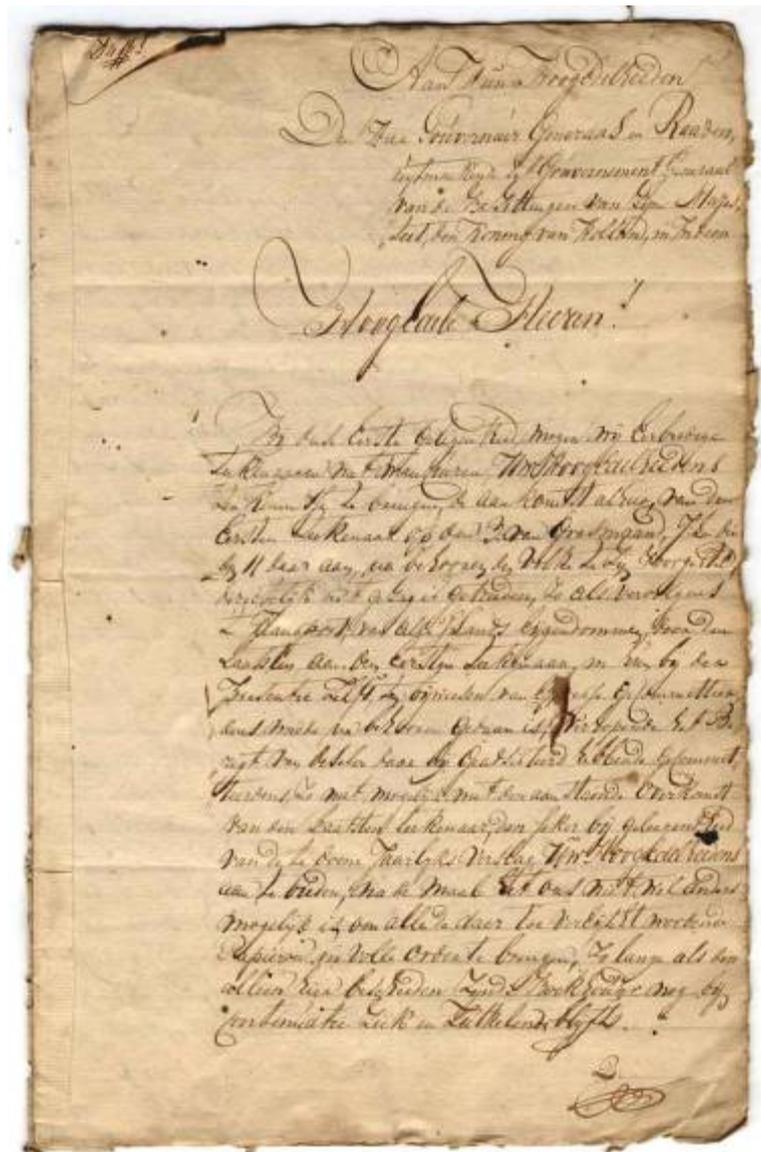
Sumber: ANRI, Kantor Menteri Negara Agraria 580

Pertahanan dan Keamanan



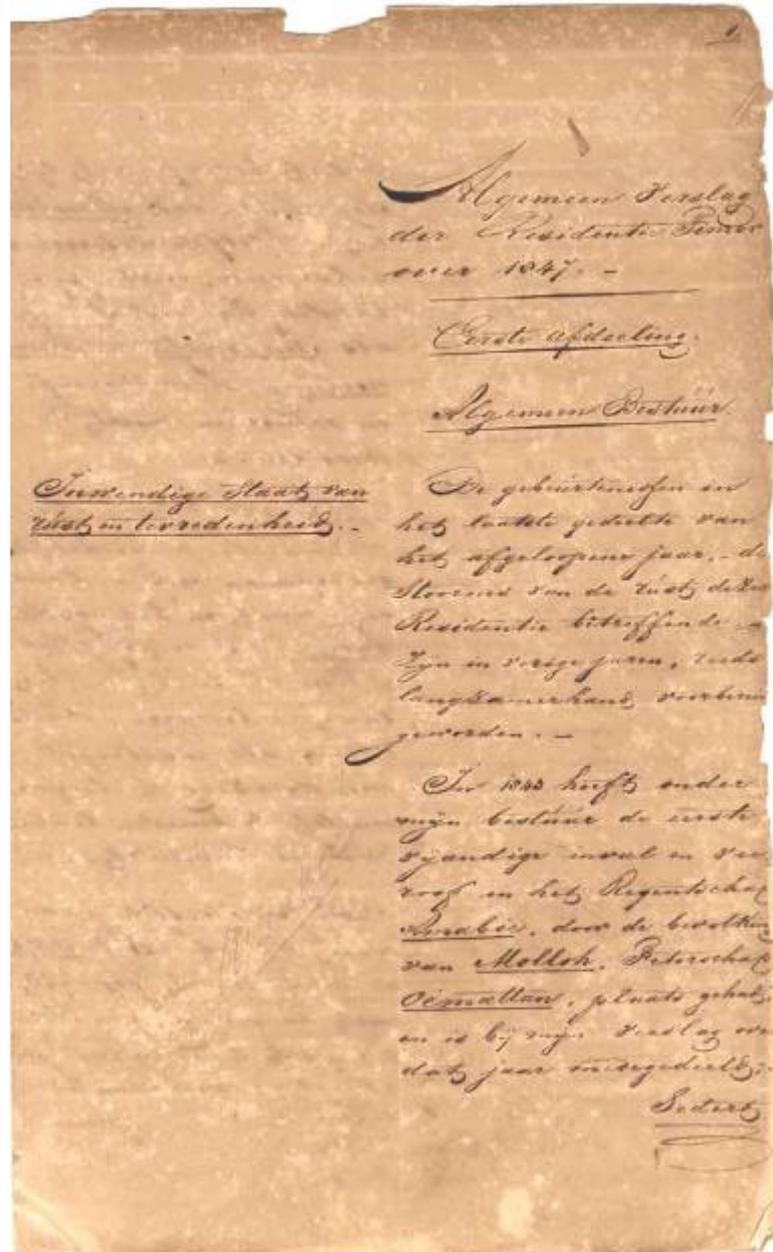
Surat dari Residen Timor kepada Yocio Baptista Viera Godinho, Wakil Kerajaan Portugis di Timor tentang kerjasama patroli dan proteksi jalur perdagangan di Timor dari gangguan para perampok, 5 Juli 1786.

Sumber: ANRI, Timor 7



Surat dari Residen Timor kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia mengenai kondisi keamanan para pedagang yang kembali dari Phialarang-Dili, Rote dan warga sekitarnya yang sering mengalami penyerangan dari pasukan Portugis, 1810.

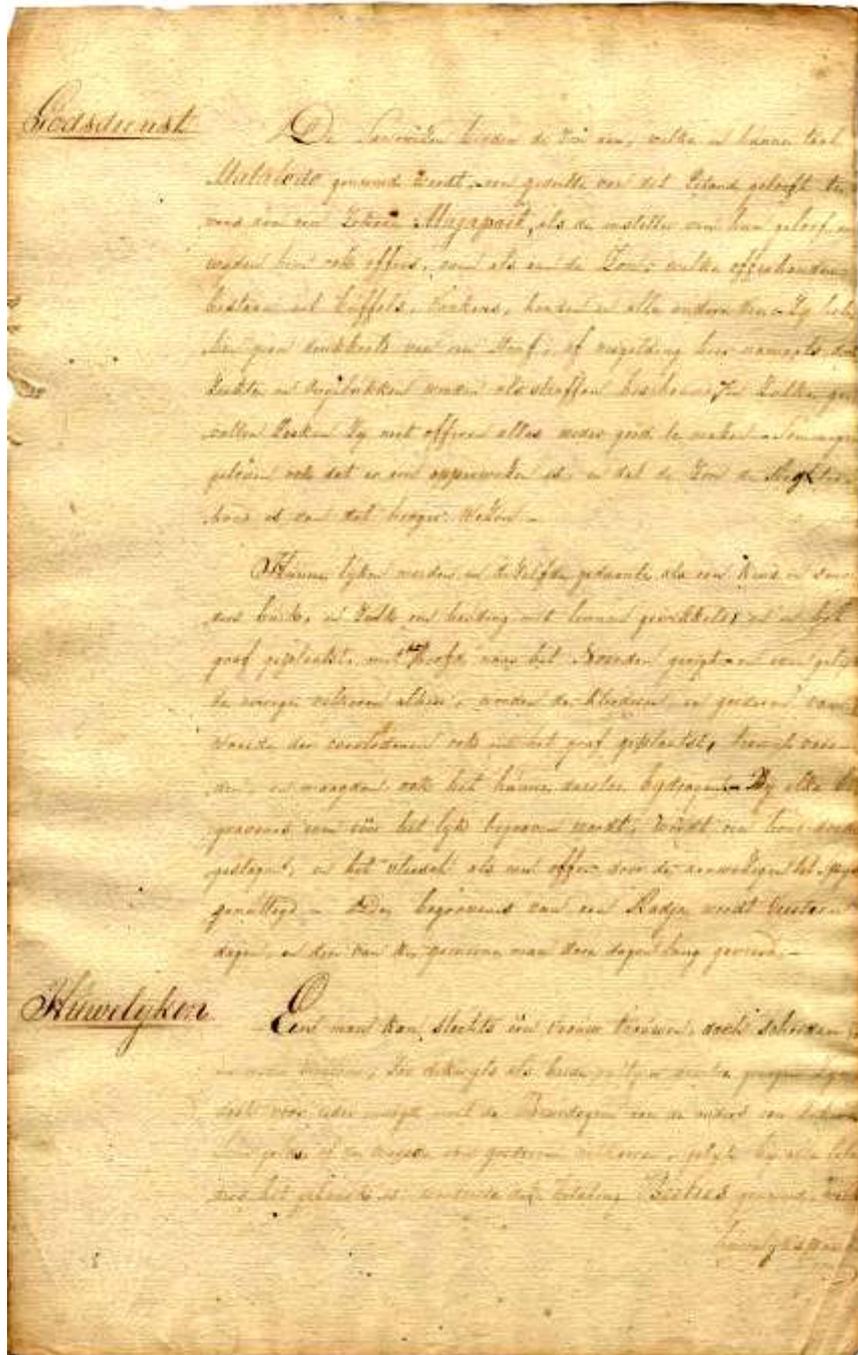
Sumber: ANRI, Timor 16



Bagian awal dari laporan Residen Timor tahun 1847 tentang kondisi politik di Timor antara lain mengenai perlawanan rakyat Timor dan Raja Amfoeang terhadap Pemerintah Hindia Belanda, 1847.

Sumber: ANRI, Timor 78

Keagamaan



Fragmen laporan Residen Timor antara lain mengenai pengaruh kepercayaan Majapahit dalam upacara keagamaan orang Sawu, 1834

Sumber: ANRI, Timor 68



Masjid di Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur
10 September 1951.

Sumber: ANRI, Kempen K 510910 PP 32



Masjid di Kupang, Nusa Tenggara Timur
28 April 1953.

Sumber: ANRI, Kempen K 530428 UU 3-1



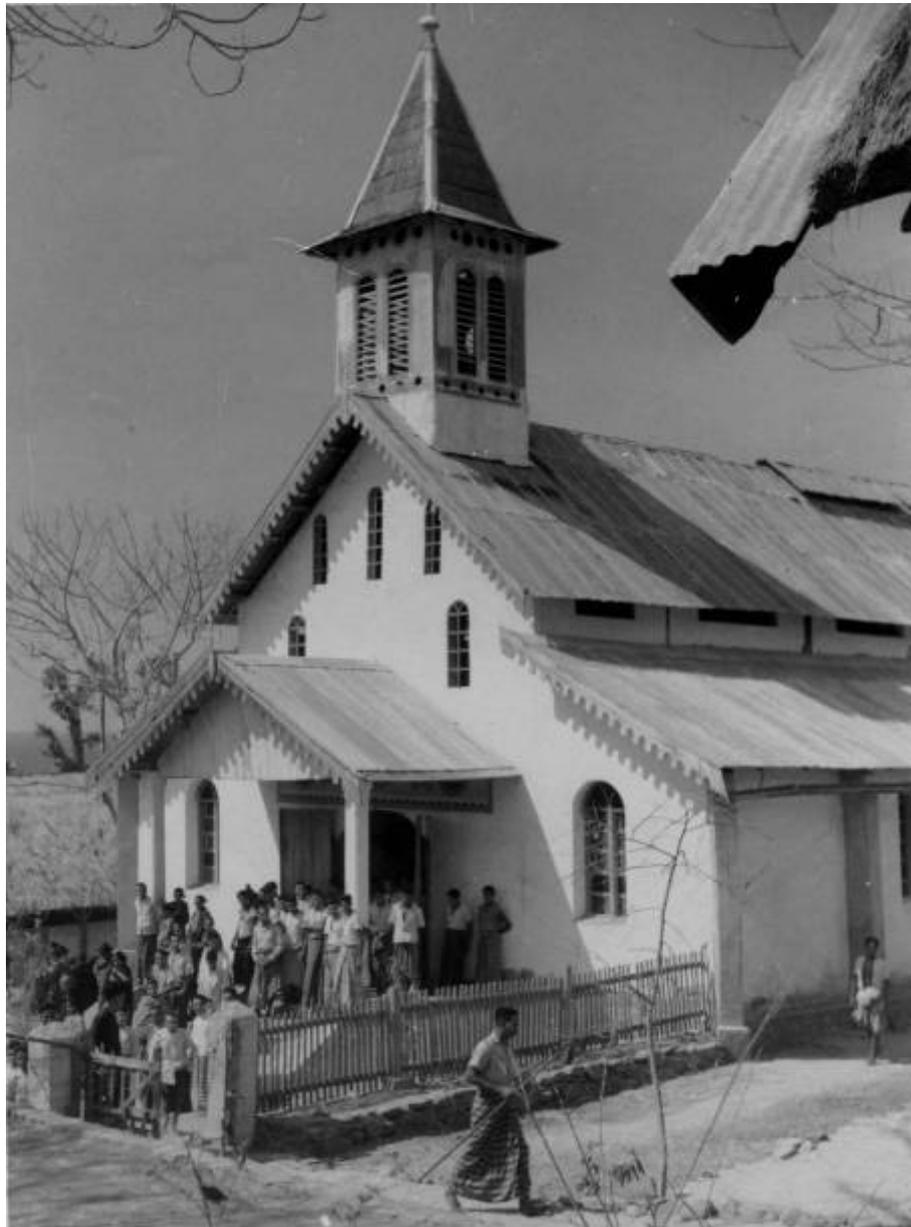
Gereja Roma Katolik dan rumah/asrama suster
dengan latar belakang bukit di Larantuka,
Nusa Tenggara Timur,
1930

Sumber: ANRI, KIT 809/62



Pastor van der Lao S.J. bersama jemaat Kristen
di depan Gereja Roma Katolik di Konga, Flores,
Nusa Tenggara Timur
1930

Sumber: ANRI, KIT 809/74



Gereja di Lamalerap, Flores, Nusa Tenggara Timur,
22 September 1948.

Sumber: ANRI, RVD 80922 NN 13



Kelenteng China di kampung dekat pantai di Timor,
1936.

Sumber: ANRI, KIT 966/74

DAFTAR NAMA DAN ANGGRAH LAYAK
MASJID, MUSHOLA DAN MUSHOLA
SE NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN: 1992/1993

NO.	NAMA MASJID	JUMLAH BANGUNAN	JUMLAH MUJAHID	ALAMAT LENGKAP
1	2	3	4	5
/-	0.1 Kab. Kupang	:	:	:
	0.1.1 Kecamatan Kupang Utara	:	:	:
1	1. Masjid Al-Hidayah	:	:	Kelurahan Bendipot Kupang
2	2. Masjid Al-Fatih	:	:	Kel. Negeri Kupang
3	3. Masjid Nurul Iman	107 m2	:	Kel. Omba Kupang
4	4. Masjid Nurul Mahdi	593 m2	:	Kel. Hinasadin Kupang
5	5. Masjid Al-Hidayah	100 m2	:	Kel. Hinasadin Kupang
6	6. Masjid Nurul Hidayah	320 m2	:	Kel. Kelapa Dua - Kupang
7	7. Mushalla Al-Faqih	197 m2	:	Kel. Bonipol Kupang
8	8. Mushalla MANSUR Kupang	:	:	Kel. Hinasadin Kupang
9	9. Mushalla Ghoral M.	:	:	Kecak. Kel. Hinasadin
10	10. Mushalla Al-Muhammadin	:	:	Kel. Panti Panjang
	0.1.2 Kecamatan Kupang Selatan	:	:	:
11	1. Masjid Nurul Huda	:	:	Kel. Airinda Kupang
12	2. Masjid Nurul Mansur	:	:	Kel. Pantolin Kupang
13	3. Masjid Al-Jahidin	426 m2	:	Kel. Cepura Kupang
14	4. Masjid Nurul Yakin	303 m2	:	Kel. Omba Kel. Hinasadin
15	5. Masjid Nurul Hidayah	340 m2	:	Kel. Beligama Kupang
16	6. Masjid Taqwa	:	:	Kel. Hidakota Kupang
17	7. Masjid Nurul Muthan	:	:	Kel. Mangina Kupang
18	8. Masjid Nurul Qamih	:	:	Kel. Hidakota Kel. Omba
19	9. Masjid Nurul Iman	:	:	Kel. Omba Kupang
20	10. Masjid Nurul Iman	575 m2	:	Kel. Hidakota Kel. Hidakota Kupang
21	11. Masjid Agung Baiturrahman	1.030 m2	:	Kel. Hidakota Kupang, Kel. Omba
22	12. Mushalla Kamal Dep. Agas Dtt	20 m2	:	Kel. Hidakota Kel. Hidakota no. 3 Kupang Dtt
23	13. Mushalla Kamal Depdikbud DTT	:	:	Kel. Hidakota Kupang
	0.1.3 Kecamatan Kupang Tengah	:	:	:
24	1. Masjid Al-Fatih	233 m2	:	Kel. Omba Kupang
25	2. Masjid Nurul Hidayah	320 m2	:	Kel. Omba Timur, Kel. Omba Kupang
26	3. Masjid Al-Fatih	136 m2	:	Kel. Hidakota Kupang
27	4. Masjid Nurul Hidayah Baiturrahman	:	:	Kel. P. Kel. Hidakota Kupang

Laporan kegiatan bidang urusan Agama Islam
Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara
Timur antara lain mengenai tempat ibadah Agama Islam
di berbagai wilayah,
15 Januari 1953

Sumber: ANRI, Departemen Agama II 312



MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : MA/264/1986

Lamp. : -

H a l : Persetujuan bantuan untuk
pemugaran gedung Gereja Katedral
Renha Rosari Larantuka, NTT.

Jakarta, 4 Oktober 1986

KEPADA YTH.
SDR. DIRJEN BIMAS KATOLIK
DEPARTEMEN AGAMA RI
DI -

J A K A R T A

Dengan hormat,

Menunjuk surat Saudara Nomor : G/BA.03/1097/1986 tanggal
18 September 1986 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat,
dengan ini kami menyetujui pemberian bantuan pemugaran gedung Ge-
reja Katedral Renha Rosari Larantuka sebesar Rp. 5.000.000,-
(lima juta rupiah).

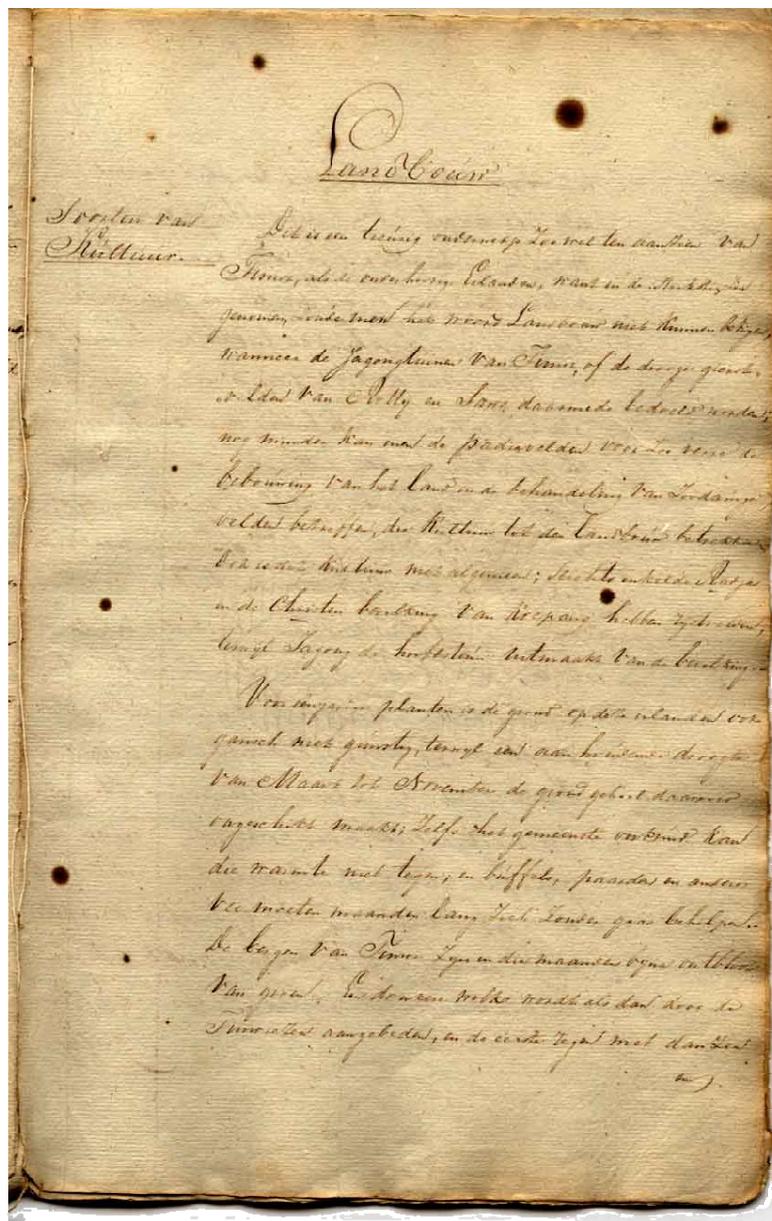
Dana bantuan tersebut dibebankan kepada Proyek Peubinaan
Sarana Keagamaan Katolik tahun anggaran 1986/1987, DIP Nomor :
005/XXV/3/1986 tanggal 1 Maret 1986.

Demikianlah untuk menjadi maklum.



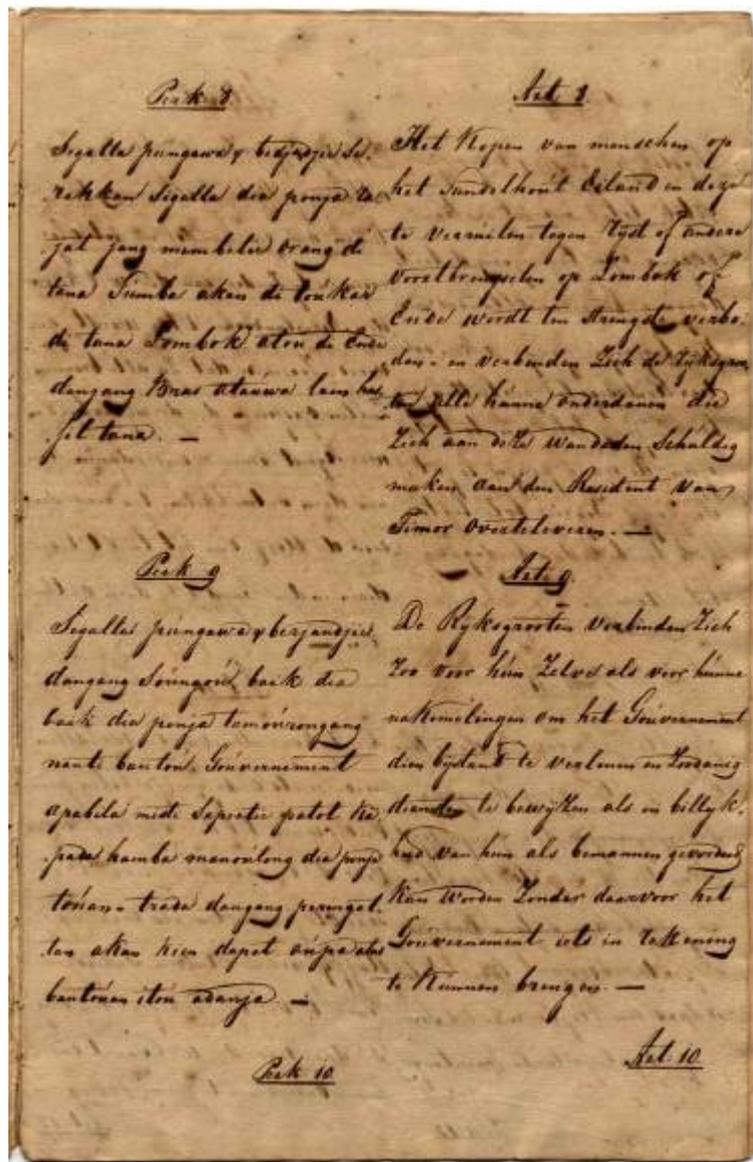
Surat Menteri Agama RI mengenai bantuan pemugaran gedung
Gereja Katedral Renha Rosari di Larantuka,
Nusa Tenggara Timur,
4 Oktober 1986,
Sumber: ANRI, Departemen Agama II 101

Pertanian



Fragmen laporan Residen Timor
tentang pertanian di Timor,
1834

Sumber: ANRI, Timor 68



Fragmen Kontrak Kerajaan Sumba dengan Pemerintah Hindia Belanda antara lain menyebutkan bahwa rakyat di Ende akan menanam kopi, lada, nila, kapas dan kayu manis yang laku di pasaran Eropa,
1 Mei 1839.

Sumber: ANRI, Kontrak/214



Perempuan-perempuan Ende sedang membawa beras
di atas kepalanya menuju pasar Ende,
Nusa Tenggara Timur,
[± 1930]

Sumber: ANRI, KIT 83/24



Kaum lelaki sedang mengetam padi di sawah
pada musim panen di Sumba,
25 Agustus 1951 .

Sumber: ANRI, Kempen 510825 NN 20



Seorang wanita sedang menanam benih jagung
di Manggarai, Nusa Tenggara Timur
22 September 1948.

Sumber: ANRI, RVD 80922 NN 19



Cara penyimpanan jagung dengan diikatkan
pada pohon kelapa di Waingapu,
25 Agustus 1951.

Sumber: ANRI, Kempen 510825 NN 101



Mengolah tanah garapan dengan tombak kayu
untuk pertanian di Sumba,
25 April 1952.

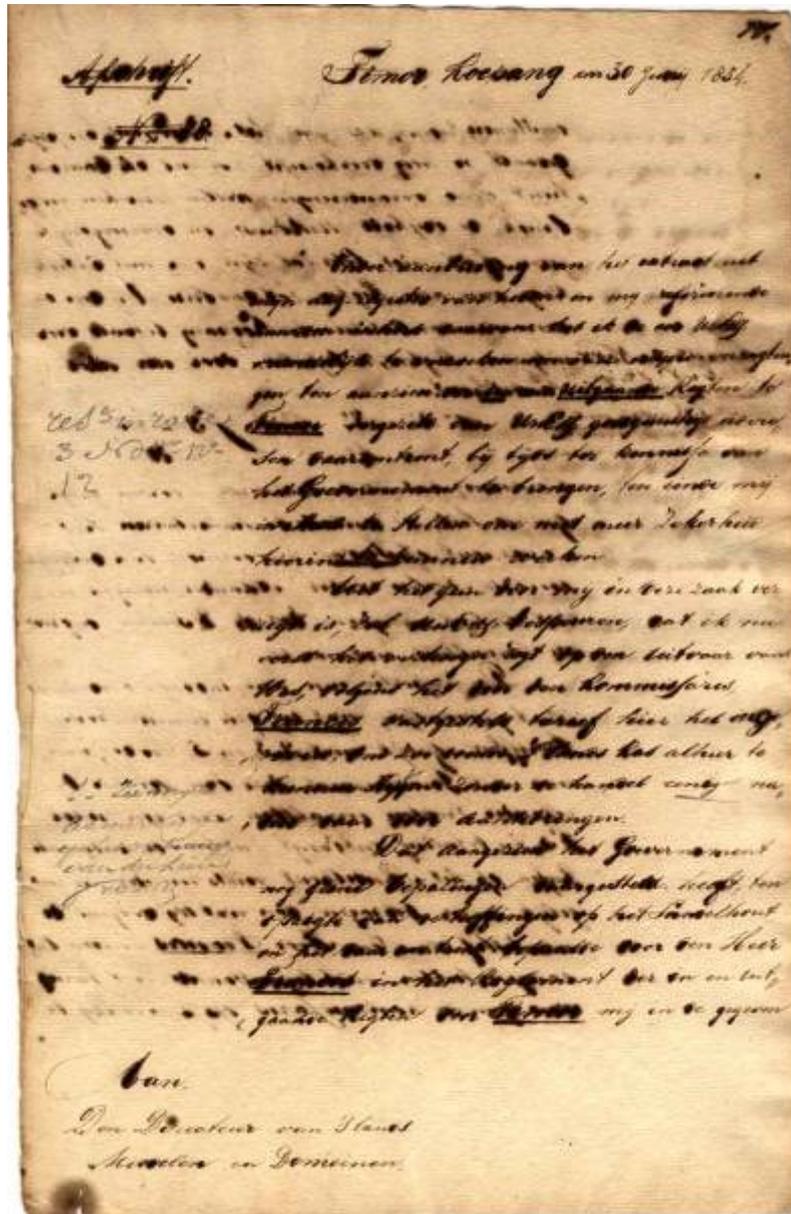
Sumber: ANRI, Kempen 520425 NN 22



Dua orang wanita sedang mencangkul
dan menanam palawija di salah satu desa di Sumba,
23 Oktober 1954.

Sumber: ANRI, Kempen 541023 NN 2-5

Perekonomian



Bagian awal surat dari Residen Timor J.B. Spang kepada
Direktur *Binnenlandsche Bestuur* tentang peraturan
peningkatan tarif pajak penjualan cendana putih di Timor,
Nusa Tenggara Timur
30 Juli 1834.

Sumber: ANRI, Timor 47



Dua orang perempuan dengan barang belanjannya
di pasar Kupang, Nusa Tenggara Timur
5 Oktober 1954.

Sumber: ANRI, Kempen 541005 UU 1-4

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.

No. B.-135/SD/IV/3/1968

JAKARTA, 28 Maret 1968.

Lampiran:

Perihal: Penyerahan beberapa Pajak
Negara kepada Daerah.

Kepada

Jth. Gubernur Kepala Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur

di -

KUPANG.

Menanggapi surat Gubernur No. 173/Insp/68 tertanggal 13 Februari 1968, perihal seperti terdapat dalam pokok surat ini, dengan ini kami sampaikan penjelasan sebagai berikut:

Kelengkapan serta usul daerah telah kami tanggap dalam suatu bentuk Nantjangan Undang-Undang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah Sektoral, dalam pasal 5 disebutkan ketentuan sebagai berikut:

Pajak2 Negara yang terdapat dalam surat ini ditetaskan menjadi pajak2 Daerah:

A. Kepada Daerah Tingkat I:
Dua Balik Nama Kendaraan Bermotor.

B. Kepada Daerah Tingkat II:

a. Pajak Bangun Aning.
b. Pajak Radio.

Nantjangan Undang-Undang Perimbangan Keuangan tersebut telah kami ajukan ke DPR-GR, untuk dapat segera disahkan.

Atas dasar hal2 tersebut diatas, maka realisasi penyerahan beberapa pajak kepada Daerah, harus menunggu pengesahan Nantjangan Undang-Undang Perimbangan Keuangan oleh DPR-GR.



KEPADA:

1. Jth. Wakil Menteri Negara MUKY.
2. Jth. Wakil Menteri Keuangan.
3. Jth. Wakil Menteri Dalam Negeri.
4. Jth. Sekretaris Kabinet.
5. Jth. Gubernur Kepala Daerah di seluruh Indonesia.
6. Jth. Ketua DPR-GR, Provinsi Nusa Tenggara Timur - Kupang.
7. Kuchiamal.

Surat Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan atas nama Menteri Keuangan kepada Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur mengenai penyerahan beberapa pajak negara kepada daerah,
28 Maret 1968.

Sumber: ANRI, Menkeu 369

DJAKARTA, 23 APRIL 1969.

Nomor : B-191/SD/4/4/1969. KEPADA
Lampiran : — Jth. Sdr. Bupati Kepala Daerah
Perihal : Pelaksanaan Penjerahan Pajak Radio ke- Kabupaten Sikka
pada Daerah.- di

MAUMERE.-

Dengan menunjuk surat Sandara No. BK. 40/TdJk/68 tanggal 25 Maret 1969 perihal tersebut pada pokok sumt, bersama ini diberitahukan dengan hormat bahwa :

Dengan telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1969 tentang pelaksanaan Undang-undang No.10 Tahun 1968 tentang Penjerahan Bea Balik Nama Kendaraan bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio kepada Daerah, maka penjerahan Pajak2 tersebut kini dapat dilaksanakan berdasarkan landasan yang baik formal maupun materiel sifatnya sudah tetap. Pelaksanaan penjerahan pajak2 Negara dimaksud diatas sedang dalam proses.

Demikian harap dimaklumi.-

A.N. MENTERI KEUANGAN
SEKRETARIS JENDERAL,

t.t.d.

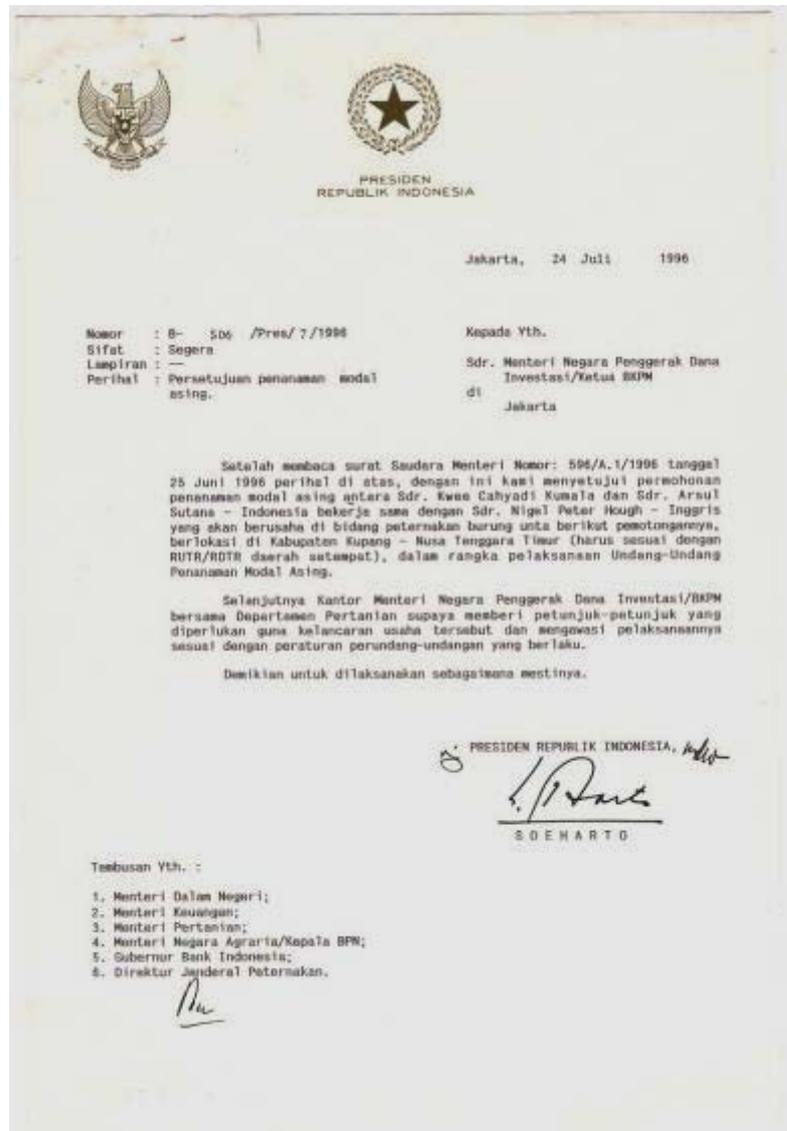
SOEDRADJAT

RESEMIAN :

1. Jth. Menteri Dalam Negeri.
2. Jth. Menteri Keuangan (sebagai laporan)
3. Jth. Gubernur Kepala Daerah Nusa Tenggara Barat.
4. Jth. Direktur Jenderal Pajak.
5. Jth. Sdr. Kepala Inspeksi Pajak Singaradja.

Surat Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan atas nama Menteri Keuangan mengenai penyerahan pajak radio, balik nama kendaraan bermotor, pajak bangsa asing kepada daerah Sikka, Nusa Tenggara Timur, 23 April 1969.

Sumber: ANRI, KeMenterian Keuangan 377



Surat dari Presiden RI kepada Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM tentang persetujuan penanaman modal asing antara Nigel Pater Hough (Inggris) dengan Kwee Cahyadi Kumala dan Asrul Sutana (Indonesia) di bidang peternakan burung unta dan pemotongannya di Kupang, Nusa Tenggara Timur, 24 Juli 1996.

Sumber: ANRI, Sekretaris Menteri Negara Urusan Pemerintahan 5174



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 9 Oktober 1996

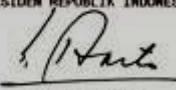
Nomor : B- 682 /Pres/10/1996
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan penanaman modal
asing.

Kepada Yth.
Sdr. Menteri Negara Penggerak Dana
Investasi/Ketua BKPM
di
Jakarta

Setelah membaca surat Saudara Menteri Nomor: 897/A.1/1996 tanggal 10 September 1996 perihal di atas, dengan ini kami menyetujui permohonan penanaman modal asing antara PT Grahasukses Pratama - Indonesia bekerja sama dengan Reiscontaktent Overzee B.V. - Belanda yang akan berusaha di bidang jasa akomodasi (*cottage*), jasa rekreasi dan wisata tirta, berlokasi di Kabupaten Musi Rawas - Sumatera Selatan dan Kabupaten Sumba - Nusa Tenggara Timur (harus sesuai dengan RUTR/RDTR daerah setempat), dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Penanaman Modal Asing.

Selanjutnya Kantor Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/BKPM bersama Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi supaya memberi petunjuk-petunjuk yang diperlukan guna kelancaran usaha tersebut dan mengawasi pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

Tembusan Yth. :

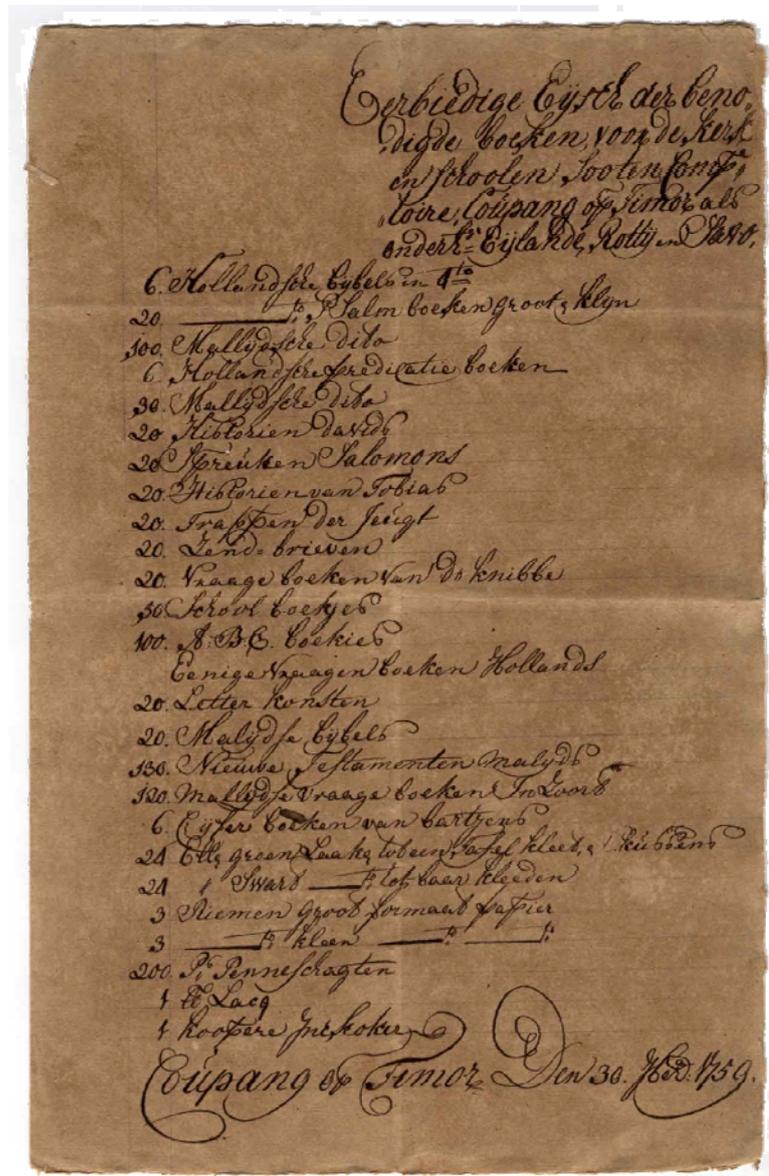
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi;
4. Menteri Negara Agraria/Kepala BPN;
5. Gubernur Bank Indonesia;
6. Direktur Jenderal Pariwisata.



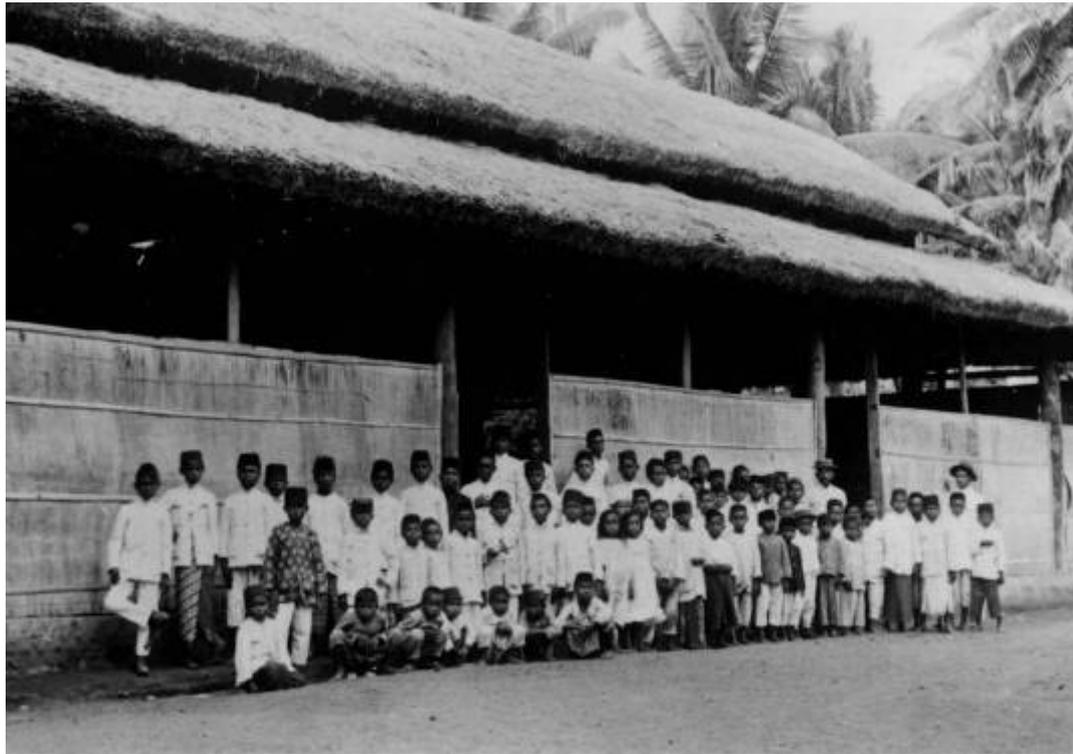
Surat dari Presiden RI kepada Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM tentang persetujuan penanaman modal asing antara Reiscontaktent Overzee B.V. (Belanda) dengan PT Grahasukses Pratama (Indonesia) di bidang jasa akomodasi (*cottage*), jasa rekreasi dan wisata tirta di Kabupaten Sumba, Nusa Tenggara Timur,
9 Oktober 1996.

Sumber: ANRI, Sekretaris Menteri Negara Urusan Pemerintahan
5347

Pendidikan



Daftar buku yang diperlukan untuk gereja dan sekolah di Kupang, 30 September 1759
 Sumber: ANRI, Timor 43



Sekolah Rakyat di Ende, nampak murid-murid muslim berfoto
bersama guru-guru Katolik,
[± 1930]

Sumber: ANRI, KIT 1085/90



Sekolah Kepandaian Putri Negeri di Kupang,
Nusa Tenggara Timur,
12 Oktober 1954.

Sumber: ANRI, Kempen 541012 UU 1-2



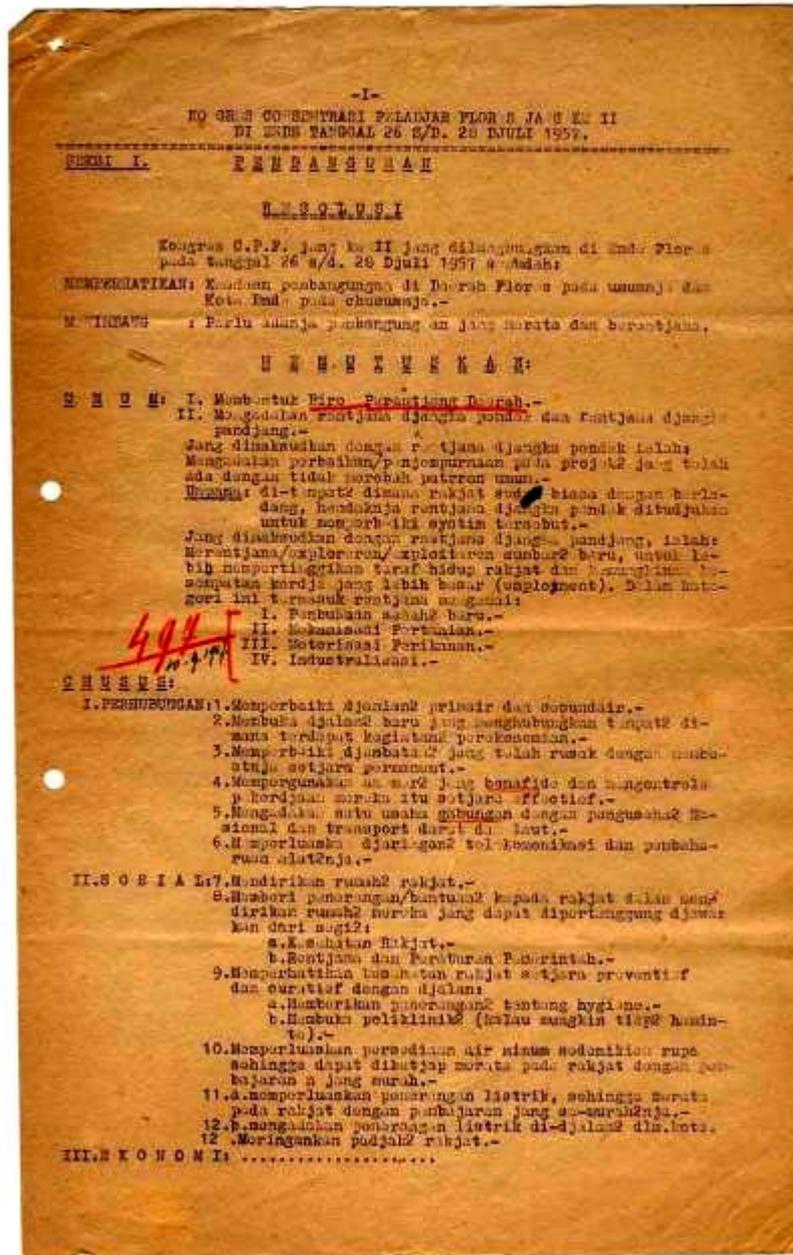
Asrama Sekolah Guru Atas dan Sekolah Menengah Atas
di Kupang, Nusa Tenggara Timur,
12 Oktober 1954.

Sumber: ANRI, Kempen 541012 UU 1-4



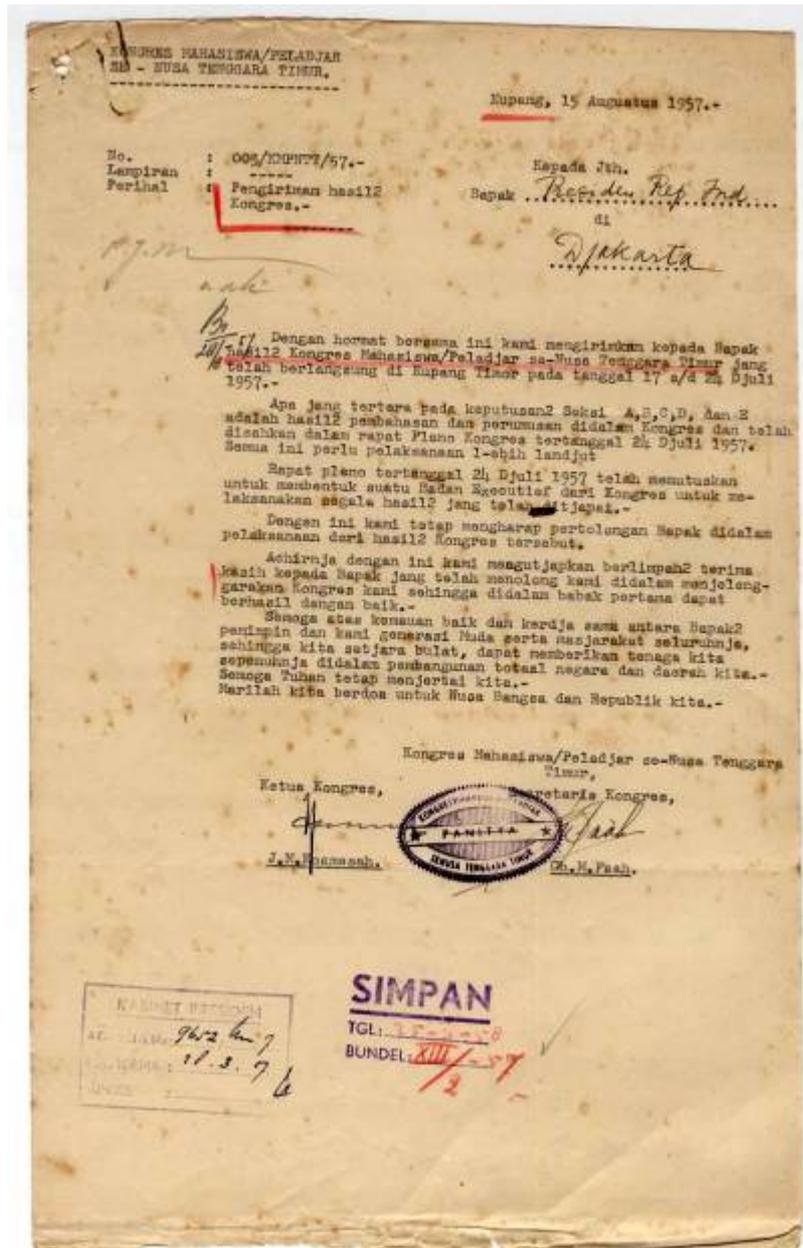
Seorang biarawati tengah memberikan pelajaran di Sekolah Rendah di desa misi Katholik di Keva Menano, Timor Tengah, Nusa Tenggara Timur, 12 Oktober 1954.

Sumber: ANRI, Kempen 541012 UU 1-8



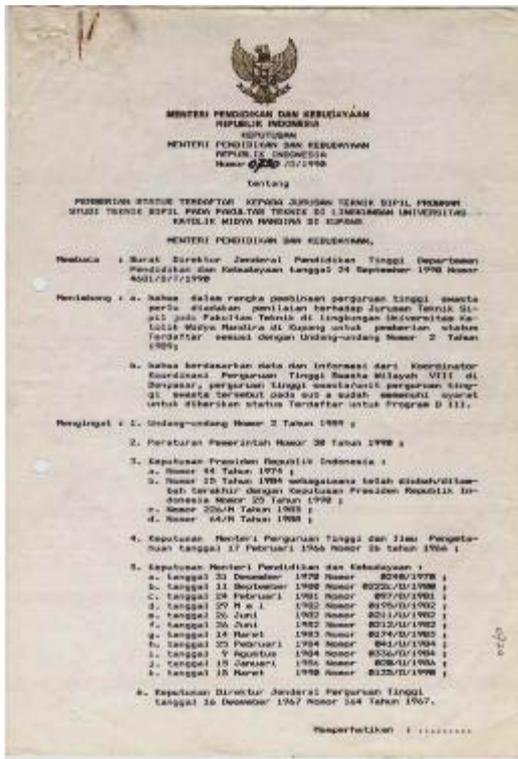
Bagian awal dari Resolusi Kongres Konsentrasi Pelajar Flores II di Ende tentang pembentukan Biro Perancang Daerah dan merealisasikan pendidikan dan kebudayaan di segala sektor, 28 Juli 1957

Sumber: ANRI, Konstituante 295



Surat dari Kongres Mahasiswa/pelajar se Nusa Tenggara Timur kepada Presiden RI tentang pengiriman hasil-hasil kongres mahasiswa dan pelajar se-Nusa Tenggara Timur, 15 Agustus 1957.

Sumber: ANRI, Kabinet Presiden RI 1220



Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0720/0/1990 tentang pemberian status Terdaftar kepada Jurusan Teknik Sipil Program Studi Teknik Sipil pada Fakultas Teknik di lingkungan Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Nusa Tenggara Timur, 11 Desember 1990.

Sumber: ANRI, Depdiknas 481

Kebudayaan



Batu kubur di Chai Ronja, Sumba,
Nusa Tenggara Timur
[±1930]

Sumber: ANRI, KIT 815/22



Raja Timor beserta keluarga dalam busana adat,
di pulau Savoe, Nusa Tenggara Timur
[±1930]

Sumber: ANRI, KIT 460/62



Batu kubur di Kampong Rende, pulau Sumba,
Nusa Tenggara Timur
[+1930]

Sumber: ANRI, NIGIS A 870



Raja Sikka, Don Josef Thomas Ximenes da Silva beserta istri berpakaian adat abad ke 15 di Timor, Nusa Tenggara Timur 8 Agustus 1948.

Sumber: ANRI, RVD 80808 NN 9



Pertunjukan tari Lekurai
yang dibawakan wanita-wanita dari Bellu Malaka Flores,
Nusa Tenggara Timur
12 Agustus 1948.

Sumber: ANRI, RVD 80812 UU 2-3



Pertandingan sabung ayam dalam masyarakat di Maumere,
Nusa Tenggara Timur
22 September 1948.

Sumber: ANRI, RVD 80922 NN 27



Profil Perempuan dari Manggarai, Nusa Tenggara Timur
dengan pakaian pesta,
11 Oktober 1948.

Sumber: ANRI, RVD 81011 NN 18



Seorang wanita dengan alat musik sasando,
alat musik khas Nusa Tenggara Timur
8 Mei 1949.

Sumber: ANRI, RVD M 3189



Dua perempuan menggendong anaknya, salah satunya dengan cara memasukkan anaknya ke dalam kain yang dikenakan ibunya, kain khas Nusa Tenggara Timur
20 Juli 1949.

Sumber: ANRI, RVD 90720 UU 4



Tarian perang di Sumba,
30 Oktober 1950.
Sumber: ANRI, Kempen 502113



Keluarga Raja Lewa Paku Umbun Dai Ndima di Waingapu,
dengan latar belakang kain tenun khas Nusa Tenggara Timur,
25 Agustus 1951.

Sumber: ANRI, Kempen 510825 NN 1



Penyimpanan mayat sebelum dikubur
dengan diberi sesaji untuk arwah,
di Waingapu, Nusa Tenggara Timur
25 Agustus 1951.

Sumber: ANRI, Kempen 510825 NN 2



Kepala Distrik Lewa Paku, Waingapu, Umbun Nai Ndimia
bersama keluarga menggunakan kain tenun khas
Nusa Tenggara Timur
25 Agustus 1951.

Sumber: ANRI, Kempen 510825 NN 6



Profil sepasang mempelai di Nita, Flores,
Nusa Tenggara Timur
10 September 1951.

Sumber: ANRI, Kempen K 510910 PP 29



Tari Selendang, tarian khas Nusa Tenggara Timur
Januari 1952.

Sumber: ANRI, Kempen 104-5



Pemukul gendang dan gong dalam pertunjukan kuda menari
di Lewakambera, Nusa Tenggara Timur
25 April 1952.

Sumber: ANRI, 520425 NN 27



Wanita Dangka Nagakeo, Flores, dengan berpakaian adat,
menyambut kunjungan kerja Presiden Soekarno
di Nusa Tenggara Timur
25 April 1952.

Sumber: ANRI, Kempen 520425 NN 151



Pakaian wanita adat kebesaran anak raja Niki-Niki Kupang,
Nusa Tenggara Timur
November 1952.

Sumber: ANRI, Kempen 199-3



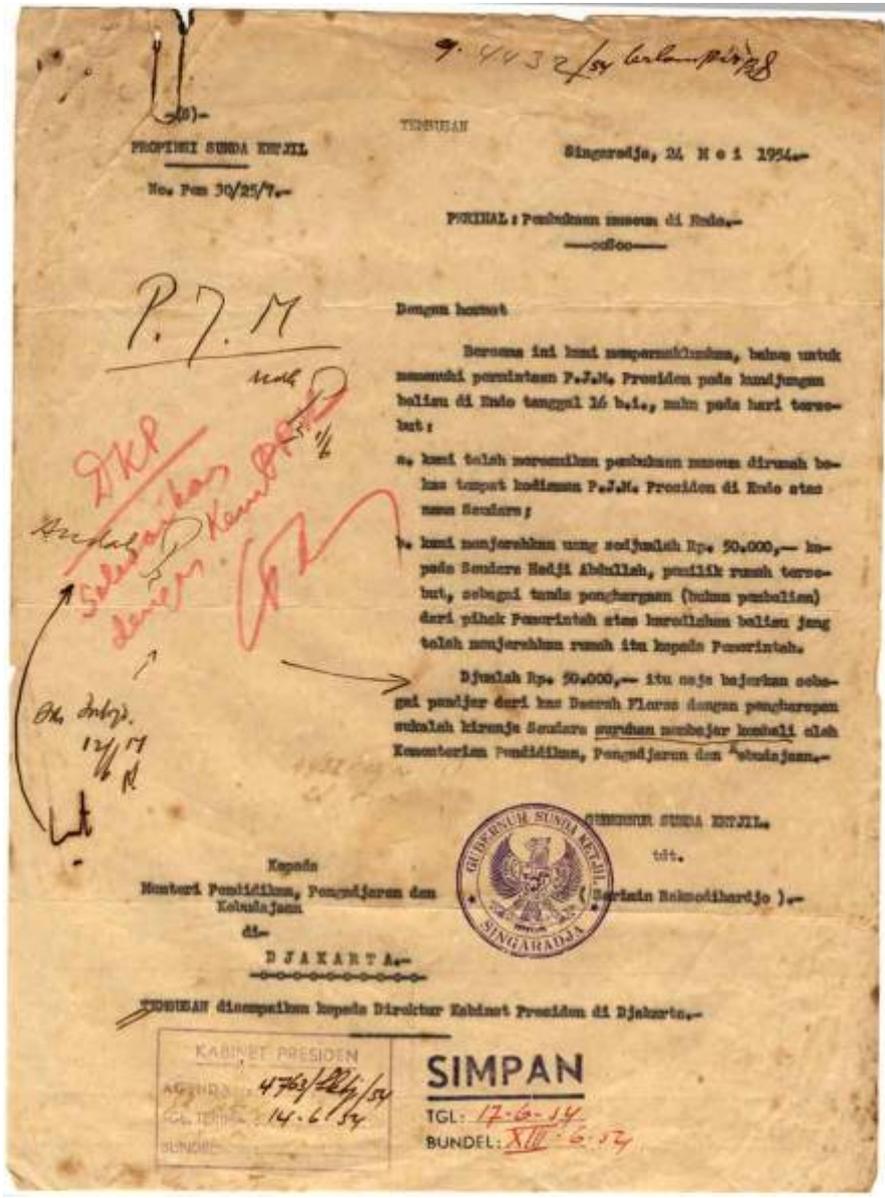
Peralatan Raja Sumba, Timor, Nusa Tenggara Timur
dengan beberapa barang pusaka untuk selamatan bagi arwah
keluarga yang telah meninggal,
Februari 1954.

Sumber: ANRI, Kempen 318-48



Presiden Soekarno tengah menggunting pita
di pintu gedung museum di Ende, Nusa Tenggara Timur
16 Mei 1954.

Sumber: ANRI, Kempen 540516 NN 20



Surat Gubernur Sunda Kecil mengenai pembukaan museum di Ende, Nusa Tenggara Timur 24 Mei 1954.

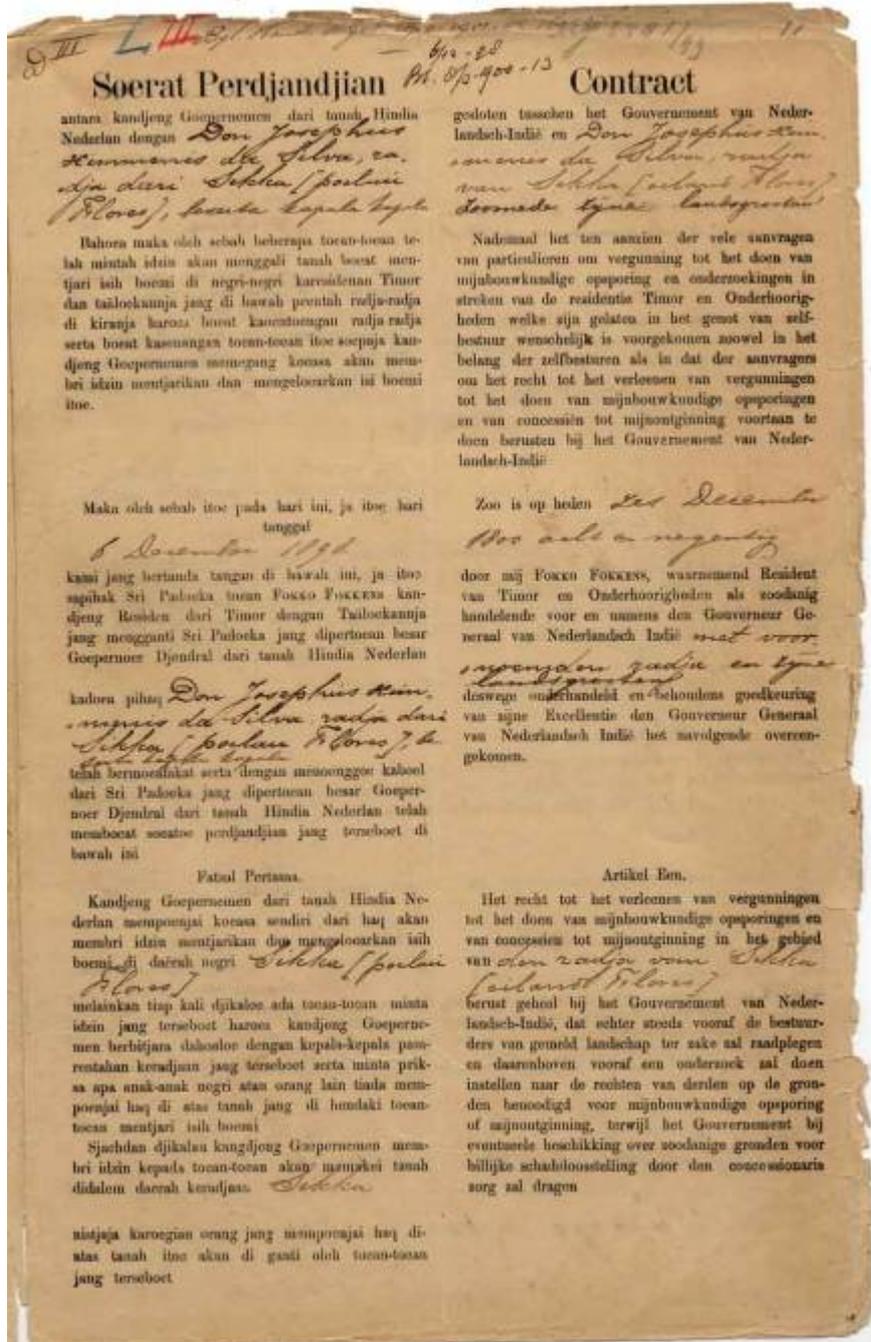
Sumber: ANRI, Kabinet Presiden RI 1144



Seorang lelaki memikul tempat air yang terbuat dari daun lontar untuk membawa air,
2 Juni 1955.

Sumber: ANRI, Kempen 550602 UU 3-1

Perindustrian



Surat Perjanjian Raja Sikka dengan Pemerintah Hindia Belanda tentang pertambangan di bumi Sikka, Flores, 6 Desember 1898.

Sumber: ANRI, Kontrak 265



Pabrik Pemintalan benang di Sumba, Nusa Tenggara Timur
1947.

Sumber: ANRI, RVD A 717/47



Pengolahan kapas untuk dijadikan benang secara tradisional,
di Sumba, Nusa Tenggara Timur
4 Agustus 1948.

Sumber: ANRI, RVD 80804 NN 2-2



Proses pencelupan benang untuk pewarnaan kain tenun secara tradisional di Flores, Nusa Tenggara Timur
4 Agustus 1948.

Sumber: ANRI, RVD 80804 NN 2-5



Seorang wanita sedang membuat motif pada kain tenun ikat,
di Flores, Nusa Tenggara Timur
4 Agustus 1948

Sumber: ANRI, RVD 80804 NN 2-10



Proses penyaringan air laut untuk dijadikan garam dengan cara menggunakan saringan dari tikar penyaring di Meilolo, Sumba, Nusa Tenggara Timur
25 Agustus 1951

Sumber: ANRI, Kempen 510825 NN 125



Wakil Preiden Mohammad Hatta meninjau salah satu perusahaan kain tenun di Ende Flores, Nusa Tenggara Timur 25 April 1952.

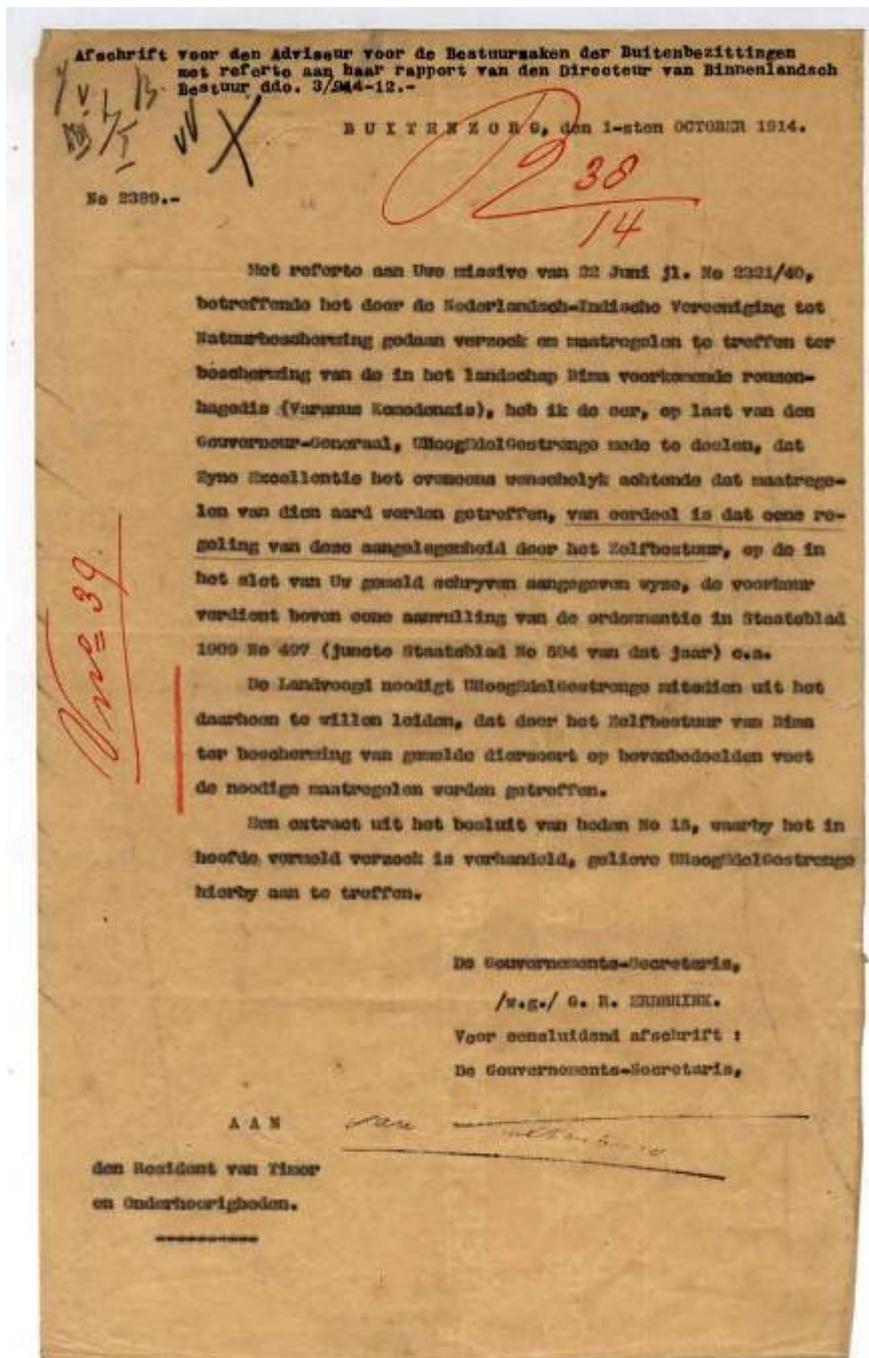
Sumber: ANRI, Kempen 520425 NN 193



Wakil Presiden Mohammad Hatta meninjau pabrik makanan dalam kaleng Icaff di Kupang, Nusa Tenggara Timur, 2 Oktober 1954

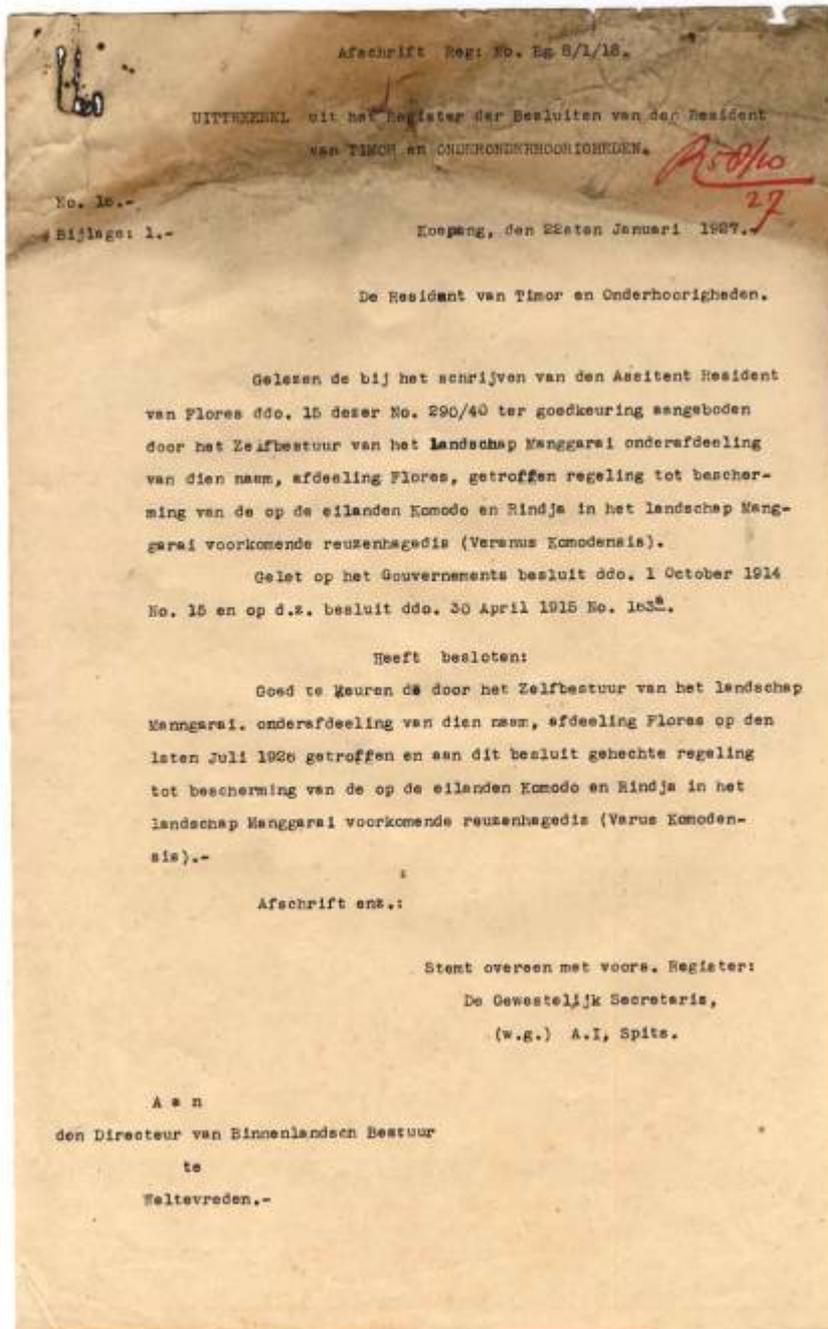
Sumber: ANRI, Kempen 541002 UU 6

Fauna



Surat dari Sekretaris Gubernur Jenderal Hindia Belanda kepada Residen Timor tentang perlindungan komodo di pulau Komodo, 29 Juli 1915.

Sumber: ANRI, Binnenlandsch Bestuur 1136 B



Ringkasan Keputusan Residen Timor tentang Perlindungan
Pulau Komodo dan Rinja di Manggarai, Nusa Tenggara Timur
22 Januari 1927.

Sumber: ANRI, Binnenlandsch Bestuur 1324



Peternakan sapi di padang yang luas di Sumba,
Nusa Tenggara Timur
27 April 1952.

Sumber: ANRI, Kempen 520425 NN 32



Perahu yang digunakan nelayan Lamalerap,
Nusa Tenggara Timur untuk menangkap ikan paus,
22 September 1948.

Sumber: ANRI, RVD 80922 NN 11



Seorang anak laki-laki berdiri di sebuah tulang rahang
ikan paus yang sangat besar di Lamalerap,
Nusa Tenggara Timur
22 September 1948.

Sumber: ANRI, RVD 80922 NN 30



Gajih ikan paus dijemur dipanas matahari kemudian ditampung
dan dipakai sebagai bahan bakar di Lamalerap,
Nusa Tenggara Timur
22 September 1948.

Sumber: ANRI, RVD 80922 NN 32



Penangkapan ikan paus secara beramai-ramai oleh penduduk
di muara pantai Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur
23 Oktober 1954.

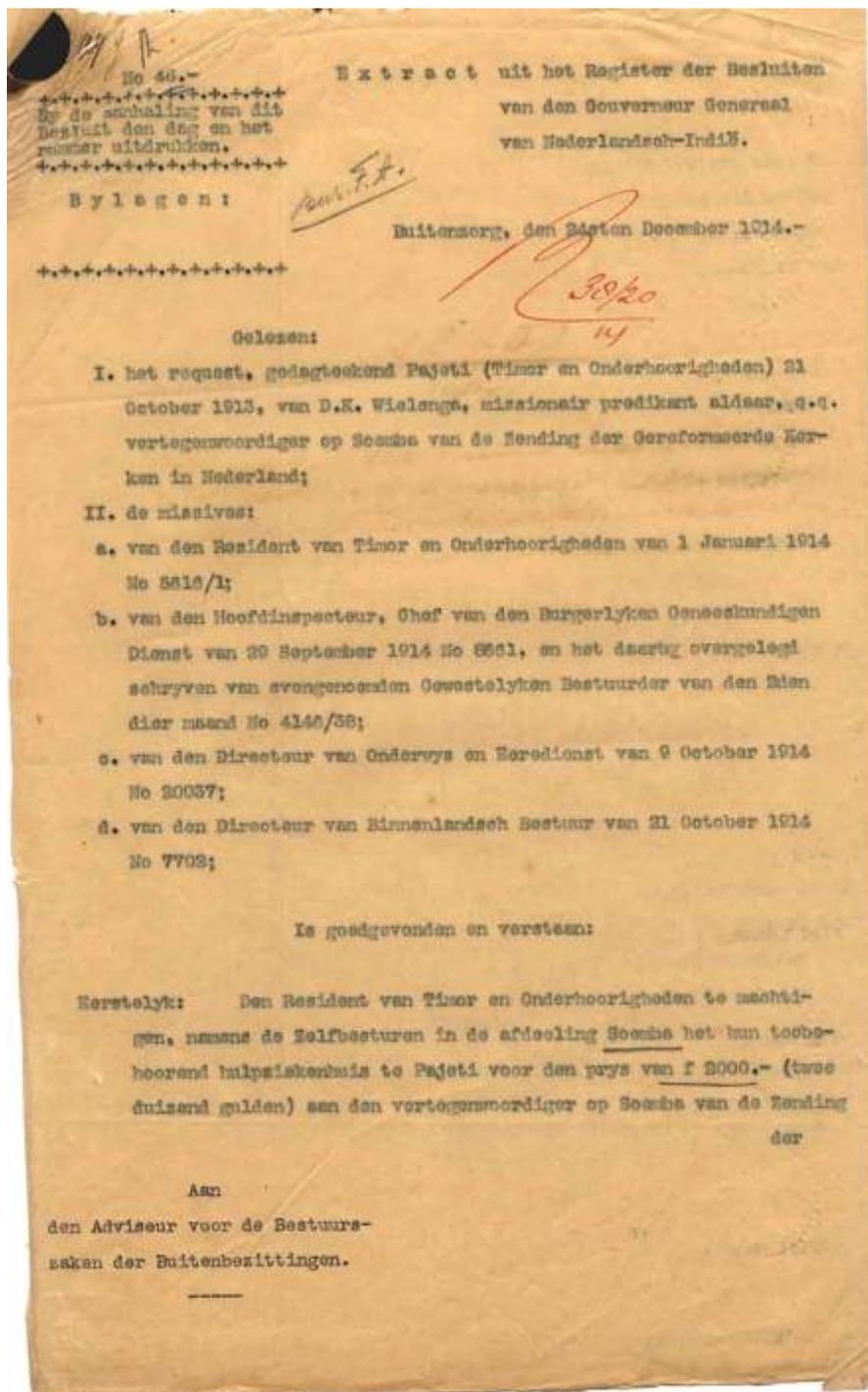
Sumber: ANRI, Kempen 541023 NN 1



Komodo salah satu fauna khas Indonesia yang hanya ada di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur
September 1963.

Sumber: ANRI, Kempen 63-1197

Kesehatan



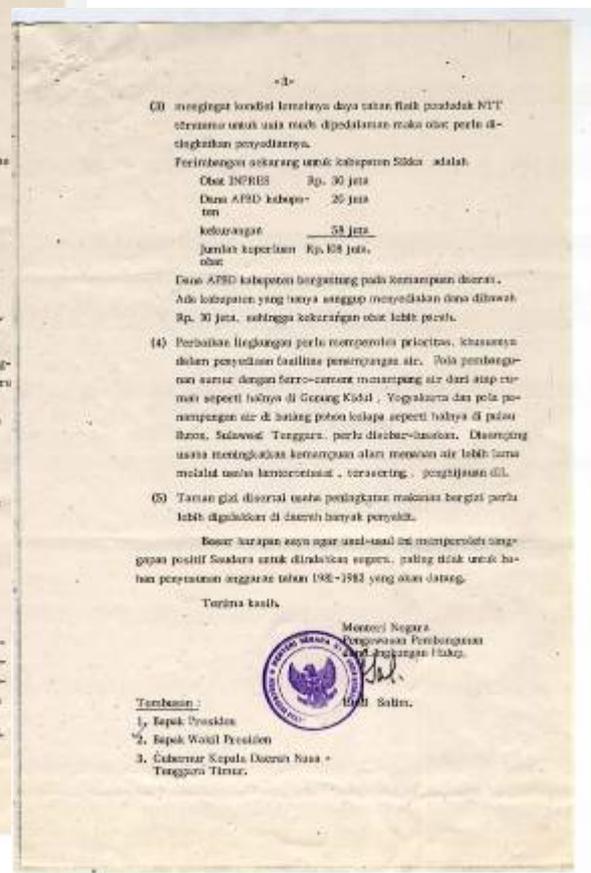
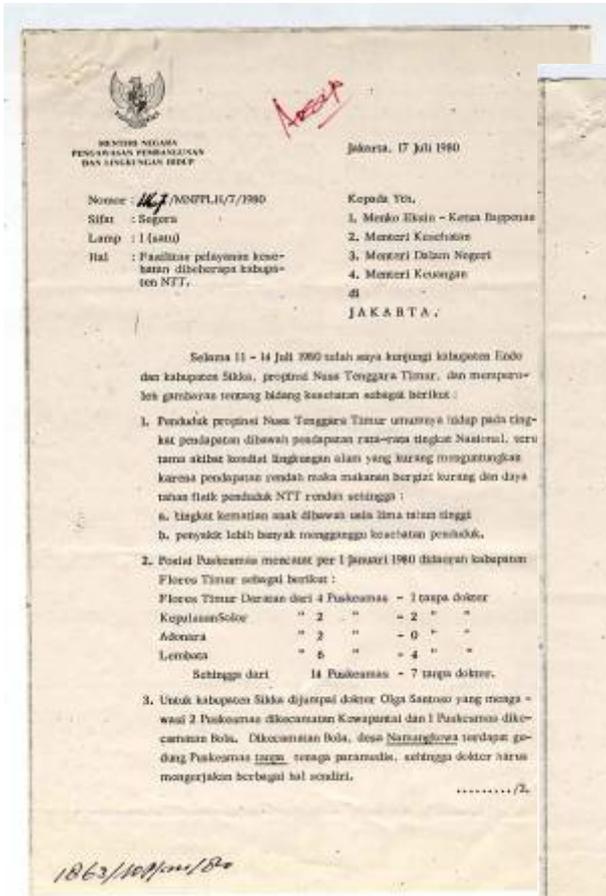
Ringkasan Keputusan Gubernur Jenderal tentang pemberian bantuan pelayanan kesehatan di daerah Pajeti, Sumba, Nusa Tenggara Timur
28 Februari 1917.

Sumber: ANRI, Binnenlandsch Bestuur 1136 C



Tempat perawatan penyakit lepra di Sumba,
Nusa Tenggara Timur
[+ 1930]

Sumber: ANRI, KIT 141/49



Surat dari Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup kepada Menteri Koordinator Ekonomi Keuangan dan Industri mengenai kondisi fasilitas pelayanan kesehatan di beberapa kabupaten di Nusa Tenggara Timur, 17 Juli 1980

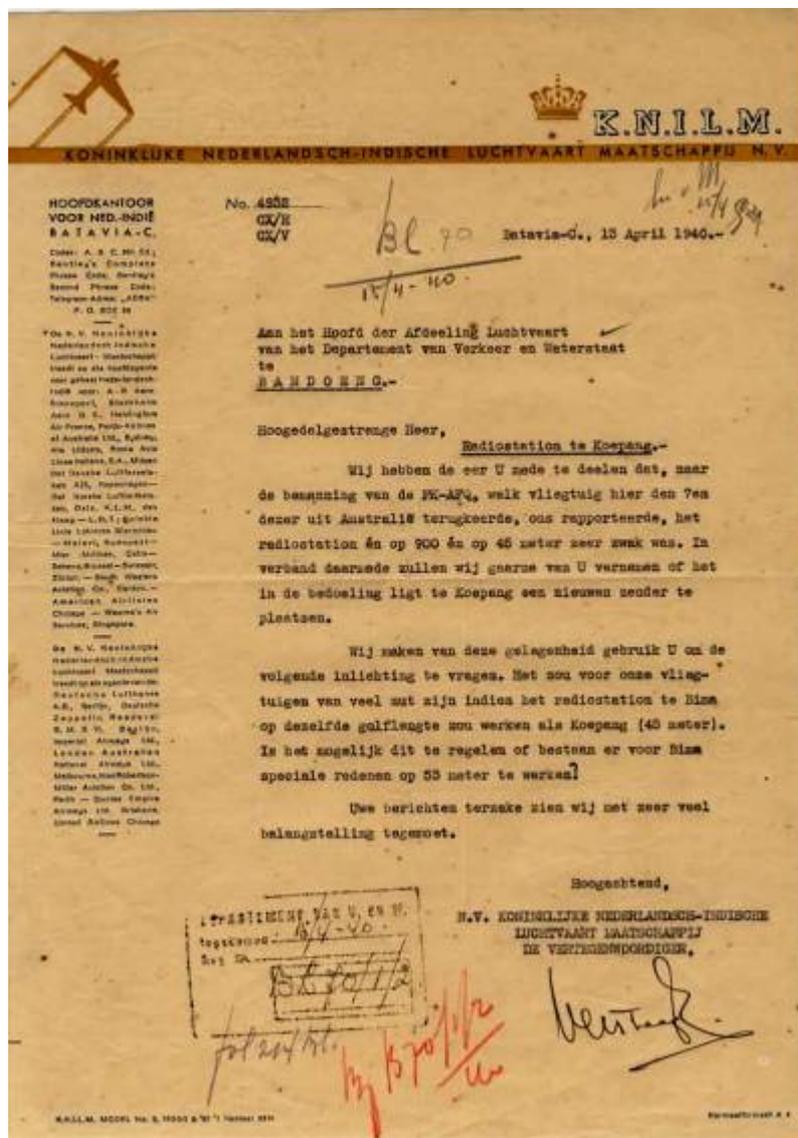
Sumber: ANRI, Setwapres Adam Malik 806

Bangunan



Bangunan pecinan di Kupang, Nusa Tenggara Timur
[+ 1930]

Sumber: ANRI, KIT 217/32



Surat dari *N.V. Koninklijke Nederlandsch Indische Luchtvaart Maatschappij* (KNILM) kepada Kepala Bagian Penerbangan Departemen Perhubungan dan Perairan mengenai pembangunan stasiun radio bandar udara di Kupang, Nusa Tenggara Timur
13 April 1940.

Sumber: ANRI, BOW BL 478



Rumah Raja Amarasi, Nusa Tenggara Timur
16 Oktober 1945

Sumber: ANRI, NIGIS A 16045



Tugu Kemerdekaan di Kupang, Nusa Tenggara Timur
31 Agustus 1951.

Sumber: ANRI, Kempen K 510831 UU 7



Suasana rumah penduduk di tepi laut di Kupang,
Nusa Tenggara Timur
25 April 1952.

Sumber: ANRI, Kempen 520425 NN 130



Bangunan tempat pengasingan Bung Karno di Ende,
Nusa Tenggara Timur
Desember 1952.

Sumber: ANRI, Kempen 193-5



Perkampungan penduduk di Flores,
Nusa Tenggara Timur
Januari 1954.

Sumber: ANRI, Kempen 339-6

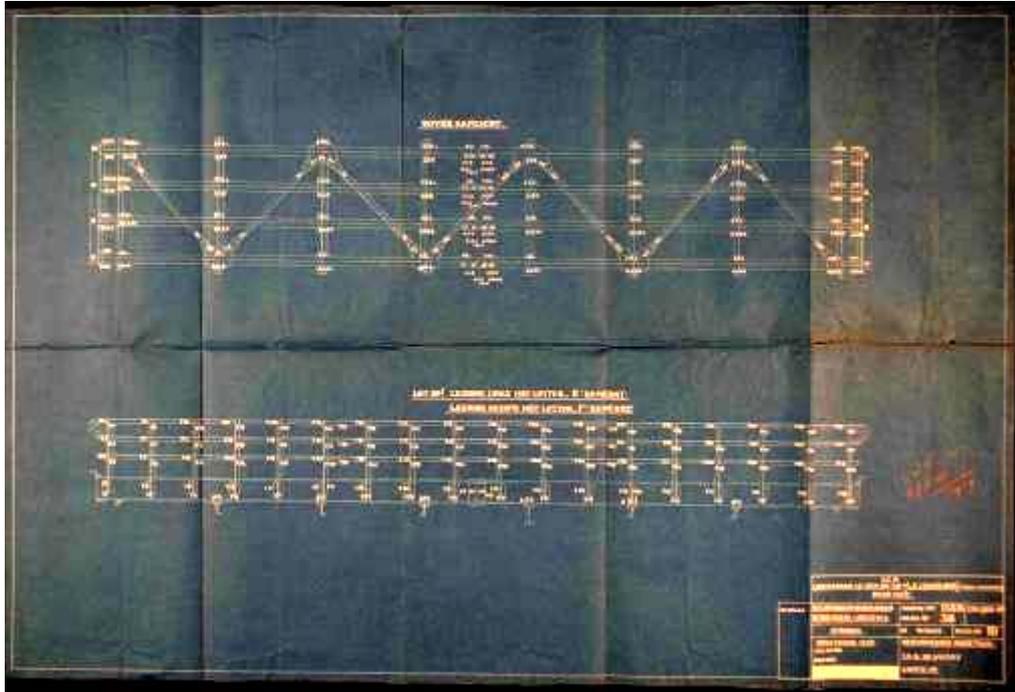


Tugu Proklamasi Kemerdekaan di Waingpu Sumba,
Nusa Tenggara Timur
22 Oktober 1954.

Sumber: ANRI, Kempen 541022 NN 1-1



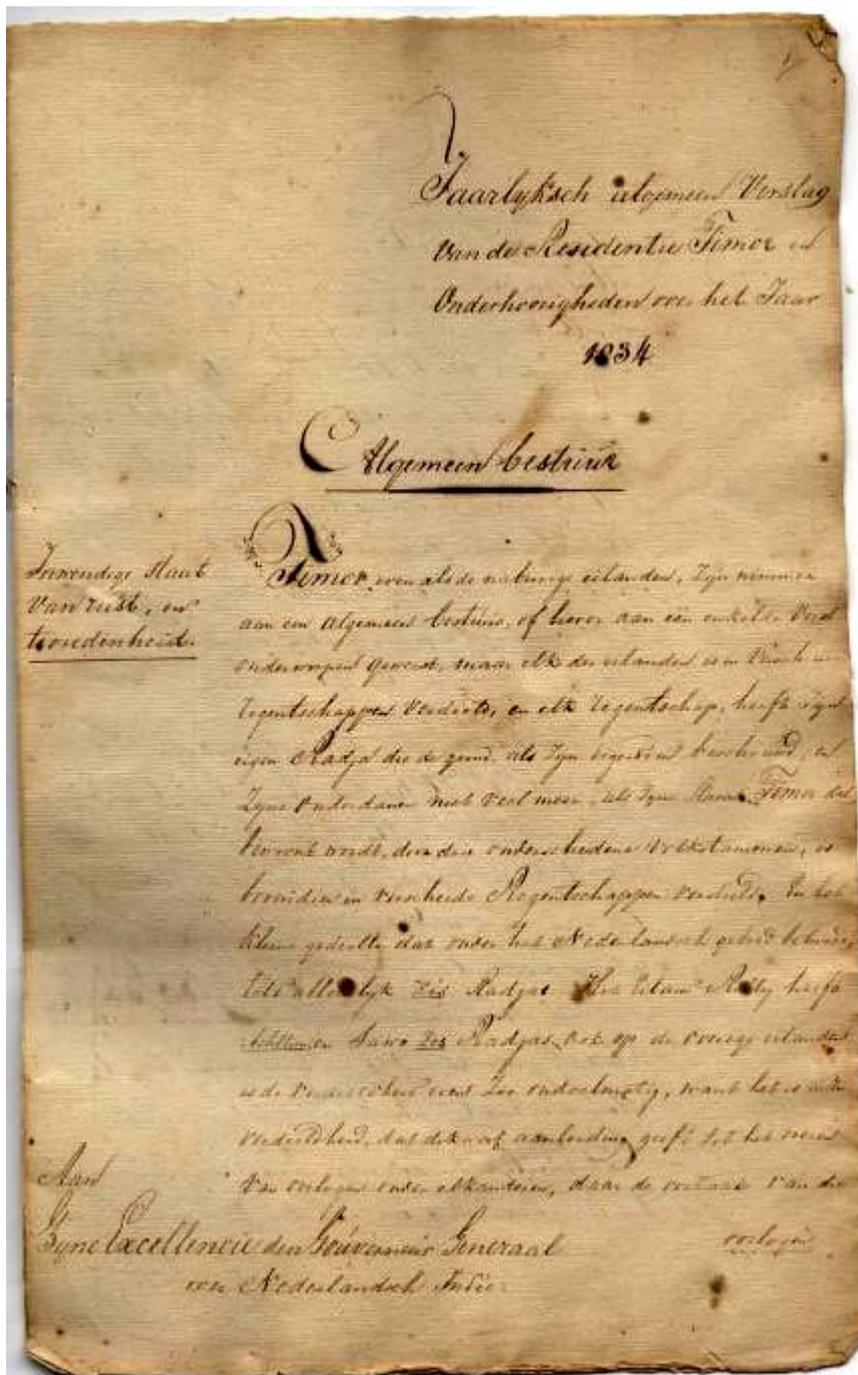
Bentuk rumah rakyat di Waingapu Sumba,
Nusa Tenggara Timur
23 Oktober 1954.
Sumber: ANRI, Kempen 541023 NN 2-2



Cetak biru jembatan Lowolaku di Ende,
Nusa Tenggara Timur
5 Juli 1959.

Sumber: ANRI, BOW/BV 68

Transportasi



Laporan Residen Timor kepada Gubernur Jenderal tentang Kondisi sungai dan transportasi di pedalaman Kupang, Nusa Tenggara Timur 1834.

Sumber: ANRI, Timor 68



Gerobak sapi sebagai alat transportasi di Sumba,
Nusa Tenggara Timur
20 Oktober 1954.

Sumber: ANRI, Kempen 541020 NN 4-2



Eretan di sungai sebagai penghubung yang melancarkan
lalu lintas perairan di Sumba, Nusa Tenggara Timur
4 Juni 1955.

Sumber: ANRI, Kempen 550604 NN 3-1

GUBERNUR/KEPALA DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
DI KUPANG

FL2

Kepada

Bapak Menteri Pekerjaan Umum
Bapak Dirjen. Bina Marga
di-

D J A K A R T A.-

No. Pem.40/1/2.-

Tanggal: 22-2-1967.-

Lampiran: --

Perihal: Pembangunan infra struktur
daerah.-

22 MRT 1967

2807

Handwritten signature

Dengan hormat.-

Dalam rangka pembangunan infra struktur daerah, dimohonkan perhatian Bapak terhadap penjelenggaraan Colombo-plan, yang khusus membangun jembatan di- H.T.T./Timor-Flores untuk dapat diperluas pada bidang pembikinan "landasan udara" dan jalan raja.-

Adapun lapangan udara yang dirantjatkan ialah masing-masing :

- a. Landasan udara Penfui di- Kupang.
- b. Landasan udara Waioti di- Maumere.
- c. Landasan udara Mauhavu di- Waingapu.

Djika landasan udara a-b-c dapat diselesaikan sehingga dapat mudah digunakan oleh pesawat asing, kiranya landasan udara Penfui dan Waioti merupakan lalu lintas pariwisata Australia - Bali, dengan berkesempatan bertamasya di-Danau Tiga warna Kelimutu, dengan bersemail di- Kupang serta menikmati keindahan pantai2 yang terdapat di- H.T.T. Untuk diketahui bahwa pariwisata dari Australia untuk tiap minggu beratus-ratus ke- Timor Dilly dan berkeinginan terus ke- Kupang dan Bali tapi terbentur pada angkutan. Dengan fasilitas di- H.T.T. akan memungkinkan orang Australia berweek end, dan olehnya dapat ditarik manfaat devis.-

Pembangunan jalan/perkeras dan asfalt dapat pula diserahkan pada Colombo plan, dan djika perlu Pemerintah Propinsi dapat diwadjibkan timbal balik menjediakan hasil bumi untuk diperdagangkan dengan negara yang melakukan djasa.-

Adapun jalan sebagai urat nadi ekonomi yang perlu dibangun sepanjang ± 1.500 km.-

Atas perhatian dan diadakannya perentjangan dalam Colombo plan, sebelumnya limpah terima kasih.-



GUBERNUR KEPALA DAERAH
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Handwritten signature
-(EL T A R I)-
Let.Kol.Inf.Mrp.15755.

TENDUSAN dengan hormat disampaikan kepada :

- 1. Ketua Presidium Kabinet Ampere di- Djakarta.
- 2. Bapak Menteri Dalam Negeri di- Djakarta.
- 3. Bapak Menteri Luar Negeri di- Djakarta.
- 4. Bapak Menteri Keuangan di- Djakarta.-

-----PP-----

27/2

Surat dari Gubernur Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Menteri Pekerjaan Umum mengenai pembangunan landasan udara di Kupang, Maumere dan Waingapu,
22 Februari 1967.

Sumber: ANRI, Sekretariat Kabinet 199

Panorama



Pemandangan danau tiga warna Kelimutu di Flores,
Nusa Tenggara Timur
[± 1940]

Sumber: ANRI, NIGIS A 1395



Pemandangan di pantai Laut Kupang, Nusa Tenggara Timur
25 April 1952.

Sumber: ANRI, Kempen 520425 NN 104



Pemandangan di sekitar Pelabuhan Waingapu, Nusa Tenggara Timur, dengan meriam penangkis udara yang ditinggalkan oleh Tentara Jepang, 20 Oktober 1954.

Sumber: ANRI, Kempen 541020 NN 2-2



Panorama di Pulau Komodo, dengan pohon lontar
yang menjadi ciri khas Pulau Komodo.
September 1953.

Sumber: ANRI, Kempen 63-11927



Pemandangan di pantai Teluk Slawi Pulau Komodo,
Nusa Tenggara Timur,
September 1963.

Sumber: ANRI, Kempen 63-11956

DAFTAR ARSIP CITRA DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR

A. GEOGRAFIS

1. Peta *Kleine Soenda Eilanden* (sekarang termasuk Nusa Tenggara Timur), 1860
Sumber: ANRI, Dinas Topografi No.13
Halaman 27
2. Peta Pulau Alor, 1942
Sumber: ANRI, Dinas Topografi No. 2778
Halaman 28
3. Peta Pulau Roti, 1942
Sumber: ANRI, Dinas Topografi No. 2790
Halaman 29
4. Peta Pulau Flores, 1943
Sumber: ANRI, Dinas Topografi No. 2692
Halaman 30
5. Peta pulau Solor, Pulau Adonara, Pulau Lomblen dan sekitarnya, 1943
Sumber: ANRI, Dinas Topografi No.2695
Halaman 31
6. Peta Pulau Alor berbatasan dengan Provinsi Maluku dan Timor Leste, 1943
Sumber: ANRI, Dinas Topografi No.2697
Halaman 32
7. Peta Pulau Sumba, 1943
Sumber: ANRI, Dinas Topografi No. 2700
Halaman 33

8. Peta Pulau Roti, 1943
Sumber: ANRI, Dinas Topografi No. 2707
Halaman 34
9. Peta Pulau Alor dan sekitarnya, 1943
Sumber: ANRI, Dinas Topografi No. 2780
Halaman 35
10. Peta Kabupaten Ngada, 1943
Sumber: ANRI, Dinas Topografi No.2773
Halaman 36
11. Peta Pulau Komodo dan sekitarnya, 1943
Sumber: ANRI, Dinas Topografi No.2775
Halaman 37
12. Peta Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2006
Sumber: ANRI, Dinas Topografi No.2775
Halaman 38

B. POLITIK DAN PEMERINTAHAN

13. Bagian awal dari Kontrak politik antara Raja-raja Timor, Rotty (Rote), Solor, Savo (Sawu), dan Sumba dengan VOC, 9 Juni 1756.
Sumber: ANRI, Timor 29
Halaman 40
14. Kontrak politik antara Raja Amarassie dengan VOC, 1756.
Sumber: ANRI, Timor 32
Halaman 41
15. Bagian awal dari Memori serah jabatan Karesidenan Timor dari Alexander Cornabe kepada Sjinen Vervanger, 1771.
Sumber: ANRI, Timor 2
Halaman 42

16. Perjanjian Alexander Baroek ketika diangkat sebagai Raja Manggarai yang akan berlaku adil dalam pemerintahan serta memajukan kesejahteraan wilayah Manggarai, Nusa Tenggara Timur, 14 November 1930.
Sumber: ANRI, Kontrak 228
Halaman 43
17. Rancangan Keputusan Direktur Binnenlandsch Bestuur tentang penjgasingan Ir. Soekarno ke Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur, 13 Februari 1936.
Sumber: ANRI, Binnenlandsch Bestuur
Halaman 44
18. Fragmen Laporan Politik Karesidenan Timor tahun 1937 antara lain mengenai Ir. Soekarno yang berperliaku baik selama pengasingannya di Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur, 1937.
Sumber: ANRI, Politiek Verslag Reel 10 jilid 4e
Halaman 45
19. Surat pengunduran diri Kolo Banoenaek sebagai Raja Amanatoen, Nusa Tenggara Timur, 1 September 1948,
Sumber: ANRI, Algemeene Secretarie 601
Halaman 46
20. Presiden Soekarno tiba di Kupang dalam rangka kunjungan kerja Presiden di Nusa Tenggara Timur, 30 Oktober 1950.
Sumber: ANRI, Kempen 502146
Halaman 47
21. Presiden Soekarno disambut Kepala Daerah Kupang setibanya di Lapangan Terbang Kupang, Nusa Tenggara Timur, 30 Oktober 1950.
Sumber: ANRI, Kempen 502181
Halaman 48

22. Presiden Soekarno bersama Kepala Daerah Flores, Josef Thomas Ximenes da Silva beramah tamah di Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur, 30 Oktober 1950.
Sumber: ANRI, Kempen 503098
Halaman 49
23. Presiden Soekarno berdiri dekat pohon yang ditanam beliau semasa pengasingannya di Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur, 30 Oktober 1950.
Sumber: ANRI, Kempen 503096
Halaman 50
24. Rapat umum di Ende, masyarakat membawa spanduk yang berisi tentang permintaan dokter Belanda ditarik dari Flores dan mendatangkan dokter Indonesia, 30 Oktober 1950.
Sumber: ANRI, Kempen 503100
Halaman 51
25. Mr. Susanto Tirtoprodjo, Gubernur Sunda Kecil, memberikan pidato dalam rapat umum di Maumere, Nusa Tenggara Timur, 30 Oktober 1950.
Sumber: ANRI, Kempen 503122
Halaman 52
26. Raja-Raja di wilayah Nusa Tenggara Timur menyambut Wakil Presiden Mohammad Hatta dalam kunjungan kerjanya di Lewakambara, Sumba, Nusa Tenggara Timur, 25 April 1952.
Sumber: ANRI, Kempen 520425 NN 41
Halaman 53
27. Wakil Presiden Mohammad Hatta memberikan sambutan di depan masyarakat Timor, Nusa Tenggara Timur, 25 April 1952.
Sumber: ANRI, Kempen 520425 NN 115
Halaman 54

28. Wakil Presiden Mohammad Hatta dengan Raja Sumba, dalam rangka kunjungan kerja Wakil Presiden ke Sumba, Nusa Tenggara Timur, 25 April 1952.
Sumber: ANRI, Kempen 520425 NN 225
Halaman 55
29. Wakil Presiden Mohammad Hatta bersama anggota Pemerintahan Daerah di Waingapu, Sumba, Nusa Tenggara Timur, 25 April 1952.
Sumber: ANRI, Kempen 520425 NN 192
Halaman 56
30. Wakil Kepala Daerah J.W Amole sedang memeriksa barisan perwira dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-7 di Kupang, Nusa Tenggara Timur, 17 Agustus 1952.
Sumber: ANRI, Kempen T.175-21-13
Halaman 57
31. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1954 tentang Perubahan Nama Provinsi Sunda Kecil menjadi Provinsi Nusa Tenggara, 1954.
Sumber: ANRI, Sekretaris Kabinet Undang-Undang Darurat No.103
Halaman 58
32. Rapat Raksasa di Atambua, masyarakat membawa spanduk bertuliskan "Perdamaian Nasional Hanya oleh Pancasila", 13 Mei 1954.
Sumber: ANRI, Kempen K 540513 UU 1-10
Halaman 59
33. Presiden Soekarno bersama Gubernur Sunda Kecil, Sarimin Reksodiharjo menuju ke pelabuhan Ende, 16 Mei 1954.
Sumber: ANRI, Kempen 540516 NN 11
Halaman 60

34. Surat dari Linus Djaro kepada Presiden tentang keadaan pemerintahan di Flores Timur, Maumere, Nusa Tenggara Timur, 9 Juni 1954.
Sumber: ANRI, Kabinet Presiden No.1911
Halaman 61
35. Suasana dalam Sidang Kongres Anggota Panitia Pemilihan Umum Daerah Nusa Tenggara, Rustam Sutan Palindih sedang memberi arahan, 11 Oktober 1954.
Sumber: ANRI, Kempen 541011 UU 1
Halaman 62
36. Kantor Panitia pemungutan suara Kecamatan Bubaen di Timor, Nusa Tenggara Timur, 13 Oktober 1954.
Sumber: ANRI, Kempen 541013 UU 1-1
Halaman 63
37. Konferensi cabang-cabang Partai Katolik Daerah: Resolusi Partai Katolik di daerah Sumba tentang kebutuhan tenaga kerja rohani dan rohaniawan Katolik di Sumba dan Sumbawa, Nusa Tenggara Timur, 15 Juli 1956.
Sumber: ANRI, Kabinet Presiden 193
Halaman 64
38. Presiden Soekarno menerima persembahan dua ekor burung kakaktua berwarna merah dan putih dari rakyat Waingapu, Nusa Tenggara Timur, 4 November 1957.
Sumber: ANRI, Kempen 571104 NN 11
Halaman 65
39. Surat pemberitahuan tentang rapat pertemuan Gerakan Flores Muda untuk membentuk Panitia Peringatan 25 tahun Pembuangan Bung Karno ke Flores, 23 Februari 1959.
Sumber: ANRI, M.Yamin No.706
Halaman 66

40. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1964 tentang Perubahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Provinsi Nusa Tenggara Timur, 7 Maret 1964.
Sumber: ANRI, Sekretariat Kabinet 568
Halaman 67
41. Pernyataan Musyawarah Pantja Tunggal Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang dukungan terhadap pengamanan lima belas orang Menteri Kabinet Dwikora, 24 Maret 1966.
Sumber: ANRI, Departemen Angkatan Laut 47
Halaman 68
42. Bagian awal dari Laporan Inspektur Jenderal Pembangunan, mengenai kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur, 28 Maret 1986.
Sumber: ANRI, Setwapres Umar Wirahadikusuma 749
Halaman 69
43. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 29 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Model sebagai Percontohan Peningkatan Pelayanan Masyarakat di bidang Pertanahan, 17 Oktober 1994.
Sumber: ANRI, Kantor Menteri Negara Agraria 580
Halaman 70

C. PERTAHANAN DAN KEAMANAN

44. Surat kepada Yocio Baptista Viera Godinho, Wakil Kerajaan Portugis di Timor tentang kerjasama patroli dan proteksi jalur perdagangan di Timor dari gangguan para perampok, 1786.
Sumber: ANRI, Timor 7
Halaman 72

45. Surat dari Sopheert kepada Gubernur Jenderal Herman Willem Deandels mengenai pengiriman uang tunai dengan kapal ke Kupang, 1808.
Sumber: ANRI, Timor 8
Halaman 73
46. Laporan dari Kupang kepada Gubernur Jenderal di Batavia mengenai kondisi keamanan para pedagang yang kembali dari Phialarang-Dili, Roti dan warga sekitarnya yang sering mengalami penyerangan dari pasukan Portugis, 1810.
Sumber: ANRI, Timor 16
Halaman 74
47. Laporan Residen Timor tahun 1847 antara lain mengenai pemberontakan rakyat Timor, 1847.
Sumber: ANRI, Timor 78
Halaman 75

D. KEAGAMAAN

48. Laporan dari Residen Timor dan sekitarnya antara lain mengenai agama/kepercayaan orang Sawu, 1834.
Sumber: ANRI, Timor 68
Halaman 77
49. Masjid di Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur
10 September 1951.
Sumber: ANRI, Kempen K 510910 PP 32
Halaman 78
50. Masjid di Kupang, Nusa Tenggara Timur
28 April 1953.
Sumber: ANRI, Kempen K 530428 UU 3-1
Halaman 79

51. Gereja Roma Katolik dan rumah/asrama suster dengan latar belakang bukit di Larantuka. Tampak perahu sedang berlayar di muka gereja, 1930
Sumber: ANRI, KIT 809/62
Halaman 80
52. Pastor van der Lao S.J. bersama jemaat Kristen di depan Gereja Roma Katolik di Konga, Flores, Nusa Tenggara Timur, 1930
Sumber: ANRI, KIT 809/74
Halaman 81
53. Gereja di Lamalerap, Flores, Nusa Tenggara Timur, 22 September 1948.
Sumber: ANRI, RVD 80922 NN 13
Halaman 82
54. Kelenteng China di kampung dekat pantai di Timor, 1936.
Sumber: ANRI, KIT 966/74
Halaman 83
55. Laporan kegiatan bidang urusan Agama Islam Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur antara lain mengenai tempat ibadah Agama Islam di berbagai wilayah, 15 Januari 1953.
Sumber: ANRI, Departemen Agama II 312
Halaman 84
56. Surat Menteri Agama RI mengenai bantuan pemugaran gedung Gereja Katedral Renha Rosari di Larantuka, Nusa Tenggara Timur, 4 Oktober 1986,
Sumber: ANRI, Departemen Agama II 101
Halaman 85

E. PERTANIAN

57. Bagian awal dari Laporan Residen Timor tentang pertanian di Timor, 1834
Sumber: ANRI, Timor 68
Halaman 87
58. Kontrak Residen Timor dengan Hindia Belanda yang antara lain menyebutkan bahwa rakyat di Ende akan menanam kopi, lada, nila, kapas dan kayu manis yang laku di pasaran Eropa, 1 Mei 1839.
Sumber: ANRI, Kontrak/214
Halaman 88
59. Perempuan-perempuan Ende sedang membawa beras di atas kepalanya menuju pasar Ende, [\pm 1930]
Sumber: ANRI, KIT 83/24
Halaman 89
60. Seorang wanita sedang menanam benih jagung di Manggarai, 22 September 1948.
Sumber: ANRI, RVD 80922 NN 19
Halaman 90
61. Kaum lelaki sedang mengetam padi di sawah pada musim panen di Sumba, 25 Agustus 1951 .
Sumber: ANRI, Kempen 510825 NN 20
Halaman 91
62. Cara penyimpanan jagung dengan diikatkan pada pohon kelapa di Waingapu, 25 Agustus 1951.
Sumber: ANRI, Kempen 510825 NN 101
Halaman 92
63. Mengolah tanah garapan dengan tombak kayu untuk pertanian di Sumba, 25 April 1952.
Sumber: ANRI, Kempen 520425 NN 22
Halaman 93

64. Dua orang wanita sedang mencangkul dan menanam palawija di salah satu desa di Sumba, 23 Oktober 1954.
Sumber: ANRI, Kempen 541023 NN 2-5
Halaman 94

F. PEREKONOMIAN

65. Surat dari Inspektur Keuangan tentang tarif bea masuk tembakau dari Pulau Savoe (Sawu), 17 Juni 1834.
Sumber: ANRI, Timor 151
Halaman 96
66. Surat dari Residen Timor J.B.Spang mengenai peraturan peningkatan tarif pajak penjualan cendana putih di Timor, Nusa Tenggara Timur, 30 Juli 1834.
Sumber: ANRI, Timor 47
Halaman 97
67. Laporan mengenai anggaran Flores Timor dan Pulau io Solor antara lain tentang hasil ekspor kuda, sapi dan kerbau, 1838.
Sumber: ANRI, Binnenlandsch Bestuur 5827
Halaman 98
68. Laporan mengenai perdagangan Cendana Putih, 1846.
Sumber: ANRI, Timor 56
Halaman 99
69. Dua orang perempuan dengan barang belanjannya di pasar Kupang, Nusa Tenggara Timu5 Oktober 1954.
Sumber: ANRI, Kempen 541005 UU 1-4
Halaman 100

70. Surat Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan kepada Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur mengenai penyerahan beberapa pajak negara kepada daerah, 28 Maret 1968.
Sumber: ANRI, Menkeu 369
Halaman 101
71. Surat dari Menteri Keuangan, Soedradjat mengenai penyerahan pajak radio, balik nama kendaraan bermotor, pajak bangsa asing kepada daerah Sikka, Nusa Tenggara Timur, 23 April 1969.
Sumber: ANRI, KeMenterian Keuangan 377
Halaman 102
72. Surat Presiden RI tentang persetujuan penanaman modal asing antara Nigel Pater Hough (Inggris) dengan Kwee Cahyadi Kumala dan Asrul Sutana (Indonesia) di bidang peternakan burung unta dan pemotongannya di Kupang, Nusa Tenggara Timur, 24 Juli 1996.
Sumber: ANRI, Sekretaris Menteri Urusan Pemerintahan (ASMIN) 5174
Halaman 103
73. Surat Presiden RI tentang persetujuan penanaman modal asing antara Recontacten Overzee B.V. (Belanda) dengan PT Grahasukses Pratama (Indonesia) di bidang jasa akomodasi (cottage), jasa rekreasi dan wisata tirta kabupaten Sumba, Nusa Tenggara Timur, 9 Oktober 1996.
Sumber: ANRI, Sekretaris Menteri Urusan Pemerintahan (ASMIN) 5347
Halaman 104

G. PENDIDIKAN

74. Daftar buku yang diperlukan untuk gereja dan sekolah di Kupang, 30 September 1759
Sumber: ANRI, Timor 43
Halaman 106

75. Sekolah Rakyat di Ende, nampak murid-murid muslim berfoto bersama guru-guru katolik, [± 1930]
Sumber: ANRI, KIT 1085/90
Halaman 107
76. Sekolah Kepandaian Putri Negeri di Kupang, Nusa Tenggara Timur, 12 Oktober 1954.
Sumber: ANRI, Kempen 541012 UU 1-2
Halaman 108
77. Asrama Sekolah Guru Agama dan Sekolah Menengah Atas di Kupang Timor, Nusa Tenggara Timur, 12 Oktober 1954.
Sumber: ANRI, Kempen 541012 UU 1-4
Halaman 109
78. Seorang biarawati tengah memberikan pelajaran di sekolah Rendah di desa misi Katholik di Keva Menano Timor Tengah, 12 Oktober 1954.
Sumber: ANRI, Kempen 541012 UU 1-8
Halaman 110
79. Surat dari Vikariat Apostolik tentang pernyataan seluruh lapisan masyarakat Flores menyetujui agar Flores dijadikan daerah percobaan kewajiban belajar, 13 Juli 1955.
Sumber: ANRI, M.Yamin 312
Halaman 111
80. Resolusi Kongres Konsentrasi Pelajar Flores ke II di Ende tentang pembentukan Biro Perancang Daerah dan merealisasikan pendidikan dan kebudayaan di segala sektor, 28 Juli 1957
Sumber: ANRI, Konstituante 295
Halaman 112

81. Kongres Mahasiswa/pelajar se Nusa Tenggara Timur tentang pengiriman hasil-hasil kongres mahasiswa dan pelajar seNusa Tenggara Timur, 15 Agustus 1957.
Sumber: ANRI, Kabinet Presiden RI 1220
Halaman 113
82. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang pemberian status terdaftar kepada Akademi Manajemen Keuangan Kupang, setingkat Sarjana Muda, 30 Mei 1983.
Sumber: ANRI, Depdiknas 58
Halaman 114
83. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang pemberian status Terdaftar kepada jurusan Teknik Sipil Program Studi Teknik Sipil pada Fakultas Teknik di lingkungan Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, 11 Desember 1990.
Sumber: ANRI, Depdiknas 481
Halaman 115

H. KEBUDAYAAN

84. Batu kubur di Chai Ronja, Sumba, Nusa Tenggara Timur, [± 1930]
Sumber: ANRI, KIT 815/22
Halaman 117
85. Raja Timor beserta keluarga dalam busana adat, di pulau Savoe, Nusa Tenggara Timur, [± 1930]
Sumber: ANRI, KIT 460/62
Halaman 118
86. Batu kubur di Kampong Rende, pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur, [± 1930].
Sumber: ANRI, NIGIS A 870
Halaman 119

87. Raja Sikka, Don Josef Thomas Ximenes da Silva beserta istri berpakaian adat abad ke 15 di Timor, Nusa Tenggara Timur, 8 Agustus 1948.
Sumber: ANRI, RVD 80808 NN 9
Halaman 120
88. Pertunjukan tari Lekurai yang dibawakan wanita-wanita dari Bellu Malaka Flores, Nusa Tenggara Timur 12 Agustus 1948.
Sumber: ANRI, RVD 80812 UU 2-3
Halaman 121
89. Pertandingan sabung ayam dalam masyarakat di Maumere, Nusa Tenggara Timur, 22 September 1948.
Sumber: ANRI, RVD 80922 NN 27
Halaman 122
90. Profil Perempuan dari Manggarai, Nusa Tenggara Timur dengan pakaian pesta, 11 Oktober 1948.
Sumber: ANRI, RVD 81011 NN 18
Halaman 123
91. Seorang wanita dengan alat musik sasando, alat musik khas Nusa Tenggara Timur, 8 Mei 1949.
Sumber: ANRI, RVD M 3189
Halaman 124
92. Dua perempuan menggendong anaknya, salah satunya dengan cara memasukkan anaknya ke dalam kain yang dikenakan ibunya, kain khas Nusa Tenggara Timur, 20 Juli 1949.
Sumber: ANRI, RVD 90720 UU 4
Halaman 125
93. Tarian perang di Sumba, 30 Oktober 1950.
Sumber: ANRI, Kempen 502113
Halaman 126

94. Keluarga Raja Lewa Paku Umbun Dai Ndimia di Waingapu, dengan latar belakang kain tenun khas Nusa Tenggara Timur, 25 Agustus 1951.
Sumber: ANRI, Kempen 510825 NN 1
Halaman 127
95. Penyimpanan mayat sebelum dikubur dengan diberi sesaji untuk arwah, di Waingapu, Nusa Tenggara Timur 25 Agustus 1951.
Sumber: ANRI, Kempen 510825 NN 2
Halaman 128
96. Kepala Distrik Lewa Paku, Waingapu, Umbun Nai Ndimia bersama keluarga menggunakan kain tenun khas, Nusa Tenggara Timur, 25 Agustus 1951.
Sumber: ANRI, Kempen 510825 NN 6
Halaman 129
97. Profil sepasang mempelai di Nita, Flores, Nusa Tenggara Timur, 10 September 1951.
Sumber: ANRI, Kempen K 510910 PP 29
Halaman 130
98. Tari Selendang, tarian khas Nusa Tenggara Timur Januari 1952.
Sumber: ANRI, Kempen 104-5
Halaman 131
99. Pemukul gendang dan gong dalam pertunjukan kuda menari di Lewakambara, Nusa Tenggara Timur, 25 April 1952.
Sumber: ANRI, 520425 NN 27
Halaman 132
100. Wanita Dangra Nagakeo, Flores, dengan berpakaian adat, menyambut kunjungan kerja Presiden Soekarno di Nusa Tenggara Timur, 25 April 1952.
Sumber: ANRI, Kempen 520425 NN 151
Halaman 133

101. Pakaian wanita adat kebesaran anak raja Niki-Niki Kupang, Nusa Tenggara Timur, November 1952.
Sumber: ANRI, Kempen 199-3
Halaman 134
102. Peralatan Raja Sumba, Timor, Nusa Tenggara Timur dengan beberapa barang pusaka untuk selamatan bagi arwah keluarga yang telah meninggal, Februari 1954.
Sumber: ANRI, Kempen 318-48
Halaman 135
103. Presiden Soekarno tengah menggunting pita di pintu gedung museum di Ende, Nusa Tenggara Timur, 16 Mei 1954.
Sumber: ANRI, Kempen 540516 NN 20
Halaman 136
104. Surat Gubernur Sunda Kecil mengenai pembukaan museum di Ende, Nusa Tenggara Timur, 24 Mei 1954.
Sumber: ANRI, Kabinet Presiden RI 1144
Halaman 137
105. Seorang lelaki memikul tempat air yang terbuat dari daun lontar untuk membawa air, 2 Juni 1955.
Sumber: ANRI, Kempen 550602 UU 3-1
Halaman 138

I. PERINDUSTRIAN

106. Surat perjanjian Raja Sikka dengan Hindia Belanda tentang pertambangan di bumi Sikka, Flores, 6 Desember 1898.
Sumber: ANRI, Kontrak 265
Halaman 140

107. Pabrik Pemintalan benang di Sumba, Nusa Tenggara Timur, 1947.
Sumber: ANRI, RVD A 717/47
Halaman 141
108. Pengolahan kapas untuk dijadikan benang secara tradisonal, di Sumba, Nusa Tenggara Timur, 4 Agustus 1948.
Sumber: ANRI, RVD 80804 NN 2-2
Halaman 142
109. Proses pencelupan benang untuk pewarnaan kain tenun secara tradisional di Flores, Nusa Tenggara Timur, 4 Agustus 1948.
Sumber: ANRI, RVD 80804 NN 2-5
Halaman 143
110. Seorang wanita sedang membuat motif pada kain tenun ikat, di Flores, Nusa Tenggara Timur, 4 Agustus 1948.
Sumber: ANRI, RVD 80804 NN 2-10
Halaman 144
111. Proses penyaringan air laut untuk dijadikan garam dengan cara menggunakan saringan dari tikar penyaring di Meilolo, Sumba, Nusa Tenggara Timur, 25 Agustus 1951
Sumber: ANRI, Kempen 510825 NN 125
Halaman 145
112. Wakil Preiden Mohammad Hatta meninjau salah satu perusahaan kain tenun di Ende Flores, Nusa Tenggara Timur, 25 April 1952.
Sumber: ANRI, Kempen 520425 NN 193
Halaman 146

113. Wakil Presiden Mohammad Hatta meninjau pabrik makanan dalam kaleng Icaff di Kupang, Nusa Tenggara Timur, 2 Oktober 1954

Sumber: ANRI, Kempen 541002 UU 6

Halaman 147

J. FAUNA

114. Surat dari Sekretaris Gubernur Jenderal Hindia Belanda kepada Residen Timor tentang perlindungan komodo di Pulau Komodo,
29 Juli 1915.

Sumber: ANRI, Binnenlandsch Bestuur 1136 B

Halaman 149

115. Ringkasan Keputusan Residen Timor tentang perlindungan Pulau Komodo dan Rinja di Manggarai, Nusa Tenggara Timur, 22 Januari 1927.

Sumber: ANRI, Binnenlandsch Bestuur 1324

Halaman 150

116. Peternakan sapi di padang yang luas di Sumba, Nusa Tenggara Timur, 27 April 1952.

Sumber: ANRI, Kempen 520425 NN 32

Halaman 151

117. Perahu yang digunakan nelayan Lamalerap, Nusa Tenggara Timur untuk menangkap ikan paus,
22 September 1948.

Sumber: ANRI, RVD 80922 NN 11

Halaman 152

118. Seorang anak laki-laki berdiri di sebuah tulang rahang ikan paus yang sangat besar di Lamalerap, Nusa Tenggara Timur, 22 September 1948.

Sumber: ANRI, RVD 80922 NN 30

Halaman 153

119. Gajih ikan paus dijemur dipanas matahari kemudian ditampung dan dipakai sebagai bahan bakar di Lamalerap, Nusa Tenggara Timur, 22 September 1948.
Sumber: ANRI, RVD 80922 NN 32
Halaman 154
120. Penangkapan ikan secara beramai-ramai oleh penduduk di muara pantai Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, 23 Oktober 1954.
Sumber: ANRI, Kempen 541023 NN 1
Halaman 155
121. Komodo salah satu fauna khas Indonesia yang hanya ada di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur, September 1963.
Sumber: ANRI, Kempen 63-1197
Halaman 156

K. KESEHATAN

122. Subsidi untuk bantuan pelayanan kesehatan di daerah Pajeti, Nusa Tenggara Timur, 28 Februari 1917.
Sumber: ANRI, Binnenlandsch Bestuur 1136 C
Halaman 158
123. Tempat perawatan penyakit lepra di Sumba, Nusa Tenggara Timur [± 1930]
Sumber: ANRI, KIT 141/49
Halaman 159
124. Surat Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup mengenai kondisi fasilitas pelayan kesehatan di beberapa kabupaten di Nusa Tenggara Timur, 17 Juli 1980
Sumber: ANRI, Setwapres Adam Malik 806
Halaman 160

L. BANGUNAN

125. Suasana kampung pecinan di Kupang, Nusa Tenggara Timur, [± 1930]
Sumber: ANRI, KIT 217/32
Halaman 162
126. Surat dari *Koninklijke Nederlandsch Indische Luchtvaart Maatschappig* (KNILM) mengenai pembangunan stasiun radio bandar udara di Kupang, Nusa Tenggara Timur, 13 April 1940.
Sumber: ANRI, BOW BL 478
Halaman 163
127. Rumah Raja Amarasi, Nusa Tenggara Timur, 16 Oktober 1945
Sumber: ANRI, NIGIS A 16045
Halaman 164
128. Tugu Kemerdekaan di Kupang, Nusa Tenggara Timur 31 Agustus 1951.
Sumber: ANRI, Kempen K 510831 UU 7
Halaman 165
129. Suasana rumah penduduk di tepi laut di Kupang, Nusa Tenggara Timur, 25 April 1952.
Sumber: ANRI, Kempen 520425 NN 130
Halaman 166
130. Bangunan tempat pengasingan Bung Karno di Ende, Nusa Tenggara Timur, Desember 1952.
Sumber: ANRI, Kempen 193-5
Halaman 167
131. Perkampungan penduduk di Flores, Nusa Tenggara Timur, Januari 1954.
Sumber: ANRI, Kempen 339-6
Halaman 168

132. Tugu Proklamasi Kemerdekaan di Waingpu Sumba, Nusa Tenggara Timur, 22 Oktober 1954.
Sumber: ANRI, Kempen 541022 NN 1-1
Halaman 169
133. Bentuk rumah rakyat di Waingapu Sumba, Nusa Tenggara Timur, 23 Oktober 1954.
Sumber: ANRI, Kempen 541023 NN 2-2
Halaman 170
134. Cetak biru jembatan Lowolaku di Ende, Nusa Tenggara Timur, 5 Juli 1959.
Sumber: ANRI, BOW/BV 68
Halaman 171

M. TRANSPORTASI

135. Kondisi sungai dan transportasi di pedalaman Kupang, Nusa Tenggara Timur, 1834.
Sumber: ANRI, Timor 68
Halaman 173
136. Gerobak sapi sebagai alat transportasi di Sumba, Nusa Tenggara Timur, 20 Oktober 1954.
Sumber: ANRI, Kempen 541020 NN 4-2
Halaman 174
137. Eretan di sungai sebagai penghubung yang melancarkan lalu lintas perairan di Sumba, Nusa Tenggara Timur, 4 Juni 1955.
Sumber: ANRI, Kempen 550604 NN 3-1
Halaman 175
138. Surat Gubernur Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengenai pembangunan landasan udara di Kupang, Maumere dan Waingapu, 22 Februari 1967.
Sumber: ANRI, Sekretariat Kabinet 199
Halaman 176

N. PANORAMA

139. Pemandangan danau tiga warna Kelimutu di Flores, Nusa Tenggara Timur [\pm 1940]
Sumber: ANRI, NIGIS A 1395
Halaman 178
140. Pemandangan di pantai Laut Kupang, Nusa Tenggara Timur, 25 April 1952.
Sumber: ANRI, Kempen 520425 NN 104
Halaman 179
141. Pemandangan di sekitar Pelabuhan Waingapu, Nusa Tenggara Timur, dengan meriam penangkis udara yang ditinggalkan oleh Tentara Jepang, 20 Oktober 1954.
Sumber: ANRI, Kempen 541020 NN 2-2
Halaman 180
142. Panorama di Pulau Komodo, dengan pohon lontar yang menjadi ciri khas Pulau Komodo. September 1953.
Sumber: ANRI, Kempen 63-11927
Halaman 181
143. Pemandangan di pantai Teluk Slawi Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur, September 1963.
Sumber: ANRI, Kempen 63-11956
Halaman 182

Penutup

PENUTUP

Program Citra Daerah yang dikembangkan ANRI merupakan salah satu upaya memberdayakan daerah melalui arsip. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yakni meningkatkan peran daerah di berbagai bidang, termasuk bidang kearsipan.

Arsip sebagai salah satu sumber informasi yang terpercaya dapat menunjukkan keberhasilan maupun kegagalan yang dialami pada masa lalu untuk diaplikasikan secara adaptif dan kontekstual dalam merencanakan pembangunan di daerah yang semakin kompleks.

“Citra Nusa Tenggara Timur Dalam Arsip” diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menyebarkannya kepada masyarakat umum, khususnya generasi muda.

Penyebarluasan ini sangat penting artinya karena dapat memberikan dorongan kepada masyarakat luas untuk mempelajari dan menggali lebih dalam lagi informasi mengenai penyelenggaraan kehidupan kebangsaan dalam lingkup daerah.

Pada gilirannya arsip dapat menjadi memori kolektif daerah yang berfungsi sebagai pemberi semangat dalam menumbuhkan rasa kebanggaan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.